

# Sejarah Singkat Mangupura Ibu Kota Kabupaten Badung

**P**embangunan Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung di Mengwi dilatarbelakangi oleh proses pemekaran Kabupaten Badung menjadi dua wilayah yaitu Kabupaten Badung dan Kota Madya Denpasar pada tahun 1992. Pemekaran tersebut secara faktual telah menyebabkan di wilayah Denpasar saat itu terdapat dua pusat pemerintahan yaitu Kabupaten Badung dan Kota Madya Tingkat II Denpasar (kini Kota Denpasar) yang pembentukannya ditetapkan dengan UU Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Denpasar. Berdasarkan kondisi tersebut, lalu muncul pemikiran untuk memindahkan pusat pemerintahan Kabupaten Badung saat itu *Dharma Praja* yang berada di kawasan Lumintang Denpasar ke wilayah Kabupaten Badung.



Pembangunan Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung di Mengwi dilatarbelakangi oleh proses pemekaran Kabupaten Badung menjadi dua wilayah yaitu Kabupaten Badung dan Kota Madya Denpasar pada tahun 1992. Pemekaran tersebut secara faktual telah menyebabkan di wilayah Denpasar saat itu terdapat dua pusat pemerintahan yaitu Kabupaten Badung dan Kota Madya Tingkat II Denpasar (kini Kota Denpasar) yang pembentukannya ditetapkan dengan UU Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Denpasar. Berdasarkan kondisi tersebut, lalu muncul pemikiran untuk memindahkan pusat pemerintahan Kabupaten Badung saat itu *Dharma Praja* yang berada di kawasan Lumintang Denpasar ke wilayah Kabupaten Badung.

Sejak lepasnya Kota Denpasar dari Kabupaten Badung, segala urusan administrasi pemerintahan di Kabupaten Badung tidak terkonsentrasi di satu tempat, hal tersebut berdampak kurang efektif dan efisiennya urusan manajemen pemerintahan. Keberadaan wilayah Kabupaten Badung yang memanjang dari utara ke selatan dan ditengah-tengah telah menjadi bagian wilayah kota Denpasar, memerlukan adanya pusat pemerintahan



yang terfokus pada satu lokasi yang strategis sehingga memudahkan dalam komunikasi, koordinasi dan pelayanan kepada masyarakat.



DERETAN MERUS DI PURA TAMAN AJUN  
A ROW OF MERUS (PAGODAS) IN THE TAMAN AJUN TEMPLE

Dalam perjalanan selanjutnya, rencana pembangunan pusat pemerintahan ditetapkan lokasinya di Kelurahan Sempidi dengan luas lahan 46,677 hektar. Berdasarkan rekomendasi DPRD Kabupaten Badung nomor : 100/662/DPRD tanggal 19 Oktober 2001 tentang rekomendasi Penetapan lokasi Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung yang kemudian ditetapkan melalui Keputusan Bupati Badung Nomor 1269 tahun 2001 tentang Penetapan Lokasi Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung. Peristiwa yang bersejarah tersebut terjadi pada masa pemerintahan Bupati Badung A.A.Ngurah Oka Ratmadi,SH.

Ada beberapa alasan dipilihnya Mengwi sebagai pusat pemerintahan Kabupaten Badung antara lain :

1. Mengwi adalah suatu pusat pemerintahan dari jaman kerajaan yang raja-rajanya keturunan Majapahit mempunyai gaya dan bentuk kota yang khas.
2. Mengwi mempunyai warisan budaya Taman Ayun yang juga telah ditetapkan sebagai warisan budaya dunia.
3. Mengwi merupakan pusat (catuspatha) atau titik nol pusat pemerintahan Badung yang secara spiritual terletak di Pura Sad Kahyangan yakni Pura Pucak Mangu (gunung) dan Pura Uluwatu (laut) hal ini sesuai dengan konsep *Nyegara Gunung*.





Membangun Pusat Pemerintahan yang *representative* memang tidak mudah, beberapa kali dilakukan revisi dan penyempurnaan *DED*. Bupati Badung saat itu Anak Agung Gde Agung, SH menginginkan bagaimana Puspem Badung menonjolkan kearifan lokal termasuk dalam pemilihan bahan bangunan, nuansa Bali yang berlandaskan ajaran agama Hindu dengan menggunakan filsafat *Tri Mandala* yang terdiri atas *Utama Mandala*, *Madya Mandala*, *Nista Mandala* (*hulu, tengah, hilir*).

Nama *Mangupura* tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya dari nama Mengwi. Secara etimologis, *Mangupura* berasal dari dua kata *Mangu* yang berarti merenung atau *semadi* dan *Pura* yang berarti Kota, maka secara harfiah *Mangupura* dapat diartikan sebagai kota tempat merenung (*semadi*). Berbicara soal *semadi*, merujuk pada adanya suatu tempat yaitu Puncak Mangu (bukit pengelengan) ditempat tersebut I Gusti Agung Putu yang menjadi cikal bakal Raja – Raja Mengwi bersemadi memohon restu agar diberkahi keberhasilan dalam menundukan lawan-lawannya. Berkat petunjuk Beliau yang bersthana di Puncak Mangu, permohonannya dikabulkan dan sebagai tanda kemenangan, maka dibangunlah sebuah kota untuk dijadikan pusat aktivitas yang diberi nama “*Mangupura*”.

Ada kemungkinan lain, bahwa *Mangupura* berasal dari *Mangopuri* yang artinya “tempat yang indah” adalah salah satu tempat yang menjadi pilihan *dharma yatra* Dang Hyang Nirarta pada abad 15/16 Masehi. Dua abad kemudian, tempat itulah yang muncul dalam *semadi* I Gusti Agung Putu di Puncak Mangu, maka dipilihlah sebuah tempat sebagai pusat kerajaan sekaligus ibu kota yang diberi nama “*Mangopura*” yang artinya kota yang indah. *Mangupura* juga disebut *Kawyapura* berasal dari kata *Kawya* = *Mango* berarti karangan atau buatan dan *pura* yang berarti kota. *Kwayapura* atau *Mangopura* kurang lebih dapat diartikan sebagai sebuah kota yang dengan sengaja dibangun untuk dijadikan pusat pemerintahan dengan batas-batasnya yang jelas sebagai banteng kerajaan.





Bertolak dari uraian diatas, jelaslah bahwa nama Mangupura sudah pernah mengumandang menjadi *ikon* sebuah kerajaan yang memiliki posisi tawar sejajar dengan kerajaan lain di Bali yang bernaung dibawah panji-panji kerajaan *Semarapura*. Lebih dari 200 tahun ikut berperan di panggung sejarah Bali, kini Mangupura yang kedengaran begitu indah, dahulu digunakan untuk menyebut sebuah tempat ibu kota kerajaan, diluar dugaan bangkit kembali dijadikan ibu kota kabupaten yaitu Kabupaten Badung.

Tanda –tanda bangkitnya kembali Mangupura sebagai ibu kota Kabupaten Badung sesungguhnya tidak ada yang kuasa menebaknya, walaupun berbagai fenomena yang tampak dipermukaan seperti : pemecahan Kabupaten Badung menjadi Kota Denpasar dan Kabupaten Badung tahun 1992, terbakarnya Puspem Kabupaten Badung di Lumintang tahun 1999, tampilnya Anak Agung Gde Agung dari Puri Mengwi sebagai Bupati Badung, dipilihnya Mengwi sebagai pusat pemerintahan, semuanya itu sebagai pembuka jalan bagi kembalinya Mangupura sebagai ibu kota Kabupaten Badung.



*Kawasan Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung Mangupura Mandala*

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 67 tahun 2009 tentang Pemindahan ibu kota Kabupaten Badung dari wilayah Kota Denpasar ke wilayah Kecamatan Mengwi, ibu kota Kabupaten Badung berkedudukan di wilayah Kecamatan Mengwi yang meliputi 9 (Sembilan) desa / kelurahan yaitu : Desa Mengwi, Desa Gulingan, Desa Mengwitani,





Desa Kekeran, Kelurahan Kapal, Kelurahan Abianbase, Kelurahan Lukluk, Kelurahan Sempidi dan Kelurahan Sading, maka pada tanggal 16 Nopember 2009 Mangupura resmi menjadi ibu kota Kabupaten Badung yang ditanda tangani Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono dan diresmikan pada tanggal 12 Pebruari 2010 oleh Menteri Dalam Negeri H.Gamawan Fauzi.

Kini Mangupura telah menjadi pusat pemerintahan yang sangat representative dan terintegrasi. Disamping sebagai pusat pemerintahan dan pelayanan publik, Mangupura dengan pusat perkantoran Mangupraja Mandala juga menjadi tempat aktivitas seni, budaya dan keagamaan bukan saja bagi umat Hindu yang merupakan mayoritas, tetapi juga bagi umat lainnya seperti Islam, Kristen, Buda dan sebagainya sehingga menjadi simbol kuatnya toleransi antar umat di Kabupaten Badung, sebagai tempat rekreasi dan olah raga bagi masyarakat serta telah dikunjungi ribuan tamu dari berbagai daerah di Indonesia dan terakhir tentunya diharapkan dapat menjadi tempat pelayanan publik kebanggaan kita semua. ( dikutip dari : *Buku Mangupura Ibu Kota Kabupaten Badung, diterbitkan oleh Dinas Kebudayaan Kabupaten Badung tahun 2011* ) .



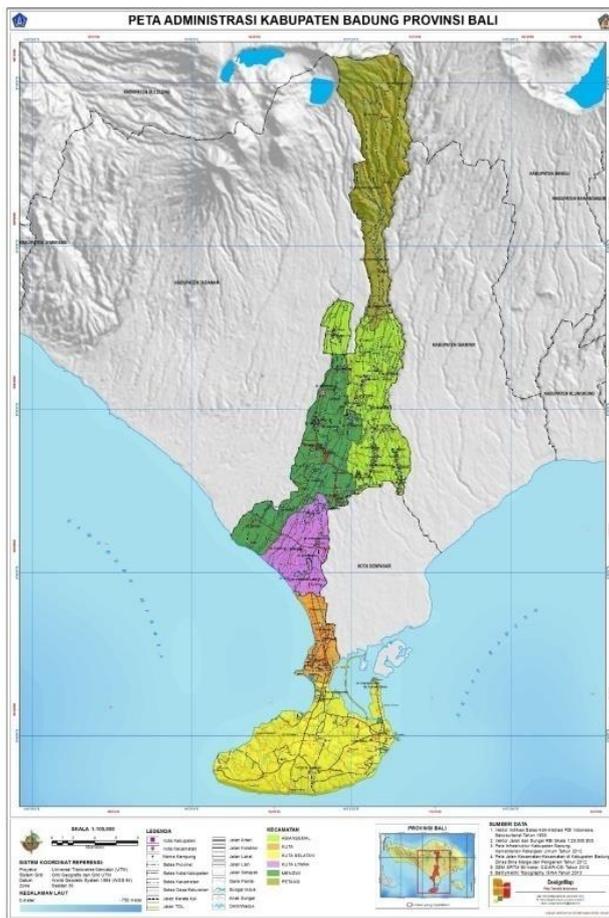


# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 TENTANG KABUPATEN BADUNG

### - Geografis

Badung merupakan salah satu kabupaten / kota di Provinsi Bali yang memiliki luas 418,52 km<sup>2</sup> atau sekitar 7,43 persen luas wilayah Provinsi Bali dan terletak dibagian



paling selatan dari pulau Bali. Secara administratif, Kabupaten Badung berbatasan dengan dengan Kabupaten Buleleng di sebelah utara, Kabupaten Gianyar, Bangli dan Kota Denpasar di sebelah Timur, Kabupaten Tabanan disebelah barat serta Samudera Indonesia di sebelah Selatan, terbagi atas 6 wilayah kecamatan dan 62 desa/kelurahan. Dari seluruh kecamatan yang ada, kecamatan Petang merupakan kecamatan terluas dengan luas 115 Km<sup>2</sup> sedangkan kecamatan Kuta merupakan kecamatan yang terkecil dengan luas wilayah 17,52 km<sup>2</sup>. Disamping memiliki desa/ kelurahan yang sering disebut desa dinas, terdapat 122 desa adat, 531 Banjar adat dan Sekaa Teruna yaitu kelompok pemuda dan pemudi yang bernaung dibawah desa adat sebagai bentuk kearifan lokal.

Keberadaan desa dinas dan desa adat selama ini berjalan harmonis karena memiliki fungsi yang berbeda dimana desa dinas melayani administrasi kedinasan sedangkan desa adat khusus melaksanakan fungsi pelestarian adat, agama dan budaya.

### - Demografi

Jumlah penduduk Kabupaten Badung sampai dengan data semester II tahun 2018 sebanyak 476.675 jiwa, yang terdiri dari 238.412 jiwa penduduk laki-laki (50,02%) dan 238.263 jiwa penduduk perempuan (49,98%). Jumlah penduduk paling banyak





terdapat di kecamatan Mengwi yaitu sebanyak 121.651 jiwa atau 25,52% dari total penduduk Kabupaten Badung, sementara kecamatan Petang merupakan wilayah dengan jumlah penduduk paling sedikit yaitu 30.812 jiwa (6,46%).

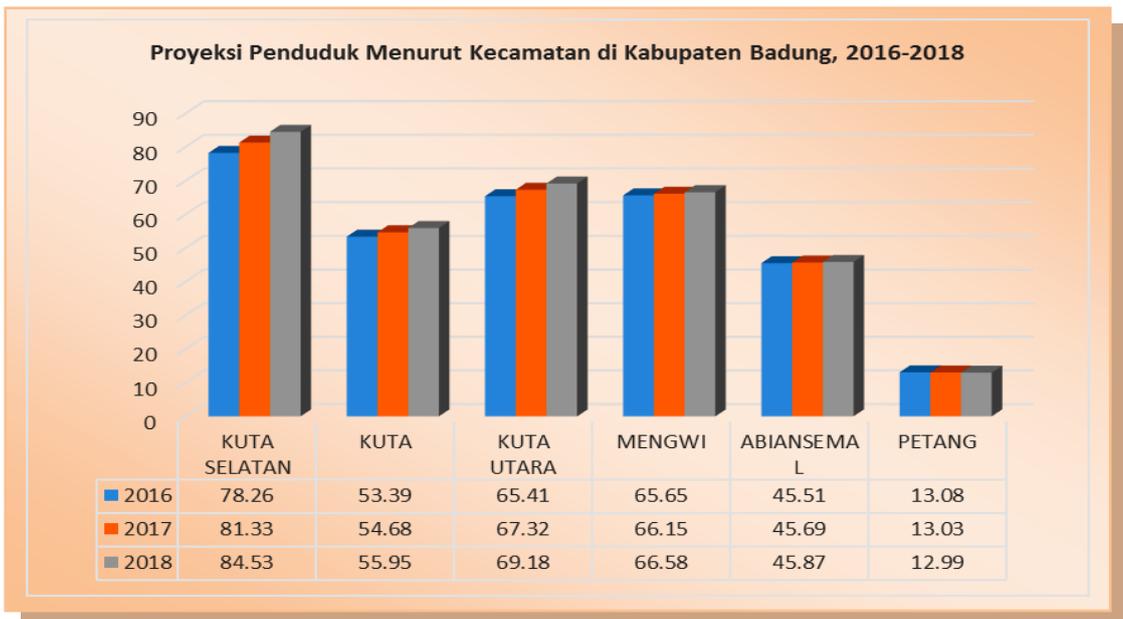
Tabel 1.1  
Luas Wilayah dan Jumlah penduduk menurut Jenis kelamin per kecamatan di Kabupaten Badung Tahun 2018

Kecamatan	Luas Wilayah (Km <sup>2</sup> )	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1. Kuta Selatan	101,13	50.415	50.310	100.725
2. Kuta	17,52	26.493	25.859	52.352
3. Kuta Utara	33,86	39.220	39.524	78.744
4. Mengwi	82,00	60687	60964	121.651
5. Abiansemal	69,01	45.963	46.428	92.391
6. Petang	115,00	15.634	15.178	30.812
<b>Jumlah</b>	<b>418,52</b>	<b>238.412</b>	<b>238.263</b>	<b>476.675</b>

Sumber : Dinas Catatan Sipil Kabupaten Badung

Distribusi jumlah penduduk menurut kecamatan menunjukkan bahwa penduduk di 3 wilayah kecamatan yaitu Kecamatan Kuta Selatan, Kuta dan Kuta Utara menunjukkan trend peningkatan, hal ini disebabkan oleh migrasi penduduk pendatang. Sedangkan untuk tiga kecamatan lainnya relatif stabil. Distribusi penduduk per kecamatan seperti berikut :

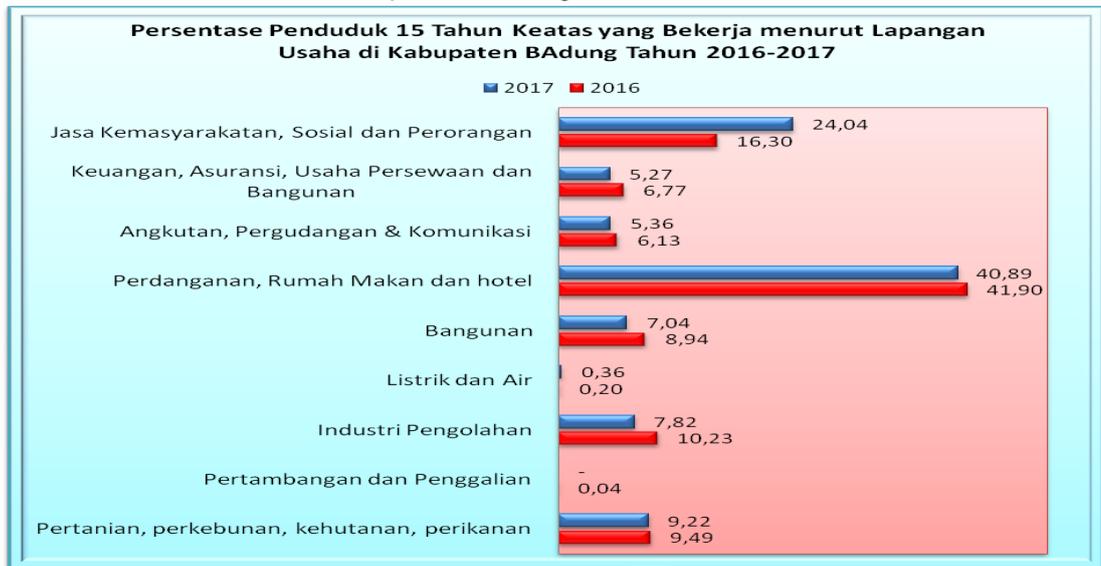
Grafik 1.1  
Proyeksi Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Badung tahun 2016-2018



**- Ketenagakerjaan**

Apabila dilihat dari perkembangan penduduk berdasarkan penyerapan sektor lapangan usaha berdasarkan data BPS tahun 2017, secara kumulatif penyerapan paling banyak berada pada sektor perdagangan, rumah makan dan hotel. Penyerapan tenaga kerja pada sektor ini sebesar 40,89% dari jumlah tenaga kerja keseluruhan Kabupaten Badung dan mengalami penurunan dibanding tahun 2016 sebesar 41,90%.

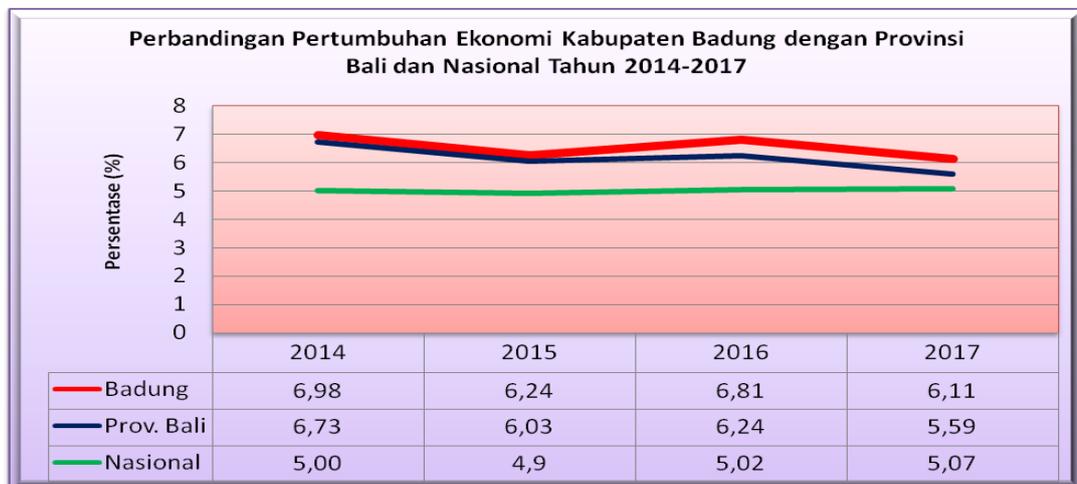
Grafik 1.2  
Persentase Penduduk 15 Tahun Keatas yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Badung Tahun 2016-2017



Sumber : Kabupaten Badung dalam Angka Tahun 2016 & 2017

**- Perekonomian Daerah**

Grafik 1.3  
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Badung, Provinsi Bali dan Nasional Tahun 2014-2017





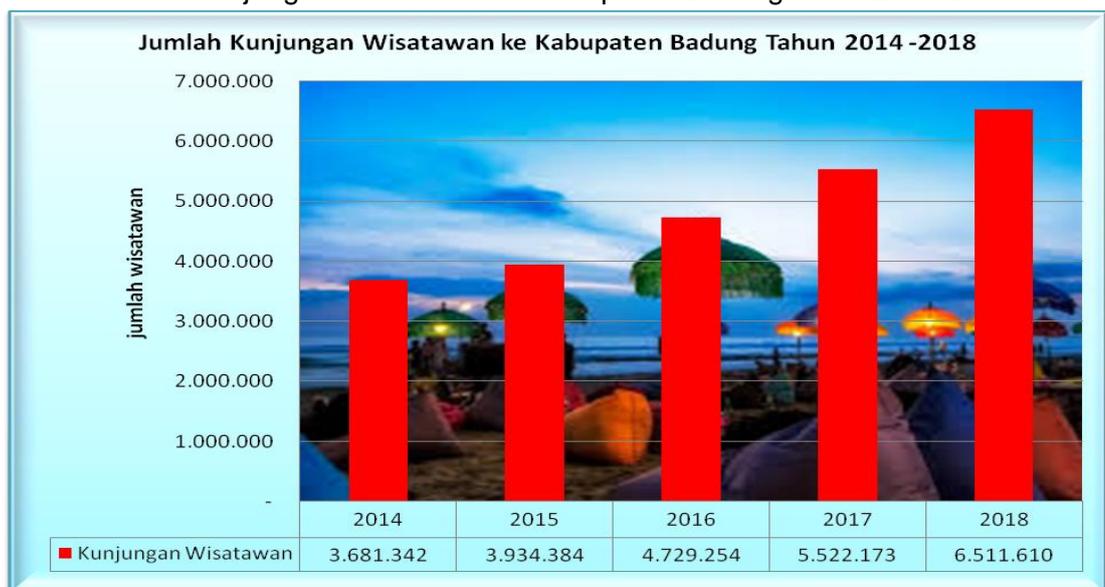
Perkembangan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Badung tahun 2017 sebesar 6,11% dan lebih tinggi bila dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali dan Nasional. Pertumbuhan ekonomi yang baik karena kontribusi sektor pariwisata terutama berkaitan dengan penanaman modal di bidang hotel, restoran dan pembangunan infrastruktur.



### Kepariwisataan

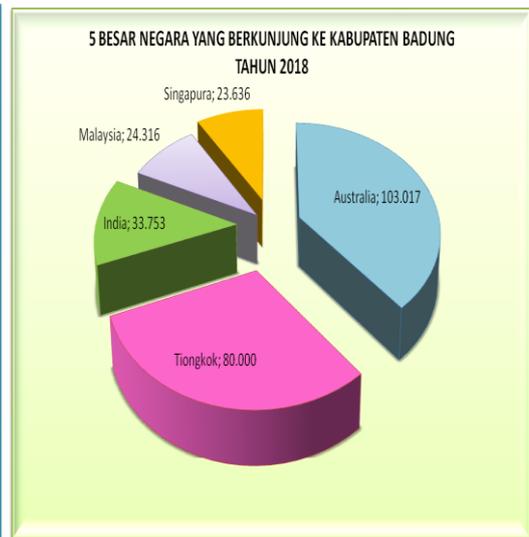
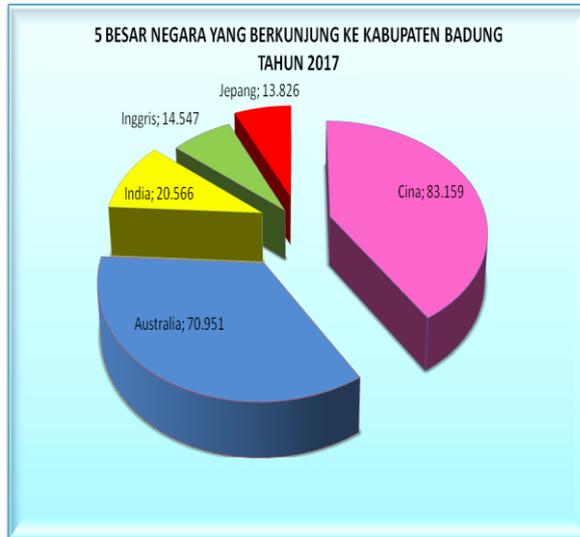
Grafik 1.4

Jumlah Kunjungan Wisatawan ke Kabupaten Badung Tahun 2014-2018





Kabupaten Badung merupakan pusat pengembangan dan tujuan wisata di Bali, karena memiliki banyak kawasan wisata yang sudah terkenal di mancanegara. Kabupaten Badung memiliki 36 Daya Tarik Wisata yang dikunjungi ribuan wisatawan setiap tahunnya. Dari grafik berikut terlihat distribusi asal wisatawan dari mancanegara yang berkunjung ke Kabupaten Badung sebagai berikut:



Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan berdampak pada berkembangnya berbagai usaha penunjang kepariwisataan yang memberikan kontribusi terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Perkembangan usaha sarana pariwisata di Kabupaten Badung seperti grafik berikut :

Grafik 1.5

Perkembangan Usaha Sarana Pariwisata di Kabupaten Badung Tahun 2015-2018

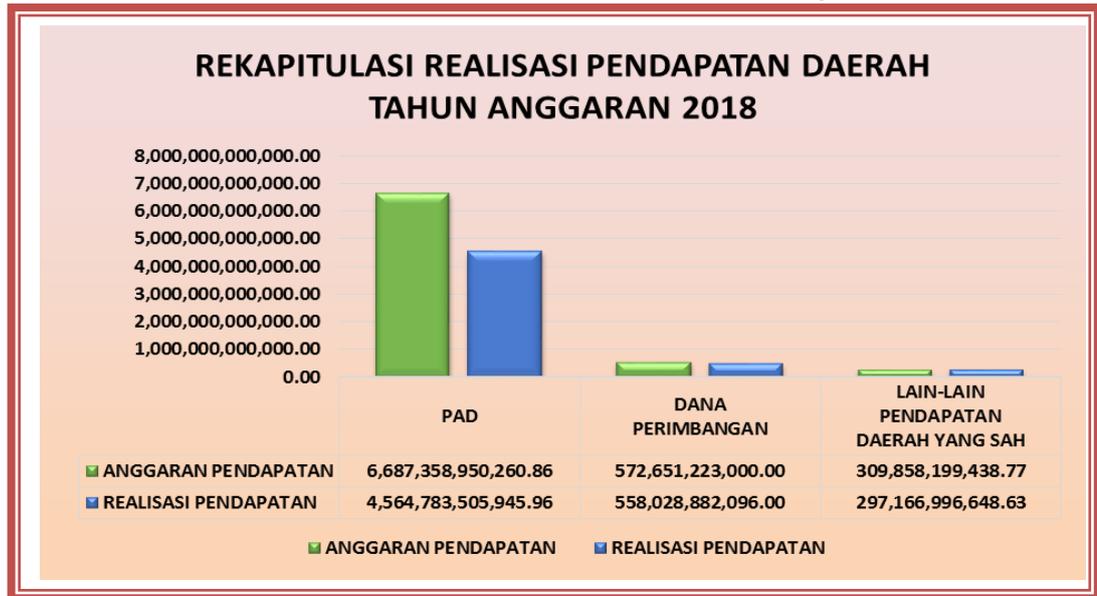




**- Pendapatan Asli Daerah :**

Sektor pariwisata telah menjadi andalan dalam menggerakkan APBD melalui Pendapatan Asli Daerah dari sektor pajak hotel dan restoran serta menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi. Sebagai gambaran pendapatan daerah seperti grafik berikut:

Grafik 1.6  
Realisasi Pendapatan Daerah di Kabupaten Badung Tahun 2018



Grafik 1.7  
Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Badung Tahun 2013-2018



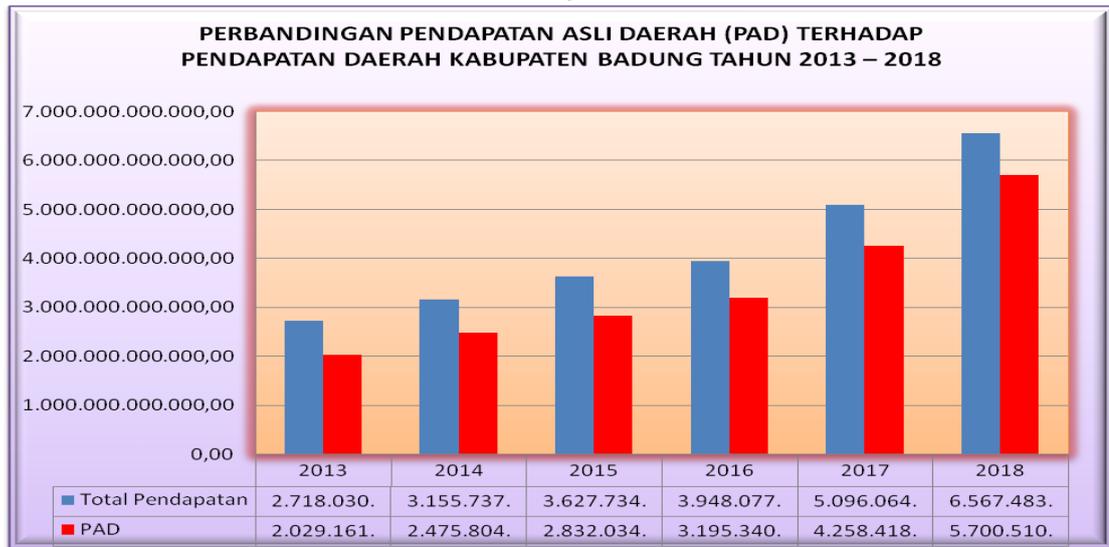
Data : Bapenda Kab.Badung,2018





Pendapatan asli daerah yang didukung dari pajak hotel dan restoran memberikan kontribusi yang paling besar bagi pendapatan daerah sehingga Kabupaten Badung memiliki ruang fiskal yang sangat baik. Sebagai gambaran kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah seperti grafik berikut:

Grafik 1.8  
Perbandingan Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Badung Tahun 2013-2018



Sumber: BPKAD Kab. Badung 2018

## 1.2 ISU STRATEGIS

Dalam rangka untuk menjaga kesinambungan pembangunan dan pengembangan sektor kepariwisataan secara umum ada beberapa isu strategis yang perlu mendapat perhatian :

- 1** PERSAINGAN DIBIDANG KEPARIWISATAAN
- 2** PENANGANAN SAMPAH DAN PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PARIWISATA YANG BERKELANJUTAN
- 3** PENINGKATAN INFRASTRUKTUR PENUNJANG PARIWISATA
- 4** PENGENDALIAN PENDUDUK
- 5** KEMACETAN LALU LINTAS
- 6** PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
- 7** PEMERATAAN PEMBANGUNAN ANTAR WILAYAH





- **Kelembagaan Perangkat Daerah**



Sebagai amanat dari Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah khususnya berkenaan dengan pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan yang menjadi kewenangan kabupaten, serta berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Pemerintah Kabupaten Badung telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang mencerminkan kapasitas daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan wajib dan pilihan sesuai potensi daerah.





Berdasarkan peraturan daerah Ini dilakukan penataan kelembagaan perangkat daerah dengan mengacu prinsip efektivitas dan efisiensi serta Perangkat Daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran. Dibandingkan tahun 2016, jumlah Perangkat Daerah mengalami pengurangan dari 53 menjadi 38 Perangkat Daerah yang terdiri dari 2 sekretariat, 1 Inspektorat, 7 badan, 21 Dinas, 6 kecamatan dan 1 (satu) RSUD.

### 1.3 ARAH KEBIJAKAN

#### Membangun Pariwisata Berbasis Budaya

Wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Badung dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan karena keindahan alam yang mempesona, kehidupan masyarakatnya yang terkenal ramah dan aktivitas adat, seni, budaya dan ritual keagamaan yang unik serta suasana pedesaan dan panorama pantai berpasir putih yang menjadi ikon pariwisata Bali di mata wisatawan.

Objek Pariwisata di Kabupaten Badung



WISATA BUDAYA ULUWATU



WISATA GAJAH DI CARANGSARI



PURA PUCAK SARI, SANGEH



PANTAI MELASTI, UNGASAN





Pemerintah Kabupaten Badung mengembangkan industri pariwisata yang berbasis budaya didukung dengan potensi wilayah serta keterlibatan masyarakat untuk mewujudkan kepariwisataan yang berkelanjutan. Dalam konsep pembangunan kepariwisataan Badung, ada 4 pilar yang dijadikan panduan meliputi:

1. Destinasi, mengembangkan kawasan Badung Utara sebagai desa wisata yang berbasis agrowisata yang berkualitas dan mengembangkan kawasan Nusa Dua sebagai destinasi MICE internasional didukung daya tarik wisata pantai dan bahari;
2. Industri, mengembangkan industri pariwisata yang berdaya saing global melalui peningkatan kualitas produk, layanan dan kepedulian terhadap lingkungan hidup, sosial dan budaya.
3. Mewujudkan investasi dibidang industri pariwisata secara selektif dengan prioritas pengembangan usaha kecil menengah dengan mempertimbangkan daya dukung kawasan.
4. Pemasaran, mengembangkan pemasaran yang inovatif untuk meningkatkan jumlah kunjungan, lama tinggal dan pengeluaran wisatawan sehingga memberikan manfaat ekonomi kepada pariwisata, masyarakat dan pemerintah;
4. Kelembagaan, mewujudkan kawasan pariwisata yang terintegrasi dan berbasis masyarakat yang didukung oleh sumber daya manusia yang profesional;

Sektor kepariwisataan di Kabupaten Badung telah diakui sebagai lokomotif pembangunan ekonomi yang menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor pariwisata dianggap sebagai pemantik untuk mencapai pembangunan berkelanjutan dengan manfaat yang signifikan dibidang ekonomi, sosial budaya dan lingkungan serta memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi masyarakat lokal untuk meningkatkan kesejahteraan.

Membangun kepariwisataan agar dapat berkelanjutan sangat ditentukan oleh pandangan kedepan dan kebijakan (*forward looking Policy*) dan filosofi manajemen yang mampu membangun hubungan harmonis antara masyarakat lokal, sektor usaha swasta dan pemerintah. Keharmonisan tersebut berkaitan dengan praktek-praktek pembangunan guna meningkatkan manfaat ekonomi yang selaras dengan perlindungan terhadap alam, sosial budaya sehingga kehidupan masyarakat lokal maupun destinasi dapat meningkat kualitasnya.





*Pembangunan Pariwisata Berbasis Budaya (Taman Gemitir Marigold, Badung)*

Pembangunan kepariwisataan membutuhkan dukungan dari seluruh *stakeholders* serta kepemimpinan politik yang kuat untuk memastikan adanya partisipasi yang luas dalam membangun konsensus bersama secara terus menerus dan membutuhkan monitoring terhadap dampak yang ditimbulkannya. Secara filosofis pembangunan kepariwisataan membutuhkan perencanaan induk yang mempunyai peranan yang strategis dalam menjamin keberlanjutan penyelenggaraan kepariwisataan.

Paradigma baru kepariwisataan di Kabupaten Badung yang berbasis pada keserasian antara manfaat ekonomi dengan keseimbangan antara lingkungan sosial dan budaya. Paradigma baru memandang pariwisata sebagai salah satu sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi dengan tidak mengorbankan aspek lainnya yang bersifat eksploitatif, namun dilakukan pendekatan yang komprehensif dari hulu sampai ke hilir yaitu fase berkembang dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat maupun pemerintah sejalan dengan konsep pembangunan berlandaskan *Tri Hita Karana*. *Tri hita karana* merupakan konsep untuk melestarikan keaneka ragaman budaya dan lingkungan di tengah hantaman globalisasi dan homogenisasi. Pada dasarnya hakikat ajaran *tri hita karana* menekankan tiga hubungan manusia dalam kehidupan di dunia ini atau tiga penyebab terciptanya kebahagiaan yaitu hubungan manusia dengan sesama manusia, hubungan manusia dengan alam sekitar, dan hubungan manusia dengan Tuhan.

## **B. Kebijakan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup**

### **1. Latar Belakang**

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan





kesehatan. Amanat UUD 1945 tersebut jelas memandang bahwa kebutuhan mendapatkan lingkungan yang sehat adalah salah satu hak asasi. Negara berkewajiban memberi perlindungan dan jaminan lingkungan sehat, oleh sebab itu negara harus memiliki otoritas kuat dalam mengelola dan melindungi lingkungan hidup. Dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa pengelolaan lingkungan hidup telah dilimpahkan kepada pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Oleh karena itu, pemerintahan daerah ini berkewajiban menyediakan data/informasi yang valid secara berkala dan tersosialisasi dengan baik. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta PPNSB dan Program Badung *Pro environment* (Pelestarian Lingkungan)

## 2. Permasalahan

IKLH Merupakan Indeks untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian pelaksanaan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan dikaitkan dengan sasaran strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, khususnya berkaitan dengan kualitas udara, air dan tutupan hutan. Secara lebih spesifik, Tantangan yang dihadapi untuk dalam menindaklanjuti IKLH ini adalah :

1. Peningkatan Indeks Pencemaran Air (IPA), Indeks Pencemaran Udara (IPU), dan Indeks Tutupan Hutan (ITH)
2. Proyeksi timbulan sampah yang cenderung meningkat
3. Badung sebagai destinasi wisata dunia yang harus selalu bersih indah dan ramah lingkungan



### 3. Kebijakan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup



Kebijakan peningkatan kualitas lingkungan hidup diarahkan untuk mendukung pencapaian Visi Kabupaten Badung yaitu **“Memantapkan Arah Pembangunan Badung Berlandaskan Tri Hita Karana Menuju Masyarakat yang Maju, Damai dan Sejahtera”**. Selanjutnya dijabarkan dalam misi ke-7 yaitu meningkatkan perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup dan penanggulangan bencana.

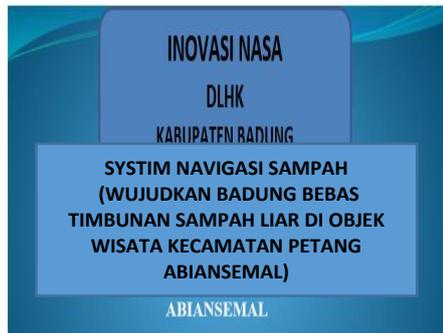
Dan 6 prinsip dasar berkelanjutan pembangunan di Kabupaten Badung, salah satunya *Pro environment* (Pelestarian Lingkungan). Untuk menunjukkan Badung yang Pro terhadap Pelestarian Lingkungan maka dalam RPJMD dan RENSTRA DLHK ditetapkan dengan IKU ke-14 yaitu Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dengan target sebesar 69.40 untuk Tahun 2021. Implementasi untuk komitmen terhadap pelestarian lingkungan dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Badung Nomor 47 Tahun 2018 Tentang pengurangan penggunaan kantong plastik dan Peraturan Bupati Badung Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan *Reduce, Reuse, Recycle* Melalui Bank Sampah.

Salah satu masalah yang dihadapi adalah serbuan sampah pantai yang apabila tidak ditangani dengan baik akan dapat berdampak pada menurunnya kualitas lingkungan dan berdampak pada citra kepariwisataan.





#### 4. Program Inovasi Lingkungan Hidup



Manfaat Inovasi ini adalah :

Sistem Navigasi Sampah (Nasa) Wujudkan Badung Bebas Sampah Liar Di Objek Wisata Kecamatan Petang Dan Abiansemal Untuk memudahkan penanganan Kebersihan yang dihadapi dalam, pemantauan dan penanganan timbunan sampah liar (*hotspot*) di tempat wisata dengan membuat sistem penanganan yang efektif dan efisien. Artinya sistem rangkaian Penanganan dengan masyarakat dan pengelola wisata yang ada di kecamatan Petang dan Abiansemal



Manfaat dari inovasi ini adalah :

berdasarkan Pro Lingkungan (*pro environment*) dan inovasi ini bermanfaat untuk meningkatkan mutu layanan dan transparan maka masyarakat akan merasa nyaman untuk mengurus ijin lingkungan. Dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap lingkungan, maka ketersediaan pencemaran air dapat dibatasi





Manfaat Inovasi ini adalah :

- Memudahkan dalam Pemantauan kegiatan dan/atau usaha yang memiliki dokumen lingkungan di Kabupaten Badung
- Memudahkan identifikasi, penginformasian, serta up-dating data kegiatan yang telah memiliki dokumen lingkungan di Kabupaten Badung;
- Memudahkan pelayanan informasi dokumen lingkungan yang berorientasi geografi di Kabupaten Badung;



Manfaat Inovasi ini adalah :

- Meningkatnya penggunaan tempat canang seperti bokor/keben mini dan paper bag/tas kain dan sejenisnya sebagai pengganti kantong plastik, dapat memberikan efek manfaat kepada UMKM (usaha mikro kecil dan menengah) dengan melibatkan dalam pembuatan/berkreatifitas untuk penyediaan barang-barang tersebut.
- Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang ditentukan berdasarkan nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.
- Membantu meringankan pekerjaan penanganan kebersihan pengelola/petugas kebersihan/panitia pada kawasan Anti Kantong Plastik. Karena sampah yang timbul telah terpilah dan dimasukkan ke dalam tempat sampah masing-masing. (sampah plastik di luar kawasan sedangkan di dalam kawasan hanya sampah organik)
- Menanamkan kembali nilai-nilai Tri Hita Karana



Manfaat Inovasi ini adalah :

- Mengurangi sampah plastik di Kabupaten Badung
- Membantu pemilhan sampah dengan baik
- Bisa menambah nilai penjualan bagi masyarakat badung yang ingin menjual sampah di bank sampah masing masing wilayah
- Agar kegiatan 3R melalui bank sampah dilaksanakan terhadap sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga dan bertujuan memberikan pedoman terhadap pelaksana kegiatan 3R melalui Bank sampah





#### 1.4 Ruang Lingkup

Laporan akuntabilitas kinerja Bupati Badung tahun 2018 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- Ringkasan Eksekutif** Menyajikan secara ringkas rencana dan capaian kinerja Kabupaten Badung Tahun 2018.
- Bab I Pendahuluan** Menyajikan latar belakang, data umum yang menyangkut gambaran Kabupaten Badung, aspek strategis serta arah kebijakan pariwisata dan lingkungan hidup.
- Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja** Menyajikan mengenai RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung 2016-2021, rencana kinerja tahunan dan perjanjian kinerja tahun 2018.
- Bab III Akuntabilitas Kinerja** Menyajikan capaian kinerja tahun 2018 yang memuat hasil pengukuran kinerja dengan penjelasan keberhasilan dan permasalahan dalam pencapaian kinerja serta akuntabilitas keuangan
- Bab IV Penutup** Menyajikan kesimpulan atas capaian kinerja tahun 2018 dan saran perbaikan atas permasalahan dalam pencapaian kinerja.



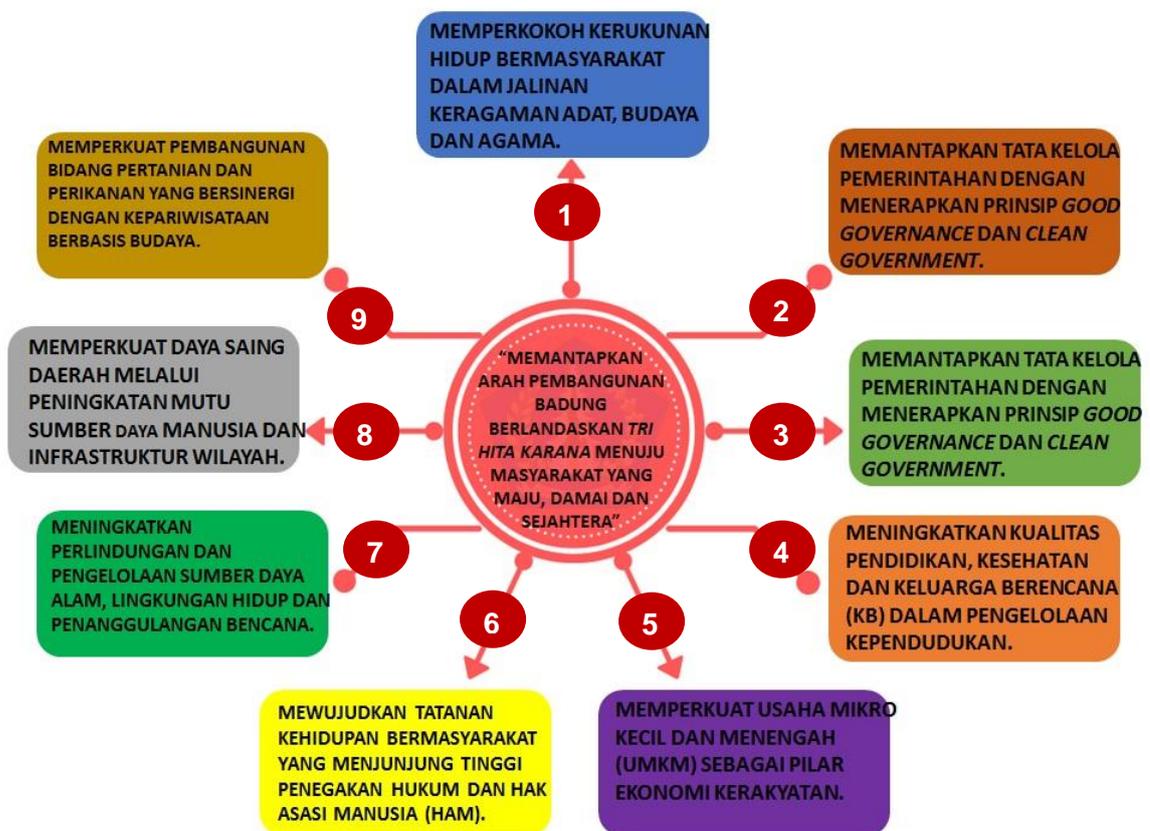


# BAB II PERENCANAAN KINERJA

**D**alam rangka mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang baik, efektif dan efisien serta akuntabel, Pemerintah Daerah Kabupaten Badung dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, berpedoman pada dokumen perencanaan antara lain :

## 2.1 RPJMD SEMESTA BERENCANA 2016-2021

RPJMD Semesta Berencana 2016-2021 ditujukan untuk melanjutkan kembali kemajuan pembangunan daerah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta meningkatkan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, untuk dapat menjawab berbagai tantangan pembangunan yang dihadapi Kabupaten Badung dalam lima Tahun kedepan telah dirumuskan Visi Kabupaten Badung sebagai berikut :



Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD semesta berencana 2016-2021, telah ditetapkan 5 program prioritas daerah sebagai penjabaran Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana (PPNSB) sebagai berikut:



Dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, efektif, efisien serta membangun akuntabilitas kinerja yang semakin baik, maka Tujuan, Sasaran dan Indikator kinerja utama (IKU) dalam RPJMD Semesta Berencana 2016-2021 telah dirumuskan secara terukur dan akuntabel. Untuk pencapaian sasaran strategis pembangunan Kabupaten Badung yang lebih fokus maka masing-masing indikator dibuatkan *cross cutting program*, seperti contoh berikut :

Grafik 2.1.

Cross Cutting Program Terhadap Sasaran RPJMD Kabupaten Badung 2016-2021

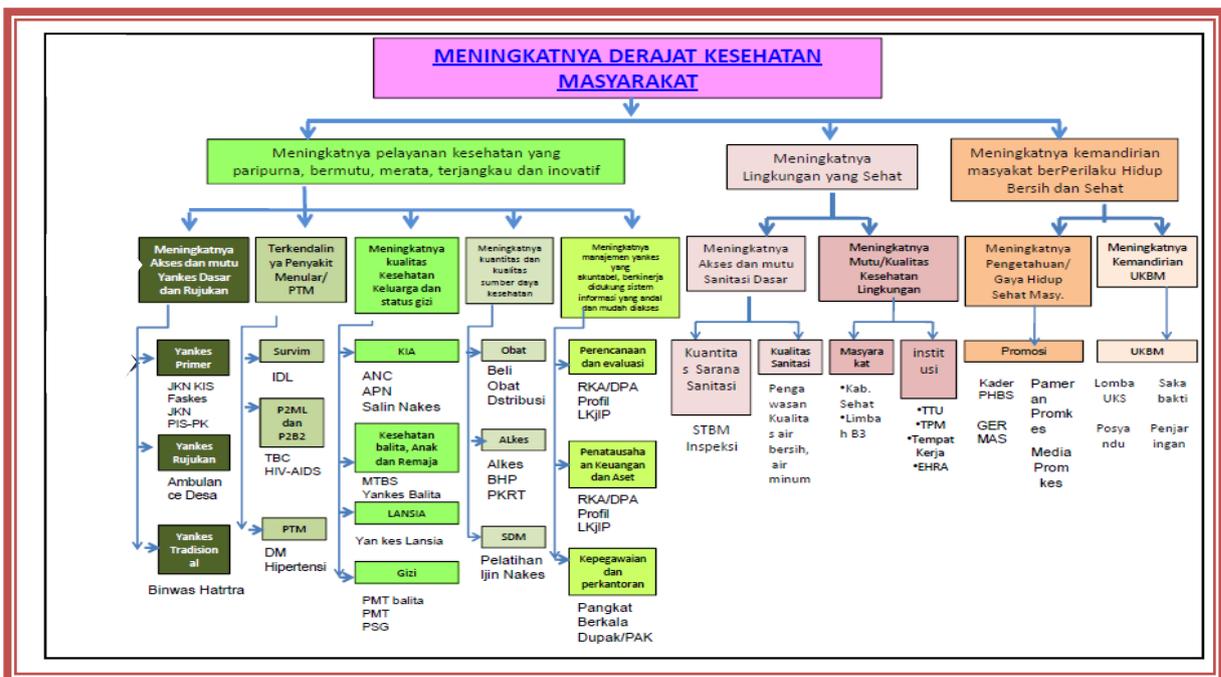
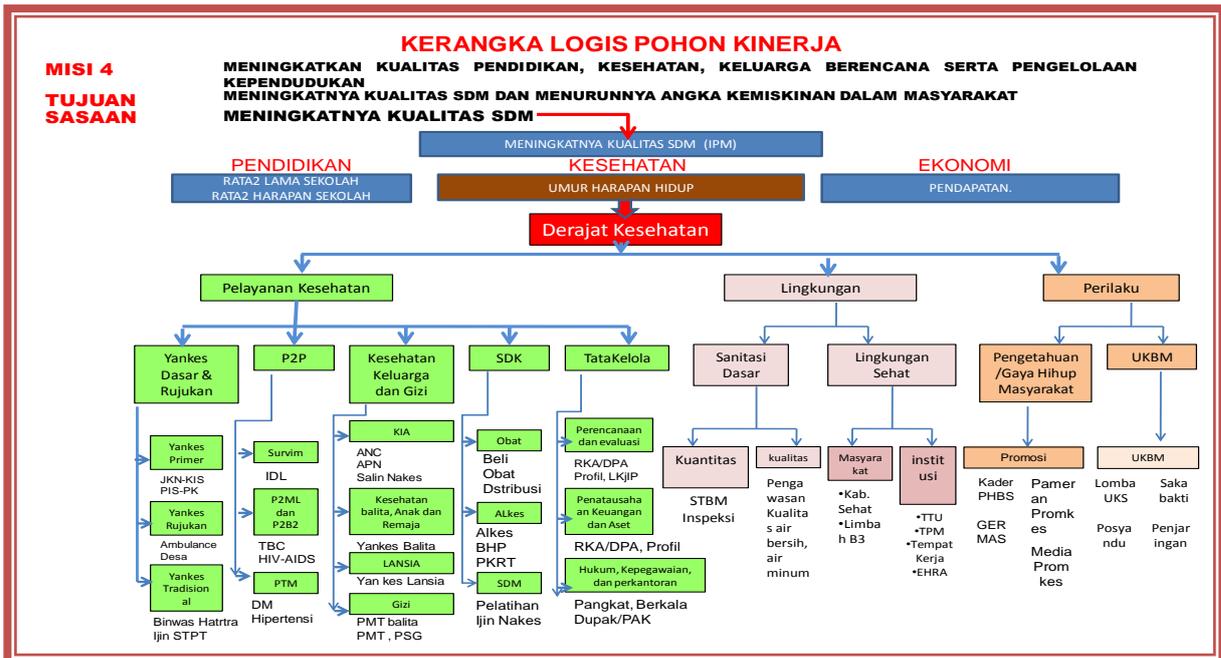
CROSS CUTTING PROGRAM TERHADAP SASARAN RPJMD					
RPJMD	Meningkatnya Kualitas SDM Indeks Pembangunan Manusia Target : 80,8				
Renstra SKPD	Meningkatnya Kualitas Kesmas	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Menurunnya Pengangguran	Menurunnya Penduduk Miskin	
	Umur Harapan Hidup Target : 74,35 Tahun	Rata2 Lama Sekolah Target 9,44 Tahun	Harapan Lama Sekolah Target : 13,45 Tahun	% Pengangguran Terbuka Target : 0,48%	% Penduduk Miskin Target: 2,4%
Program	e-budgeting				
	1. Peningkatan Kesehatan Ibu Melahirkan Dan Anak 2. Pelayanan kes. lansia % Pelayanan Kesehatan Anak Balita, lansia Target : 100%	Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 tahun APK SD, SMP Target: 100%	Pendidikan Non Formal % Partisipasi Masy. Mengikuti Paket C Target: 60%	Peningkatan Kesempatan Kerja % calon wirausahawan dapat pelatihan Target: 50%	Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial % KUBE mendapat pendampingan Target: 100%
Kegiatan	1. Yankes Bayi 2. Yankes Balita dan anak 3. Yankes lansia	1. Pengadaan sarana belajar 2. Pembangunan /rehab, gedung	1. Pelaksanaan Klp Paket c 2. Pasraman duta dharma yowana	1. Pelatihan Pembuatan Virgin Coconut Oil 2. Membuat Makanan Vegetarian	1. Pendampingan KUBE Fakir Miskin 2. Pengendalian Bantuan UEP
SKPD	Dinas Kesehatan	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan	Dinas Prinnaker	Dinas Sosial
Anggaran	Rp.1.550.000.000	Rp. 184.165,789.500	Rp.3.000.000.000	Rp.150.000.000	Rp.31.000.000.000





Untuk keberhasilan pencapaian sasaran strategis yang diukur dengan Indikator kinerja Utama maka setiap sasaran RPJMD dijabarkan kedalam Rencana Strategis Perangkat Daerah dengan pendekatan pohon kinerja. Dalam penyusunan pohon kinerja masing-masing perangkat daerah, membuat pohon kinerja sesuai sasaran strategis RPJMD yang diampu sesuai tabel 5.2.

Grafik 2.2.  
 Kerangka Logis Penyusunan Pohon Kinerja  
 terhadap Sasaran Strategis RPJMD Kabupaten Badung 2016-2021





Untuk mencapai target indikator sasaran pembangunan sesuai perencanaan RPJMD semesta berencana, dengan mempertimbangkan permasalahan pokok daerah (isu strategis) maka tema pembangunan tahun 2018 “**Memacu Investasi dan Memantapkan Infrastruktur untuk Percepatan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas**”



*Pelaksanaan musrenbang kecamatan merupakan salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam sistem perencanaan pembangunan daerah*

Dalam rangka mewujudkan sasaran startegis RPJMD Semesta Berencana, meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas, maka Pemerintah Kabupaten Badung telah merencanakan pembangunan infrastruktur yang pada tahun 2018 baru dalam tarap perencanaan (studi kelayakan) antara lain :

1. Studi Kelayakan Jalan Lingkar Selatan Kabupaten Badung



2. Studi kelayakan Pembangunan Stadion Mengwi yang bertaraf Internasional



3. Studi kelayakan Pembangunan Kereta Gantung atau 'cable car' di wilayah Pelaga, Badung Utara





## 2.2 . Perjanjian Kinerja



*Penandatanganan Perjanjian Kinerja oleh Pejabat Struktural dan Pakta Integritas oleh seluruh pegawai di Kabupaten Badung*

Perjanjian Kinerja merupakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus perjanjian kinerja adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur; sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; dan sebagai dasar pemberian *reward* dan *punishment*.

Perjanjian kinerja tahun 2018 disusun mengacu pada Tujuan, Sasaran, indikator dan Target Kinerja sesuai RPJMD Semesta Berencana tahun 2016 – 2021, dan telah ditetapkan pada tanggal 2 Januari 2018 sebagai berikut :





Tabel 2.1  
Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran dan Perjanjian Kinerja Tahun 2018

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
1	2	3	4	5.
Visi :				
<b>“MEMANTAPKAN ARAH PEMBANGUNAN BADUNG BERLANDASKAN TRI HITA KARANA MENUJU MASYARAKAT YANG MAJU, DAMAI DAN SEJAHTERA”</b>				
<b>Misi ke-satu:</b>				
<b>Memperkokoh kerukunan hidup bermasyarakat dalam jalinan keragaman adat, budaya dan agama</b>				
1.	Terwujudnya kerukunan hidup beragama serta penguatan kehidupan adat dan budaya	1. Meningkatnya toleransi hidup beragama	1. Indek kerukunan umat beragama	82,00
		2. Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	2. Derajat partisipasi masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya	71%
<b>Misi 2 : Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi</b>				
2.	Terwujudnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	3. Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	3. Indeks kepuasan masyarakat	79
<b>Misi 3 : Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government</b>				
3.	Terwujudnya pemerintahan daerah yang bersih, transparan, akuntabel dan profesional	4. Meningkatnya akuntabilitas kinerja kabupaten	4. Katagori akuntabilitas kinerja kabupaten	76,80 (BB)
		5. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah	5. Opini BPK	WTP
		6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	6. Katagori penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi (PMPRB)	BB
<b>Misi 4 : Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, Keluarga Berencana (KB) dalam pengelolaan kependudukan</b>				
4.	Meningkatnya kualitas SDM dan menurunnya angka kemiskinan dalam	7. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	7. Indeks pembangunan manusia	80,8





NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
1	2	3	4	5.
	masyarakat	8. Meningkatnya tingkat kebahagiaan masyarakat	8. Indek Kebahagiaan	71,5
		9. Menurunnya angka kemiskinan	9. Persentase penduduk miskin	2,25-2,15%
<b>Misi 5 : Memperkuat Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai pilar ekonomi kerakyatan</b>				
5.	Menguatnya UMKM dalam menunjang perekonomian kerakyatan	10. Meningkatnya kontribusi sektor UMKM terhadap PDRB	10. Persentase kontribusi sektor UMKM terhadap PDRB	7,76%
<b>Misi 6 : Mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang menjunjung tinggi penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM)</b>				
6.	Terwujudnya kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan Perda dan Perkada	11. Meningkatnya Pencegahan Pelanggaran Perda dan Perkada	11. Persentase pencegahan pelanggaran Perda dan Perkada	85%
		12. Meningkatnya penegakan Perda dan Perkada	12. Persentase penegakan Perda dan Perkada	80%
7.	Terwujudnya Pengarusutamaan Gender	13. Meningkatnya Pengarusutamaan gender	13. Indeks pembangunan gender (PG)	75,74
<b>Misi 7 : Meningkatkan perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup dan Penanggulangan Bencana</b>				
8.	Terwujudnya pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara berkelanjutan	14. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	14. Indek kualitas lingkungan hidup	66.70
			15. Indeks pertanian	195
9.	Terwujudnya Penanggulangan bencana secara terpadu	15. Meningkatnya kapasitas dalam penanggulangan bencana	16. Tingkat kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana	Level 4
<b>Misi 8 : Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah</b>				
10.	Terwujudnya tenaga kerja yang berdaya saing	16. Meningkatnya daya saing tenaga kerja	17. Tingkat pengangguran terbuka	0.330%
11.	Terwujudnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	17. Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	18. Persentase infrastruktur dalam kondisi mantap	98.00%





NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
1	2	3	4	5.
<b>Misi 9 : Memperkuat pembangunan bidang pertanian dan perikanan yang bersinergi dengan kepariwisataan berbasis budaya</b>				
12.	Meningkatnya ketersediaan pangan	18. Meningkatnya produksi pangan nabati dan hewani	19. Skor pola pangan harapan	94.00
13.	Meningkatnya daya saing kepariwisataan bersinergi dengan sektor Pertanian dan Perikanan	19. Meningkatnya daya Tarik wisata yang berdaya saing	20. Persentase daya Tarik wisata yang berdaya saing	66%
		20. Meningkatnya kontribusi sector pariwisata terhadap PDRB	21. Persentase kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	28.36



Pembinaan sistem akuntabilitas kinerja bagi perangkat daerah di Kabupaten Badung dalam rangka penyelarasan dan pencapaian target kinerja oleh Tim Peningkatan Kinerja dan SAKIP, dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Badung, I Wayan Adi Arnawa





# BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

## 3.1 POTRET PENGUKURAN DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2018



*Badung Comamand Center sebagai pusat informasi data elektronik*

Dalam upaya mewujudkan Visi dan Misi Bupati yang efektif serta peningkatan Akuntabilitas Kinerja, telah dilakukan penyesuaian terhadap tujuan, sasaran, indikator kinerja utama dan target kinerja untuk mengarahkan agar program pembangunan daerah dapat difokuskan untuk mencapai sasaran strategis secara efisien serta semakin memacu keberhasilan pembangunan di Kabupaten Badung yang dilandasi dengan tata kelola pemerintahan yang semakin transparan dan akuntabel.

RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung tahun 2016-2021 mencakup 9 misi yang dijabarkan menjadi 13 tujuan, 20 sasaran dan 21 indikator kinerja utama (IKU). Jika pada tahun 2017 terdapat 2 (Dua) indikator kinerja utama (IKU) yang belum dapat dilaporkan capaian kinerjanya yaitu Indeks Kerukunan Umat Beragama dan Indeks Kebahagiaan, maka mulai tahun 2018 sudah dilakukan pengukuran bekerjasama dengan





Kementerian Agama dan BPS, sehingga seluruh sasaran strategis sudah dapat dilaporkan capaian kinerjanya secara transparan dan akuntabel.



*Mal Pelayanan Publik (MPP) untuk mempermudah pelayanan perijinan dan non perijinan*



*Pembangunan Infrastruktur dalam kondisi mantap untuk menunjang kepariwisataan*

Secara umum capaian indikator kinerja sasaran sesuai RPJMD 2016-2021 memiliki *progress* yang semakin baik dibandingkan tahun sebelumnya namun tidak bisa dipungkiri ada capaian kinerja yang tingkat kemajuannya perlu lebih dipacu lagi karena memang mengalami dinamika permasalahan yang cukup tinggi.

Untuk mengukur tingkat keberhasilan dalam pencapaian sasaran strategis yang diukur dengan indikator kinerja utama (IKU) maka pada tahun 2018 ada beberapa indikator





yang capaiannya belum dirilis secara resmi oleh BPS dan BPK RI dan kementerian PAN-RB. Untuk jelasnya hasil pengukuran capaian kinerja sasaran strategis Kabupaten Badung tahun 2018 sebagai berikut:

Tabel 3.1  
Hasil Pengukuran Kinerja Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2018

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	2		3	4	5	6	7
1.	Meningkatnya toleransi hidup beragama	1.	Indeks kerukunan umat beragama	Nilai	82	78	95,12
2.	Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	2.	Derajat partisipasi masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya	%	71	71	100
3.	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	3.	Indeks kepuasan masyarakat	Nilai	79	79,73	100,92
4.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	4.	Kategori akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Nilai	(BB) 76,80	(BB) 77,85	100
5.	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah	5.	Opini BPK	Nilai	WTP	WTP (Prediksi)	100
6.	Terwujudnya Pemerintahan bersih dan bebas KKN	6.	Kategori Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	Nilai	BB (72,15)	BB (Prediksi)	100
7.	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	7.	Indeks Pembangunan Manusia	Nilai	80,8	80.54	99,68
8.	Meningkatnya tingkat kebahagiaan masyarakat	8.	Indek Kebahagiaan	Nilai	71,5	75,47	105,55
9.	Menurunnya angka kemiskinan	9.	Persentase penduduk miskin	%	2,25-2,15	1.98	110.00
10.	Meningkatnya kontribusi sektor UMKM terhadap PDRB	10.	Persentase kontribusi sektor UMKM terhadap PDRB	%	7,76	7,76 (Prediksi)	100





NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Target	Reali sasi	Capaian Kinerja
1	2		3	4	5	6	7
11.	Meningkatnya pencegahan pelanggaran Perda dan Perkada	11.	Persentase pencegahan pelanggaran Perda & Perkada	%	85	82	96,47
12.	Meningkatnya penegakan Perda dan Perkada	12.	Persentase penegakan Perda dan Perkada	%	80	95	118,75
13.	Meningkatnya pengarasutamaan gender	13.	Indeks pembangunan gender (IPG)	Nilai	75,74	94,39	124,62
14.	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	14.	Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH)	Nilai	66,7	69,18	103,72
		15.	Indeks Pertanaman	Nilai	195	231,58	118,76
15.	Meningkatnya kapasitas dalam penanggulangan bencana	16.	Tingkat kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana	Nilai	Level 4	Level 4	100
16.	Meningkatnya daya saing tenaga kerja	17.	Tingkat Pengangguran terbuka	%	0,33	0,44	66,67
17.	Meningkatnya intrastruktur wilayah yang berkualitas	18.	Persentase infrastruktur dalam kondisi mantap	%	98	94,71	96,64
18.	Meningkatnya produksi pangan nabati dan hewani	19.	Skor Pola Pangan Harapan	Nilai	94	95,94	102,06
19.	Meningkatnya daya Tarik wisata yang berdaya saing	20.	Persentase daya Tarik wisata yang berdaya saing	%	66	66	100
20.	Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	21.	Persentase kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	%	28,36	28,88 (Prediksi)	101,83





### 3.2 ANALISIS CAPAIAN KINERJA

#### Sasaran 1 Meningkatnya Toleransi Hidup Beragama

Bagi Bangsa Indonesia kerukunan antar umat beragama sangatlah penting, karena Negara kita ditakdirkan sebagai bangsa yang hidup dalam pluralitas dan keberagaman suku, agama, bahasa, budaya dan adat istiadat. Terlebih lagi bagi Kabupaten Badung yang mengandalkan sektor kepariwisataan suasana aman, damai dan sikap toleransi kehidupan beragama perlu terus dijaga, oleh karena itu sasaran ini menjadi sangat penting artinya.

Sasaran meningkatnya toleransi hidup beragama dengan indikator Indeks Kerukunan Umat Beragama tahun 2018 ditargetkan 82. Berdasarkan hasil penelitian Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, Indeks Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Badung tahun 2018, signifikan pada angka 78 sehingga capaian kerjanya sebesar 95,12%. Hasil ini menunjukkan kategori kerukunan tinggi diatas rata-rata Nasional (72,27). Namun apabila dibandingkan dengan target 2018 capaian kinerja sasaran Meningkatnya Kerukunan Umat Beragama masih belum memenuhi target, hal ini disebabkan karena sasaran ini merupakan sasaran baru dalam RPJMD, maka pada saat penyusunan target kinerja mengacu pada indeks kerukunan umat beragama Provinsi Bali. sedangkan Indeks Kerukunan Umat Beragama Provinsi Bali tahun 2017 sebesar 81,5. Tingkat kerukunan umat beragama untuk Provinsi Bali pada posisi dua teratas. Adapun tiga daerah dengan kerukunan agama tertinggi di Indonesia adalah Nusa Tenggara Timur (83,3%), Bali (81,56%) dan Maluku (81,3%).

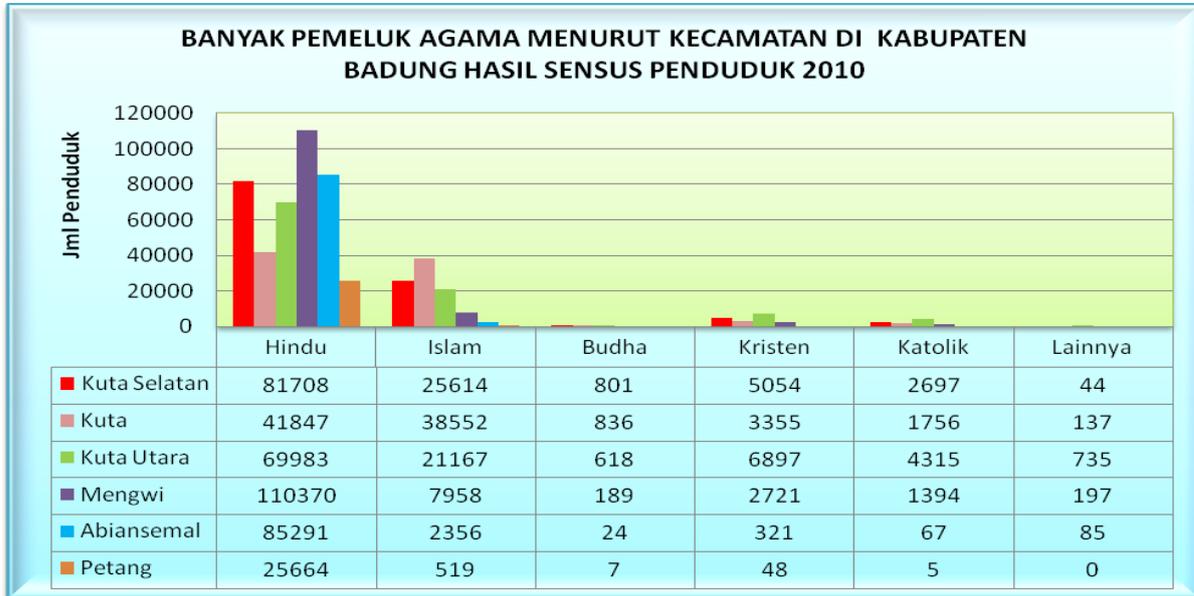
Sebagai pembandingan Indeks Kerukunan Umat beragama di Indonesia, berdasarkan hasil survey yang dilakukan oleh Puslitbang Kementerian Agama diperoleh informasi bahwa indeks kerukunan umat beragama tahun 2017 sebesar 72,27, tahun 2016 berada diangka 75.47, angka tersebut naik 0.11 % ketimbang Tahun 2015, yakni sebesar 75.36.

Grafik 3.1

Perbandingan Indeks Kerukunan Umat Beragama tahun 2017-2018



Grafik 3.2  
Jumlah Pemeluk Agama Menurut Kecamatan di Kabupaten Badung  
Hasil Sensus Penduduk Tahun 2010



*Puja Mandala tempat ibadah dalam satu kawasan, Cermin Kerukunan Umat Beragama di Kabupaten Badung*

Walaupun terdiri dari berbagai pemeluk agama, toleransi hidup beragama di Kabupaten Badung tetap terjaga dengan baik, tidak ada gesekan, tidak ada intimidasi





karena Pemkab Badung sangat mengayomi seluruh umat bahkan Pusat Pemerintahan Mangupraja Mandala terbuka bagi semua umat beragama yang ada di Badung untuk melakukan berbagai aktivitas keagamaan. Serta memberikan perhatian terhadap operasional Forum Komunikasi Antar Umat Beragama (FKUB), pemberian bantuan hibah pembangunan tempat ibadah, serta silaturahmi berupa kunjungan ke masing-masing tempat ibadah.

Untuk meningkatkan capaian indikator kerukunan antar umat beragama maka Pemerintah Kabupaten Badung perlu lebih meningkatkan 3 indikator utama yaitu: Toleransi, Kesetaraan dan Kerjasama. Upaya yang dilakukan untuk mendukung pencapaian target sasaran ini antara lain: program penguatan ideologi dan pengembangan pengawasan kebangsaan (wasbang), program kesatuan kebangsaan pendidikan politik masyarakat, program peningkatan penelitian dan pengembangan, program peningkatan kesejahteraan rakyat dan program pengembangan nilai budaya dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1.777.672.100,-



Forum Kerukunan Umat Beragama bersama Pemerintah Kabupaten Badung menggelar doa bersama di Komplek Peribadatan Puia Mandala Nusa Dua

## Sasaran 2 Meningkatnya Pelestarian adat dan Budaya

Sebagai pusat pengembangan akomodasi kepariwisataan dan daerah tujuan wisata utama di Bali, gesekan antara budaya asing dengan budaya lokal tidak dapat dihindarkan, oleh karena itu tantangan yang dihadapi dalam pengembangan dan pelestarian budaya kedepan akan semakin berat. Derasnya pengaruh budaya asing baik yang dibawa langsung wisatawan maupun akibat kemajuan teknologi informasi perlu diantisipasi melalui berbagai program dan kegiatan. Penetapan sasaran meningkatnya pelestarian adat dan budaya dengan indikator derajat partisipasi masyarakat dalam pengembangan dan



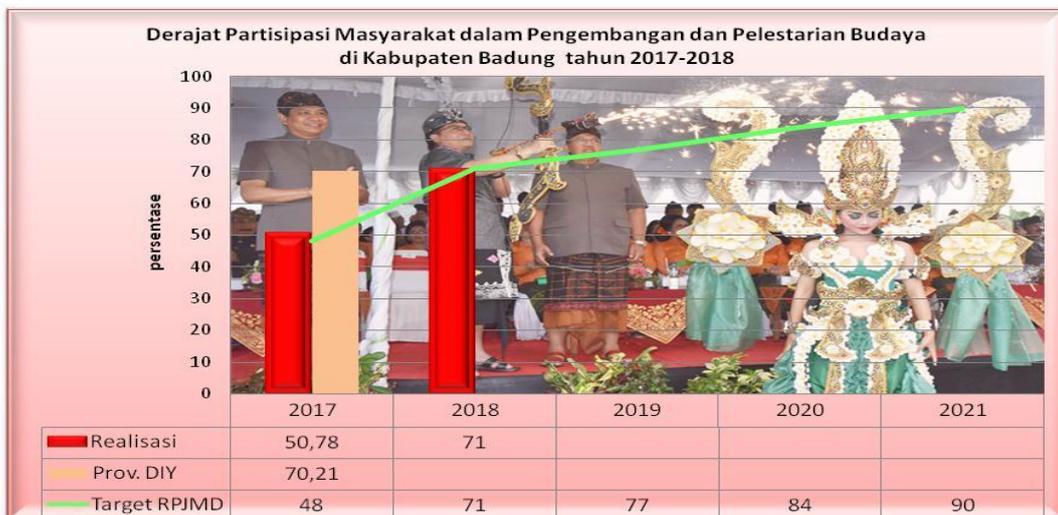


pelestarian budaya diharapkan dapat menumbuhkan sinergitas antara pengembangan pariwisata berbasis budaya dengan pelestarian adat dan budaya masyarakat.



Derajat Partisipasi Masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya tahun 2018 ditargetkan 71 %. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, capaian kinerja tahun 2018 adalah 71 % atau tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan sebesar 100%. Sedangkan tahun 2017 indikator ini ditargetkan 48% dengan capaian kinerja 50.78% (105.79%). Sampai akhir masa RPJMD Semesta Berencana 2016-2021, indikator kinerja ini ditargetkan mencapai 90%. Sebagai perbandingan derajat partisipasi masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya di Kabupaten Badung dibanding daerah lain sebagai berikut:

Grafik 3.3  
Perbandingan Derajat Partisipasi Masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya Tahun 2017-2018





Upaya untuk mewujudkan sasaran ini dilakukan melalui program pengembangan nilai budaya, dan program pengelolaan kekayaan budaya dan Program Pengelolaan kekayaan budaya dengan anggaran sebesar Rp. 203.578.208.416,-. Kegiatan yang dilaksanakan seperti pembinaan lembaga adat (desa adat, sekehe teruna, subak dan kelompok-kelompok kesenian). beberapa momentum yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran ini adalah melalui kegiatan pembinaan kelompok (sekaa) tari, sekaa tabuh, sekaa kidung, Festival Budaya, Pesta Kesenian Bali, Festival Budaya Pertanian serta Festival Budaya Bahari sebagai media untuk menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam melestarikan seni dan budaya serta sebagai daya tarik wisata.



### Sasaran 3 Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik

Upaya pembangunan fisik yang dilaksanakan selama ini telah menunjukkan hasil yang sangat menggembirakan ditandai dengan peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana umum. Namun demikian kami menyadari upaya ini perlu diimbangi dengan peningkatan kualitas pelayanan publik yang semakin baik. Sasaran meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik dengan indikator hasil survei kepuasan masyarakat atau Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) diharapkan dapat mendorong seluruh pemangku kepentingan untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat agar masyarakat mendapatkan pelayanan yang cepat, mudah, murah, nyaman dan ramah sebagai wujud pelayanan prima.





Hasil Survey kepuasan masyarakat tahun 2018, yang dilakukan oleh pihak ketiga, IKM Kabupaten Badung sebesar 79,73 dengan predikat baik atau melampaui target RPJMD yang ditetapkan sebesar 79 sehingga kinerjanya sebesar 100,92%. Hasil capaian indikator ini mengalami sedikit penurunan jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2017 sebesar 81,37. Hal ini disebabkan karena berdasarkan Permenpan RB Nomor 14 tahun 2017, terjadi perubahan nilai interval sehingga standar kepuasan lebih meningkat kategori sangat baik dengan nilai interval 88,31-100 sedangkan menurut Kepmenpan nomor: kep/25/M.PAN/2/2004 interval sangat baik dengan nilai 81,26-100, serta dinamika dan kesadaran masyarakat akan hak serta kewajibannya yang dijamin oleh UU Nomor 25 tahun 2009 dan semakin meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap pelayanan publik sejalan dengan meningkatnya kesejahteraan dan tingkat pendidikan. Hasil capaian IKM Kabupaten Badung lebih tinggi bila dibandingkan dengan hasil survei kepuasan masyarakat Provinsi Bali tahun 2018 sebesar 78. Distribusi kategori Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik menurut perangkat daerah seperti berikut :

Grafik 3.4

Kategori Perangkat Daerah Berdasarkan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat di Kabupaten Badung Tahun 2015-2018



Berdasarkan hasil survey kepuasan masyarakat terhadap perangkat daerah di Kabupaten Badung dari tahun 2015 sampai dengan 2018 menunjukkan sebagian besar nilai indeks kepuasan masyarakat terhadap perangkat daerah dengan kategori baik. Sedangkan perangkat daerah dengan indeks kepuasan masyarakat dengan kategori sangat baik cenderung meningkat namun tahun 2018 menurun karena perubahan nilai interval untuk kategori indeks kepuasan masyarakat.



Grafik 3.5  
Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Badung Tahun 2015 – 2018



Grafik 3.6  
Perbandingan Hasil SKM Kabupaten Badung dan Provinsi Bali Tahun 2017-2018



Namun demikian, berbagai program inovatif dalam pelayanan publik yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Badung secara nyata dilapangan, mendapat apresiasi positif dari berbagai lapisan masyarakat. Melalui sasaran ini diharapkan mampu mendorong seluruh OPD untuk terus menumbuhkan dan mengembangkan berbagai program inovatif





dalam pelayanan publik. Upaya yang dilakukan melalui pembinaan dan evaluasi bekerjasama dengan ORI dan akademisi Perguruan Tinggi dalam upaya meningkatkan kepatuhan terhadap UU 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan memperkuat kualitas SDM pelayanan publik. Disamping itu pula, tahun 2018 Kabupaten Badung meraih penghargaan predikat A bidang pelayanan publik dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN dan RB).

Komitmen kami untuk meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik diwujudkan dalam bentuk program penelitian dan pengembangan dengan kegiatan survei kepuasan masyarakat serta masing-masing perangkat daerah yang bersentuhan langsung dengan pelayanan masyarakat melaksanakan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana berupa gedung perkantoran, Rumah Sakit, sekolah, puskesmas serta didukung penyediaan peralatan yang semakin modern untuk memberikan kenyamanan dan kepuasan kepada masyarakat. Upaya meningkatkan kepuasan masyarakat didukung dengan program penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan berupa kegiatan pendampingan penyusunan Standar Pelayanan (SOP) dan Proses bisnis, Pembinaan dan Evaluasi Pelayanan Publik sampai ke tingkat desa upaya tersebut diperkuat dengan pembentukan Mal Pelayanan Publik (MPP) yang telah diresmikan oleh Menteri PAN dan RB untuk memberikan pelayanan yang cepat, mudah, ramah, aman dan nyaman kepada masyarakat.



*Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Syafruddin, Senin (17/9/2018) melaunching Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Badung, Bali, yang ditandai dengan penekanan sirene dan penandatanganan prasasti*

Program yang mendukung peningkatan indeks kepuasan masyarakat adalah Peningkatan penelitian dan pengembangan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 429.828.400. Disamping program tersebut juga di masing-masing perangkat daerah juga menganggarkan untuk peningkatan indeks kepuasan masyarakat.





Selanjutnya untuk meningkatkan indeks kepuasan masyarakat maka langkah-langkah perbaikan kedepannya sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan kedisiplinan dan rasa tanggung jawab petugas melalui pemberian pelatihan *service excellent* (pelayanan prima), untuk meningkatkan keterampilan dan etos kerja atau motivasi petugas serta menetapkan standarisasi internal mengenai sikap layanan dan disiplin kerja.
- 2) Mempedomani Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah dibuat dan Standar Pelayanan Publik (SPP) dalam memberikan pelayanan serta menindaklanjuti dengan Maklumat Pelayanan sebagai bentuk janji/ komitmen untuk memberikan pelayanan yang lebih baik dan berkualitas kepada pengguna layanan.
- 3) Meningkatkan kepercayaan masyarakat pengguna layanan terhadap petugas dalam memberikan pelayanan. Hal-hal yang dapat dilakukan adalah :
  - a. memberikan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi petugas
  - b. memberikan informasi secara komunikatif baik secara langsung maupun melalui media kepada pengguna layanan
  - c. memberikan penghargaan (*reward*) dan sanksi (*punishment*) kepada petugas
- 4) Meningkatkan kemudahan pelanggan dalam mengajukan keluhan melalui pembentukan Tim Kerja yang berfungsi menerima dan memproses keluhan pelangganserta menyediakan media yang mudah diakses oleh masyarakat pengguna layanan seperti memanfaatkan website resmi, telepon, SMS center, Email, dan atau penempatan Kotak Saran.
- 5) Melakukan survei secara periodik (3 sampai dengan 6 bulan sekali atau sekurang-kurangnya 1 tahun sekali) secara berkelanjutan, sehingga dapat dilakukan peningkatan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik.

#### **Sasaran 4 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah**

Upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel melalui sasaran meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan Indikator kinerja Predikat/kategori Akuntabilitas Kinerja (AKIP) guna mewujudkan pemerintahan yang berorientasi hasil perlu terus ditingkatkan. Berbagai upaya perbaikan kinerja guna mendukung Sistem Akuntabilitas Kinerja melalui Revisi RPJMD, penyempurnaan Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja Utama dan penyesuaian dokumen perencanaan serta *refocusing* program melalui *cross cutting* program telah menunjukkan peningkatan kualitas AKIP di Kabupaten Badung.

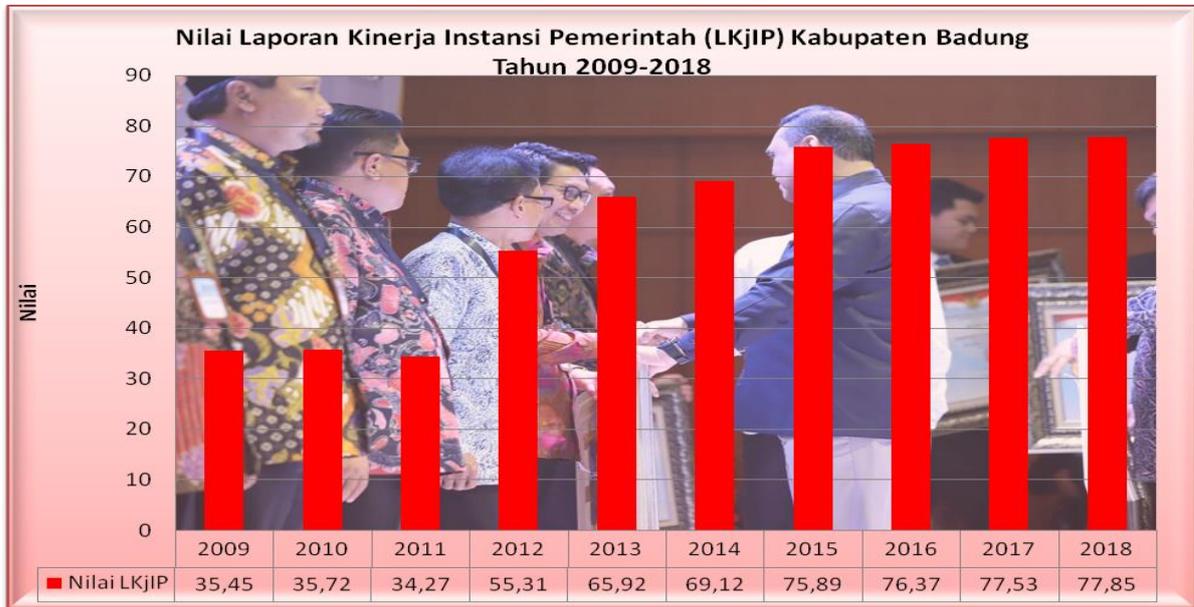
Nilai AKIP Kabupaten Badung Tahun 2018 ditargetkan sebesar 76.80 kategori BB, berdasarkan hasil evaluasi tahun 2018 nilai AKIP mengalami peningkatan dari tahun 2017 menjadi sebesar 77,85 dengan predikat BB (Sangat Baik) sehingga melampaui target yang ditetapkan dalam RPJMD, evaluasi LKJIP tahun 2017 atas LKJIP tahun 2016 nilai AKIP





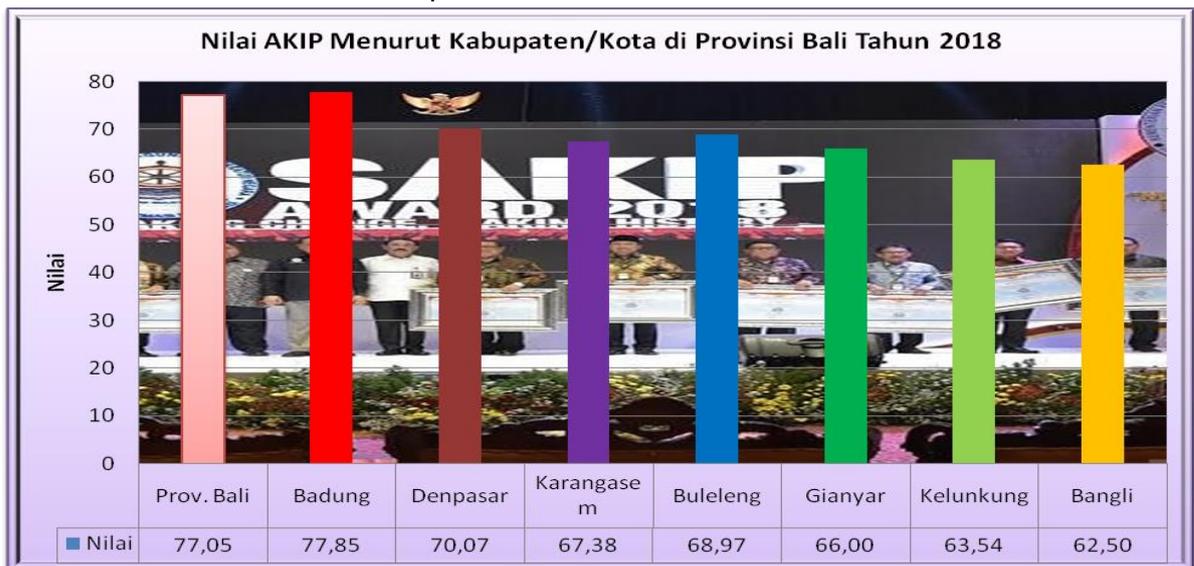
77,53 (BB) melampaui target target tahun 2017 sebesar 76,55. Sampai akhir periode RPJMD Semesta Berencana 2016-2021 nilai AKIP dtargetkan sudah mencapai 80,10 (A).

Grafik 3.7  
 Nilai Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2009-2018



Sebagai perbandingan nilai AKIP Kabupaten Badung paling tinggi dibandingkan dengan Kabupaten/Kota, dan nilai AKIP Provinsi Bali. Perbandingan nilai AKIP dapat dilihat seperti grafik berikut :

Grafik 3.8  
 Nilai Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Menurut Kabupaten Kota di Provinsi Bali Tahun 2018

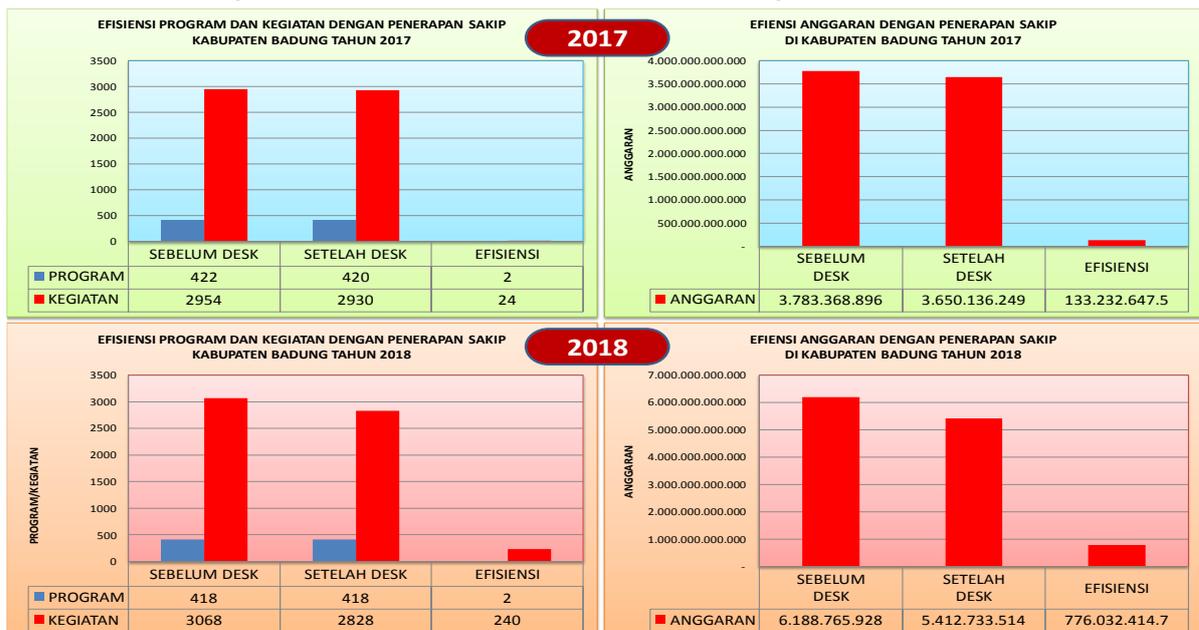




Program yang mendukung pencapaian indikator nilai akuntabilitas kinerja kabupaten adalah program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan dengan empat kegiatan. Pagu anggaran untuk pencapaian sasaran strategis Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebesar Rp. 74.174.300,-. Berbagai upaya dilakukan untuk mengimplementasikan SAKIP menjadi budaya kinerja melalui peningkatan kualitas perencanaan kinerja, pengukuran, pelaporan serta evaluasi kinerja serta secara bertahap mengubah mindset ASN agar lebih berorientasi kinerja melalui upaya penyelarasan program dan kegiatan agar sesuai dengan sasaran RPJMD. Melalui penerapan Pohon Kinerja dan *refocusing program* mampu mencegah *inefisiensi* anggaran dan kini telah dirasakan manfaatnya dengan adanya perubahan *mindset* dalam perencanaan dan penganggaran serta adanya efisiensi anggaran. Dengan adanya efisiensi program/kegiatan akan berdampak terhadap efisiensi anggaran.

Dengan penerapan sistem SAKIP di Kabupaten Badung maka berdampak pada efisiensi dan efektivitas anggaran. Efisiensi anggaran pada tahun 2018 sebanyak Rp. 776.032.414.731,96,- sedangkan pada tahun 2017 sebanyak Rp. 133.232.647.500,-. Sedangkan efektivitas program dan kegiatan pada tahun 2018 sebanyak 240 kegiatan sedangkan pada tahun 2017 sebanyak 2 program dan 24 kegiatan. Efektivitas dan efisiensi dengan penerapan sistem SAKIP di Kabupaten Badung seperti berikut :

Grafik 3.9  
Perbandingan efisiensi Anggaran dan Program/Kegiatan dengan Penerapan SAKIP Kabupaten Badung Tahun 2017-2018





*Sosialisasi penyusunan pohon kinerja Perangkat Daerah yang dipimpin langsung Sekretaris Daerah Kabupaten Badung*

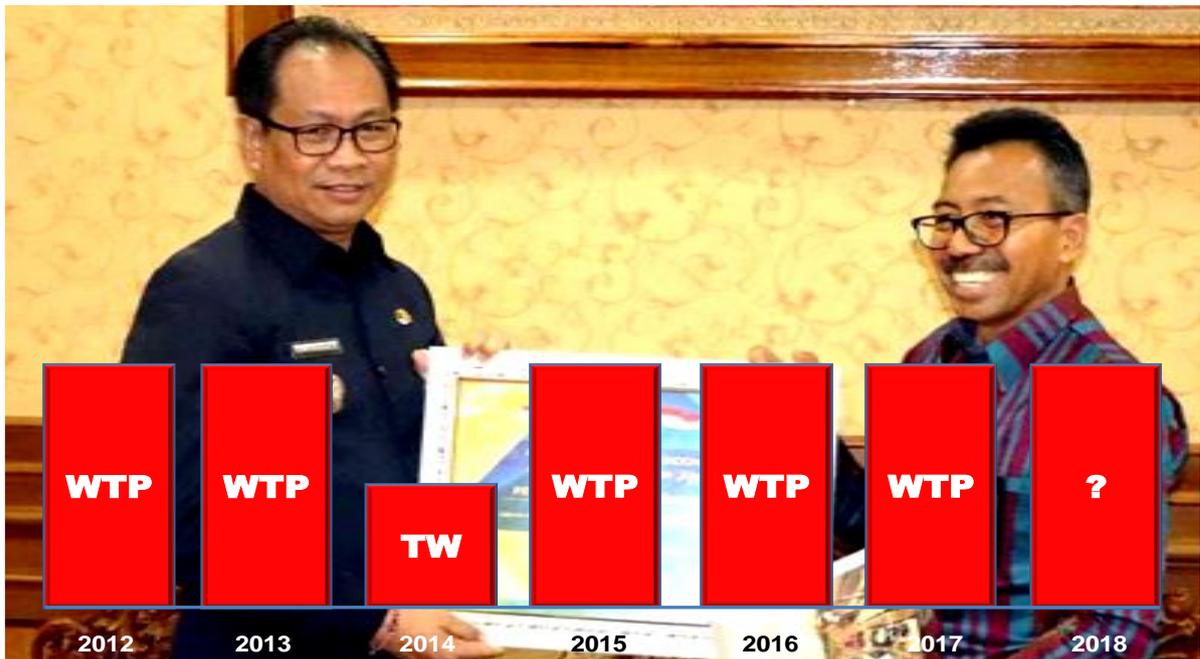
### **Sasaran 5 Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Barang Milik Daerah**

Dalam rangka untuk meningkatkan tata kelola keuangan daerah, dilakukan berbagai upaya melalui penyajian laporan keuangan daerah yang akurat dan akuntabel serta pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) yang baik mulai dari perencanaan sampai penatausahaan dengan berpedoman pada Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, sehingga dapat menyajikan data dan informasi nilai asset yang sebenarnya sesuai jenis-jenis asset, jumlah, keberadaan dan kondisinya.

Dengan komitmen dan upaya tersebut diatas, Pemerintah kabupaten Badung telah empat kali berturut-turut berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI. Kabupaten Badung pada tahun 2017 telah berhasil mempertahankan opini WTP sesuai dengan target yang ditetapkan. Sedangkan Untuk tahun 2018 diharapkan mampu mempertahankan WTP sesuai dengan target yang telah ditetapkan, namun hasilnya terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2018 saat ini masih dalam proses audit sehingga capaian kinerja sasaran ini tahun 2018 masih menunggu pengumuman resmi dari BPK RI.

Hasil capaian indikator kinerja opini BPK dari tahun 2012 sampai 2017 seperti grafik berikut:





Wakil Bupati Badung I Ketut Suiasa (kiri) menerima penghargaan dari Kementerian Keuangan RI di ruang pertemuan Wabup di Puspem Badung,

Program yang mendukung pencapaian indikator opini BPK yaitu program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah, program peningkatan dan pengembangan aset daerah dan program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan. Pagu anggaran untuk pencapaian sasaran strategis ini sebesar Rp. 561.614.200,-

Upaya-upaya yang telah dilakukan untuk pencapaian sasaran strategis ini dengan indikator opini BPK antara lain : penerapan pengelolaan keuangan berdasarkan standar akuntansi pemerintah (SAP), rekonsiliasi aset barang milik daerah, pembinaan aset serta monitoring dan evaluasi keuangan dan aset BMD.

### **Sasaran 6 Terwujudnya Pemerintahan Bersih Dan Bebas KKN**

Dalam rangka mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien serta birokrasi yang mampu memberikan pelayanan publik yang semakin baik, kami berkomitmen untuk melaksanakan program Reformasi Birokrasi melalui percepatan 8 area perubahan RB. Berbagai upaya telah dilakukan demi kemajuan pelaksanaan RB diantaranya melalui pembentukan Tim Pelaksana RB, Penyusunan *Road Map* RB 2014 – 2019, penetapan zona integritas dan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) yang merupakan instrumen untuk mengukur kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi yang dilakukan secara mandiri (*self assessement*) oleh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.



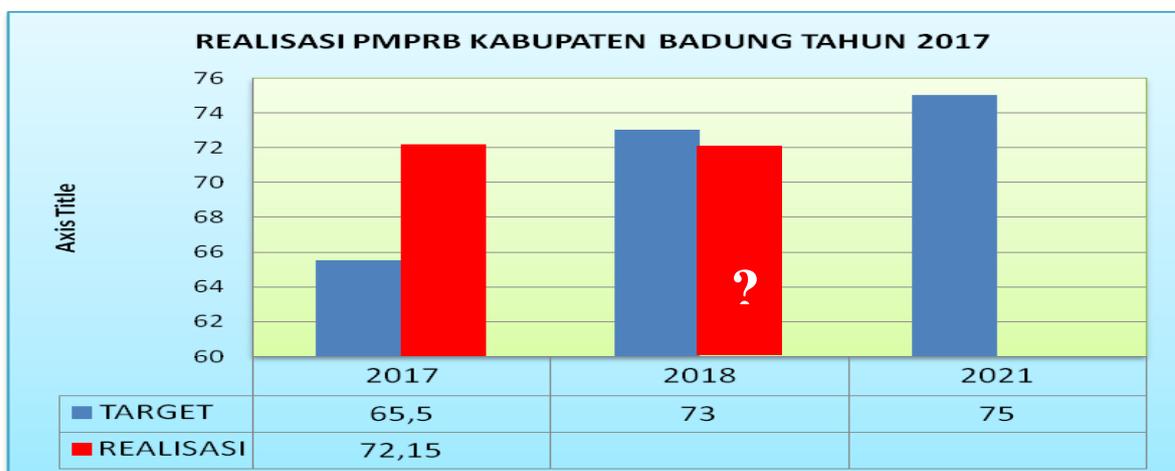


PMPRB mencakup penilaian terhadap dua komponen: **Pengungkit** (*Enablers*) dan **Hasil** (*Results*). *Pengungkit* adalah seluruh upaya yang dilakukan oleh instansi pemerintah dalam menjalankan fungsinya, sedangkan *Hasil* adalah kinerja yang diperoleh dari komponen pengungkit. Hubungan sebab-akibat antara Komponen Pengungkit dan Komponen Hasil dapat mewujudkan proses perbaikan bagi instansi melalui inovasi dan pembelajaran, di mana proses perbaikan ini akan meningkatkan kinerja instansi pemerintah secara berkelanjutan. Komponen Pengungkit sangat menentukan keberhasilan tugas instansi, sedangkan komponen hasil berhubungan dengan kepuasan para pemangku kepentingan. Sasaran Terwujudnya Pemerintahan Bersih dan Bebas KKN dengan indikator Katagori Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Indeks PMPRB) pada tahun 2017 ditargetkan B dengan nilai (65.50) dan hasilnya Badung berhasil meraih predikat BB dengan nilai 72,15. Selanjutnya tahun 2018, indeks PMPRB ditargetkan mampu mempertahankan predikat BB sampai tahun 2020 diharapkan sudah mampu meraih predikat A. Sampai laporan ini disusun, capaian kinerja tahun 2018 belum ada pengumuman resmi dari Kementerian PAN dan RB.

Program yang mendukung untuk tercapainya Katagori Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Indeks PMPRB) antara lain: program penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan, program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, dan program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kepala daerah. Untuk pencapaian sasaran strategis maka anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 2.402.555.400,-

Upaya yang dilakukan untuk mempercepat palaksanaan RB antara lain melalui perubahan *mindset* dan gerakan revolusi mental ASN, penancangan ZI, Penetapan WBK/WBBM, pelaksanaan seleksi terbuka JPT, seleksi CPNS melalui CAT, penguatan APIP, Penerapan SAKIP, penandatanganan fakta Integritas oleh seluruh ASN dan pembentukan MPP.

Grafik 3.10  
Realisasi PMPRB Kabupaten Badung Tahun 2017





Bupati Badung Menenerima Penghargaan dari KPK terhadap pelaporan LHKPN dan gratifikasi

### Sasaran 7 Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar, mencakup umur panjang dan sehat; pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor. Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka harapan hidup waktu lahir. Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata



Pembagian laptop kepada murid SMP



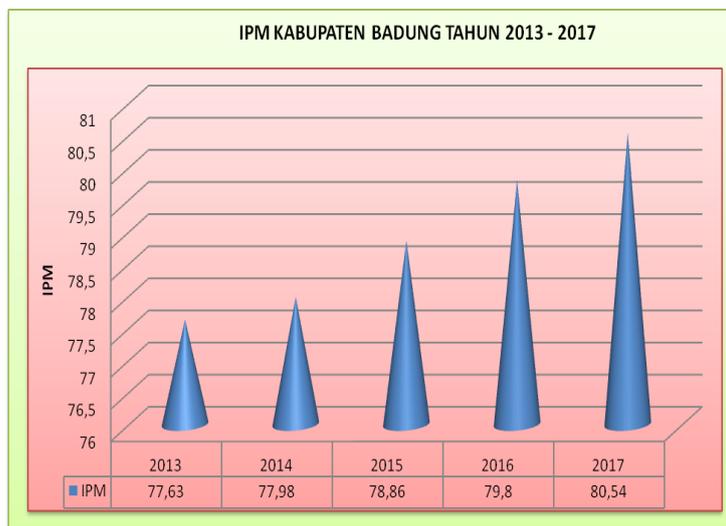


besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak. IPM Kabupaten badung pada tahun 2017 ditargetkan 80.54 namun sampai laporan ini dibuat BPS belum merilis secara resmi IPM Tahun 2018. Sebagai perbandingan capaian kinerja IPM dari tahun 2013-2017 sebagai berikut:

Tabel 3.2  
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Badung Tahun 2013-2017

Komponen IPM	IPM Kabupaten Badung				
	2013	2014	2015	2016	2017
Angka Harapan Hidup	74.19	74.3	74.31	74.42	74,53
Harapan Lama Sekolah	12.88	13	13.45	13.66	13,94
Rata-rata Lama Sekolah	9.18	9.29	9.29	9.9	9,99
Pengeluaran per Kapita Disesuaikan	16025	16080	16080	16567	17063
Indeks Pembangunan Manusia	77.63	77.98	78.86	79.8	80,54

Hasil capaian Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Badung terus mengalami kemajuan. Pada tahun 2017, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Badung mencapai 80,54 termasuk kategori sangat tinggi.



Angka Harapan Hidup (AHH) sebesar 74,53 berarti Bayi yang lahir pada tahun 2017 memiliki harapan untuk dapat hidup hingga 74,53 tahun, lebih lama 0,11 tahun dibandingkan dengan mereka yang lahir tahun sebelumnya. Anak-anak pada tahun 2017 berusia 7 tahun memiliki harapan dapat menikmati pendidikan selama 13,94 tahun (setingkat Diploma II), lebih lama 0,28 tahun dibandingkan dengan yang

berumur sama pada tahun 2016. Sementara itu, penduduk usia 25 tahun ke atas secara rata-rata telah menempuh pendidikan selama 9,99 tahun (setingkat SLTA kelas IX), lebih lama 0,09 tahun dibandingkan tahun sebelumnya. Masyarakat Kabupaten Badung pada tahun 2017, untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan rata-rata pengeluaran per kapita



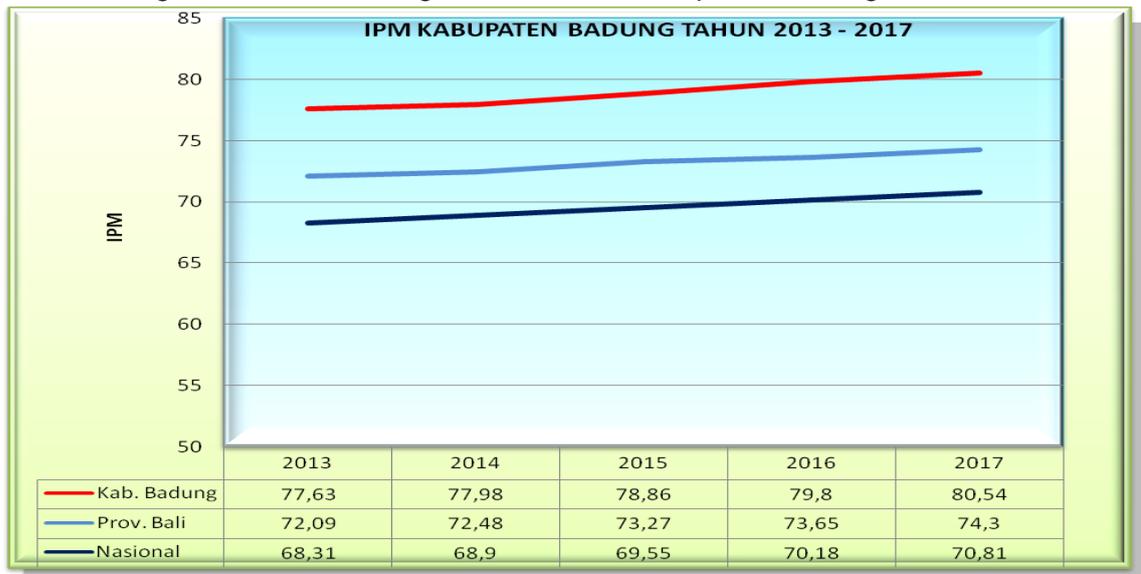


sebesar 17,063 juta rupiah per tahun, meningkat 496 ribu rupiah dibandingkan pengeluaran tahun sebelumnya.

Hasil capaian IPM Kabupaten Badung lebih tinggi bila dibandingkan dengan capaian IPM Provinsi Bali dan Angka Nasional. Data perbandingan hasil capaian IPM seperti berikut :

Tabel 3.11

Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Badung Tahun 2013-2017



Demikian juga hasil capaian IPM Kabupaten Badung bila dibandingkan dengan hasil capaian Kabupaten/Kota se Bali, menunjukkan bahwa capaian IPM Kabupaten Badung menduduki peringkat kedua setelah Kota Denpasar. IPM Kabupaten Badung diatas nilai IPM Provinsi Bali dan Nasional. Hasil Capaian IPM menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali, seperti berikut :

Tabel 3.12

Komponen IPM Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Bali Tahun 2017





Keberhasilan Pemerintah Kabupaten Badung dalam pencapaian indikator IPM tidak terlepas dari upaya yang sungguh-sungguh dalam melaksanakan program untuk meningkatkan komponen indeks pembangunan manusia. Anggaran yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis ini sebesar Rp. 481.206.263.805,-. Anggaran tersebut untuk pelaksanaan program/kegiatan antara lain :

1. Program untuk meningkatkan umur harapan hidup, meliputi :
  - Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak
  - Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita
  - Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia
  - Program upaya kesehatan masyarakat
  - Program perbaikan gizi
  - Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
  - Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/pustu dan jaringannya
2. Program untuk meningkatkan kualitas pendidikan, meliputi :
  - Program pendidikan anak usia dini
  - Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun
  - Program pendidikan non formal
  - Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan
  - Program pengembangan pendidikan berbasis informasi dan teknologi
3. Program untuk meningkatkan daya beli masyarakat, meliputi :
  - Program peningkatan kesempatan kerja
  - Program pemerdayaan kesejahteraan sosial



*Pembangunan gedung rumah sakit Mangusada untuk menunjang pencapaian sasaran strategis Indeks Pembangunan Manusia*





Upaya-upaya kedepan yang akan dilaksanakan untuk meningkatkan indeks pembangunan manusia melalui: peningkatan akses pelayanan kesehatan kepada masyarakat melalui pendirian puskesmas dan rumah sakit, peningkatan kualitas layanan kesehatan, peningkatan kualitas layanan kesehatan ibu, bayi dan anak. Untuk peningkatan pendidikan melalui peningkatan pendidikan dasar dan menengah, pendidikan luar sekolah. Strategi untuk meningkatkan rata-rata lama sekolah dengan meminimalisir drop out peserta didik (dasar dan menengah) serta meningkatkan pendidikan luar sekolah dengan program kejar paket A, B dan C. Sedangkan untuk peningkatan pendapatan dilakukan dengan cara meningkatkan kegiatan penunjang pariwisata, infrastruktur, pertanian hortikultura, perikanan yang dapat menyerap tenaga kerja sehingga berdampak terhadap penghasilan atau daya beli masyarakat.

### Sasaran 8 Meningkatkan Tingkat Kebahagiaan Masyarakat

Sesuai Visi Kabupaten Badung yaitu “Memantapkan Arah Pembangunan Badung Berlandaskan Tri Hita Karana Menuju Masyarakat yang Maju, Damai dan Sejahtera”, maka pembangunan di Kabupaten Badung memiliki tujuan akhir yaitu terciptanya kehidupan dan penghidupan masyarakat yang bahagia. Untuk itu, kami berkomitmen mewujudkan



peningkatan keseimbangan pembangunan pada berbagai dimensi dan skalanya berdasarkan *Tri Hita Karana*. Oleh karena itu dalam RPJMD Semesta Berencana tahun 2016-2021, kami berusaha mendorong munculnya sasaran baru yaitu meningkatnya tingkat kebahagiaan masyarakat dengan Indikator Indeks Kebahagiaan Masyarakat yang menggambarkan kesejahteraan sosial masyarakat dari berbagai dimensi kemajuan pembangunan tidak hanya dari dimensi

kemakmuran material (*welfare atau prosperity/ being well*), tetapi mengarah kepada konsep kebahagiaan (*happiness*).

Indeks Kebahagiaan Indonesia merupakan indeks komposit yang disusun oleh tiga dimensi yaitu : kepuasan hidup (*life satisfaction*), perasaan (*Affect*) dan makna hidup (*Eudaimonia*) dengan skala 0 sampai 100. Semakin tinggi nilai indeks menunjukkan tingkat kehidupan yang semakin bahagia, demikian pula sebaliknya semakin rendah nilai indeks, maka penduduk semakin tidak bahagia. Beberapa variabel utama, dalam menentukan Indeks Kebahagiaan adalah sebagai berikut : Kepuasan terhadap kondisi kesehatan,





Kepuasan terhadap pendidikan dan keterampilan, Kepuasan terhadap pekerjaan, Kepuasan terhadap pendapatan rumah tangga, Kepuasan terhadap kondisi keamanan, Kepuasan terhadap hubungan sosial, Kepuasan terhadap ketersediaan waktu luang, Kepuasan terhadap kondisi rumah, Kebahagiaan hidup, Harapan/keinginan yang sudah tercapai, Kepuasan hidup, Kepuasan terhadap kondisi lingkungan, Kepuasan terhadap keharmonisan keluarga.



*Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta berkomitmen meningkatkan kesejahteraan sekaligus tingkat kebahagiaan Masyarakat*

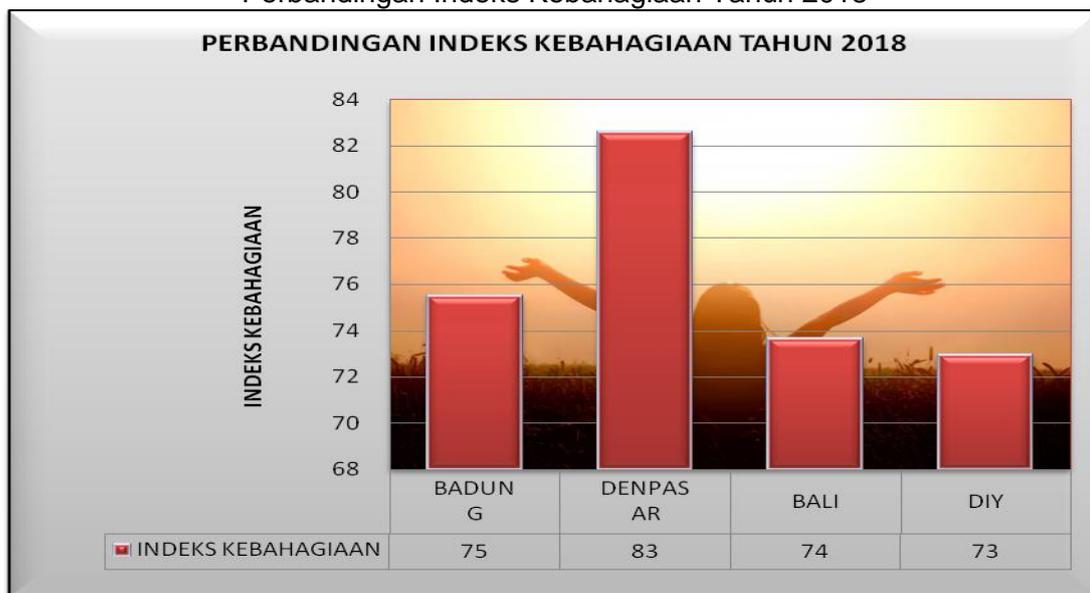
Tingkat kesejahteraan masyarakat Badung tergolong tinggi, oleh karena itu Sasaran Meningkatnya Tingkat Kebahagiaan Masyarakat dengan indikator Indeks Kebahagiaan Masyarakat dalam RPJMD Semesta Berencana 2016-2021 diharapkan dapat menciptakan masyarakat yang sejahtera dan bahagia. Tahun 2018 Indeks Kebahagiaan Masyarakat ditargetkan 71,5, berdasarkan hasil pendataan Survei Pengukuran Tingkat Kebahagiaan (SPTK) Kabupaten Badung tahun 2018 oleh Badan Litbang bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS), menunjukkan bahwa Indeks Kebahagiaan Masyarakat mencapai angka 75,47 dengan demikian target kinerja tahun 2018 telah tercapai bahkan terlampaui. Sebagai pembandingan pencapaian Indeks kebahagiaan Kabupaten Badung tahun 2018 relatif lebih tinggi dibandingkan dengan Provinsi Bali yang berada pada nilai indeks 72.48





itu artinya secara umum Masyarakat Bali tergolong bahagia dan Kabupaten Badung turut memberikan kontribusi yang besar bagi terwujudnya Indeks Kebahagiaan Provinsi Bali. Berbagai program inovatif yang dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat dalam bidang pendidikan, kesehatan dan jaminan sosial serta kemajuan pembangunan fisik memberikan kontribusi besar untuk mencapai target kinerja Sasaran ini. Perbandingan Indeks kebahagiaan Provinsi Bali dan Kota Denpasar dapat dilihat dalam grafik berikut:

Grafik 3.13  
Perbandingan Indeks Kebahagiaan Tahun 2018



Program yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian indikator indeks kebahagiaan yaitu program pengembangan perumahan dan kawasan pemukiman dan program peningkatan penelitian dan pengembangan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 535.013.000,-.

Upaya yang akan dilakukan untuk lebih meningkatkan tingkat kebahagiaan masyarakat antara lain: peningkatan akses pelayanan kesehatan dan pendidikan, meningkatkan akses terhadap pemenuhan kebutuhan pokok (pangan, sandang dan papan), rasa aman, peningkatan jaminan sosial, serta perbaikan lingkungan pemukiman.

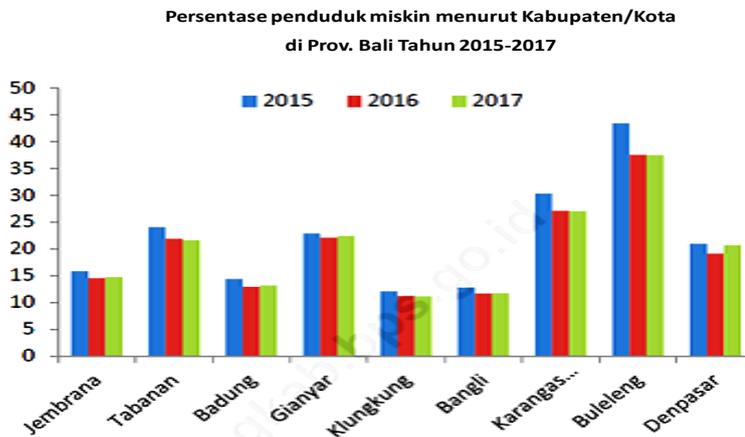
### Sasaran 9 Menurunnya Angka Kemiskinan

Upaya strategis dalam menangani masalah kemiskinan di Kabupaten Badung melalui lima program unggulan yang dicanangkan dalam Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana (PPNSB), di antaranya program bedah rumah dimana setiap rumah tangga dianggarkan Rp.55 juta yang secara teknis cukup untuk membangun rumah sederhana, layak huni dan berkualitas. Faktor kemiskinan bukan saja akibat masalah fisik atau rumah





semata-mata, namun dipengaruhi faktor kemudahan akses dan mentalitas. Pemkab Badung melibatkan semua pihak serta program-program strategis yang dituangkan pada APBD Badung dalam penanganan kemiskinan serta dapat memberikan nilai yang strategis



dan bermanfaat dalam meningkatkan efektivitas penetapan sasaran untuk program perlindungan sosial. Penanganan kemiskinan ini telah tercantum dalam program *Asta Marga Utama Desa* yang utamanya untuk percepatan pengentasan kemiskinan.

Tahun 2017 angka kemiskinan di targetkan 2,30% - 2,25%, melalui berbagai program yang dilaksanakan seperti perbaikan kualitas rumah sehat, usaha ekonomi produktif serta upaya untuk mencegah bertambahnya angka kemiskinan melalui program pemberian santunan penunggu pasien. Upaya ini berdampak angka kemiskinan Tahun 2017 menjadi 2,06% .

Tahun 2018 angka kemiskinan sesuai RPJMD Semesta Berencana tahun 2016 -2021 ditargetkan turun pada kisaran 2,25 % - 2,15 %. Berdasarkan hasil perhitungan BPS Kabupaten Badung, angka kemiskinan tahun 2018 mengalami penurunan menjadi 1,98 % dengan capaian kinerja 108,59 %. Tingkat kemiskinan di Kabupaten Badung termasuk *hardrock poverty*, dimana kondisi kemiskinan sudah sangat rendah, sehingga memerlukan komitmen dan kerja keras karena sudah sangat sulit untuk diturunkan bagaikan memecah batu karang yang sangat keras. Apabila dibandingkan dengan tingkat kemiskinan Provinsi Bali, dalam 10 tahun terakhir tingkat trend kemiskinan di Badung selalu berada dibawah kemiskinan Provinsi Bali dimana tahun 2018 tingkat kemiskinan Provinsi Bali adalah

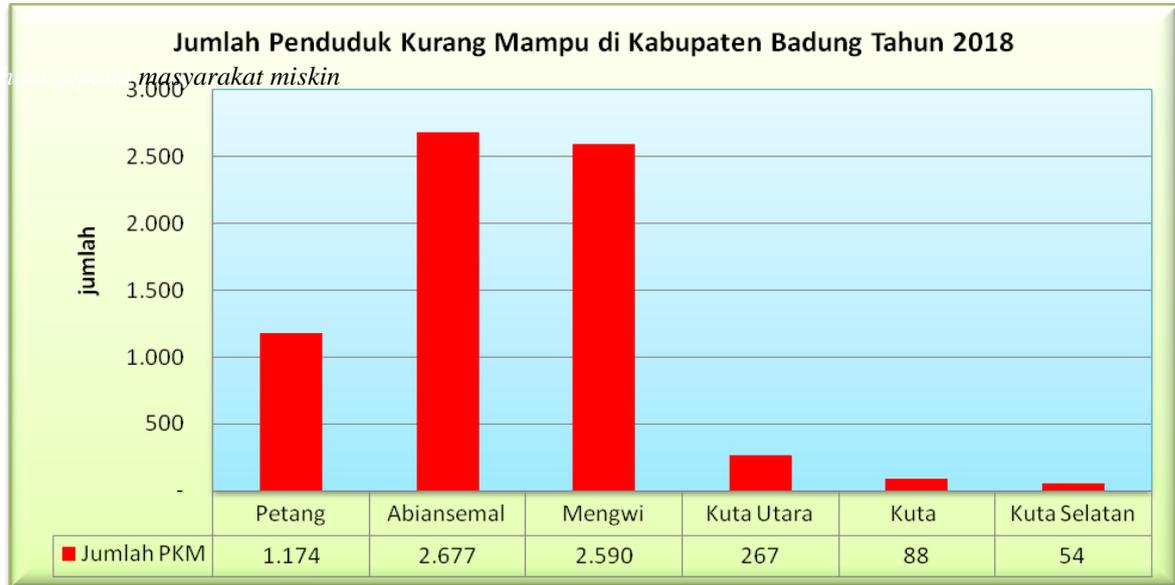
4,01%.



Data jumlah penduduk tergolong miskin/tidak mampu di Kabupaten Badung sebanyak 6.850 jiwa dengan jumlah penduduk kurang mampu terbanyak di Kecamatan Abiansemal serta Kecamatan Mengwi. Adapun rincian penduduk kurang mampu per kecamatan sebagai berikut :



Grafik 3.14  
Jumlah Penduduk Kurang Mampu menurut Kecamatan  
di Kabupaten Badung Tahun 2018



Menurunnya angka kemiskinan tersebut diatas, menunjukkan komitmen kami dalam percepatan pengentasan kemiskinan melalui berbagai program yang dilaksanakan seperti program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan, program pemberdayaan fakir miskin komunitas adat terpencil (KAT) dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dengan kegiatan pemberian bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP), serta upaya





mencegah bertambahnya kemiskinan melalui program Pemberian Santunan Penunggu Pasien, Pelatihan Ketrampilan Pijat, kepada penyandang disabilitas dan Pemberian Perlindungan Sosial bagi Lansia (Santunan Lansia) telah berhasil menurunkan prosentase penduduk miskin di Kabupaten Badung dengan pagu anggaran sebesar Rp. 2.739.525.880

Upaya-upaya yang akan dilakukan dalam upaya untuk menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Badung melalui : pemenuhan kebutuhan dasar (sandang, pangan dan papan) serta pemberdayaan ekonomi rumah tangga sasaran melalui pelatihan keterampilan, pemberian bantuan untuk kelompok usaha ekonomi produktif (UEP).

### **Sasaran 10 Meningkatkan Kontribusi Sektor UMKM Terhadap PDRB**

Sasaran Meningkatkan Kontribusi sektor UMKM Terhadap PDRB dengan indikator Persentase Kontribusi Sektor UMKM terhadap PDRB yang dihitung berdasarkan atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha, merupakan sasaran baru dalam RPJMD Semesta Berencana 2016-2021. Kontribusi sektor UMKM terhadap PDRB tahun 2018 ditargetkan sebesar 7,76 % atau meningkat 0,15 % dibandingkan capaian kinerja tahun 2017. Kontribusi sektor UMKM terhadap PDRB tahun 2017 ditargetkan sebesar 7,73%, realisasinya berdasarkan data BPS sebesar 7,61 atau 0,12 % dibawah dari target yang ditetapkan. Upaya pencapaian target 2018 didukung oleh bertambahnya industri pengolahan/manufacturing serta meningkatnya komponen perdagangan yang dilakukan oleh UMKM melalui program pemberdayaan dan pengembangan UMKM serta adanya program inovasi berupa Klinik UMKM. Capaian Kinerja tahun 2018 diasumsikan tercapai sesuai target yang ditetapkan 7,76% karena BPS Kabupaten Badung sampai Laporan ini disusun belum merilis hasil PDRB tahun 2018 secara resmi. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan peran sektor UMKM adalah melalui peningkatan penguasaan pangsa pasar tahun 2018 ditargetkan 11,40 % dengan realisasi 16,74 % serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui pelaksanaan tera ulang sekaligus memberikan perlindungan/keamanan kepada konsumen. Dengan demikian, sektor UMKM diharapkan semakin bergairah serta mampu memberikan kontribusi yang besar bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Terjadinya peningkatan kontribusi UMKM terhadap PDRB didukung oleh berkembangnya industri pengolahan yang berasal dari kayu dan rotan yang sangat diminati oleh wisatawan dan kebutuhan lokal serta lapangan usaha perdagangan mengalami fluktuasi dari tahun sebelumnya namun masih memberikan sumbangan terhadap kontribusi PDRB Badung. Dibandingkan dengan target pada akhir 2021 sebesar 7,91% dengan peningkatan sebesar 0,02 % pertahun akan tercapai apabila kondisi perekonomian dan sektor jasa yang merupakan andalan penggerak perekonomian Badung tidak mengalami permasalahan baik sosial maupun keamanan yang menjadi faktor keberlangsungan sektor jasa yang ada di Kabupaten Badung. Perkembangan kontribusi sektor UMKM terhadap PDRB tahun 2015 -2018 seperti grafik berikut:



Grafik 3.15  
Kontribusi Sektor UMKM terhadap PDRB Kabupaten Badung Tahun 2015-2018



Program yang mendukung tercapainya sasaran meningkatnya kontribusi sektor UMKM terhadap PDRB yaitu: program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan, program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri, program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan, program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan, program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri, program perencanaan pembangunan ekonomi serta program penyiapan potensi sumber daya, sarana dan prasarana daerah. Pagu anggaran yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis ini sebesar Rp. 2.913.780.300,-

Upaya-upaya yang akan dilakukan untuk lebih meningkatkan kontribusi sektor UMKM terhadap PDRB antara lain pendidikan dan pelatihan wirausaha, peningkatan manajemen pengelolaan koperasi dan UMKM, promosi/pameran kerajinan, peningkatan kemudahan akses modal, serta revitalisasi pasar rakyat.





## Sasaran 11 Meningkatnya Pencegahan Pelanggaran Perda Dan Perkada

Untuk menjaga agar wisatawan yang datang ke Kabupaten Badung tetap merasa aman dan nyaman diperlukan upaya yang konsisten untuk dapat mengantisipasi terjadinya berbagai pelanggaran terhadap Perda dan Perkada khususnya yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban masyarakat serta kebersihan lingkungan. Sasaran meningkatnya pencegahan pelanggaran Perda dan Perkada dengan Indikator Persentase Pencegahan pelanggaran Perda dan Perkada tahun 2017 di targetkan 80% realisasinya 91.92% dengan capaian kinerja sebesar 114.9%. Tahun 2018 upaya pencegahan terhadap pelanggaran Perda dan Perkada ditargetkan meningkat menjadi 85 % artinya dari keseluruhan indikasi pelanggaran diharapkan 85 % mampu dicegah. Berdasarkan data yang ada selama tahun 2018 terdapat indikasi pelanggaran perda/perkada sebanyak 3.756 melalui berbagai upaya pencegahan yang dilakukan, dari 3.756 indikasi pelanggaran sebanyak 3.485 indikasi pelanggaran mampu dicegah melalui tindakan preventif, sehingga capaian kinerja sasaran ini sebesar 82 % lebih rendah dari target yang ditetapkan, hal ini disebabkan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat untuk turut serta menjaga ketentraman dan ketertiban umum sehingga indikasi pelanggaran semakin menurun. Pada akhir periode RPJMD indikator Persentase Pencegahan Pelanggaran Perda dan Perkada ditargetkan menjadi 100%.



*Satuan Polisi Pamong Praja (SatPol PP) Kabupaten Badung menggelar Pembinaan Kewaspadaan Dini tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum di wilayah Kabupaten Badung, Selasa (6/2/2018)*





Untuk mewujudkan sasaran ini didukung dengan beberapa program antara lain: program pendidikan politik masyarakat, program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan, program pemberantasan penyakit masyarakat, program penguatan ideologi dan pengembangan wasbang dan program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan. Anggaran yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran ini sebesar Rp. 756.458.000.-

Upaya – upaya yang dilakukan untuk pencapaian sasaran strategis ini melalui: sosialisasi tentang peraturan daerah atau peraturan kepala daerah, patroli keliling secara rutin, menggalang kemitraan dengan satuan keamanan lainnya.

### **Sasaran 12 Meningkatkan Penegakan Perda dan Perkada**

Sebagai daerah dengan tingkat pertumbuhan ekonomi paling tinggi di Bali, Kabupaten Badung disamping menjadi incaran para investor yang ingin menanamkan modalnya juga menarik minat penduduk pendatang dari berbagai daerah untuk ikut mengais rejeki dan menetap di Kabupaten Badung. Dengan kondisi seperti itu, maka upaya untuk menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat melalui upaya penegakan Perda dan Perkada mengalami tantangan yang berat. Sasaran meningkatnya penegakan Perda dan Perkada dengan indikator persentase penegakan Perda dan Perkada diharapkan dapat menciptakan keserasian dan kenyamanan bagi masyarakat dan wisatawan. Persentase penegakan Perda dan Perkada tahun 2017 ditargetkan 75% dengan realisasi 81% dengan capaian kinerja sebesar 108%. Upaya penegakan perda/perkada tahun 2018 ditargetkan meningkat menjadi 80 %. Berdasarkan hasil pendataan, pada tahun 2018 terdapat 3.609 kasus pengaduan pelanggaran perda/perkada, dari jumlah tersebut, sebanyak 3.485 berhasil ditangani atau realisasinya mencapai 95 %. Penegakan Perda dilakukan melalui program pemeliharaan ketertiban umum dan pencegahan tindak kriminal berupa kegiatan operasi Tibum dan Tranmas, Tipiring dan Pengamanan Event-event penting, penanganan pelanggaran yang melalui pemanggilan sampai dengan pembongkaran serta pemberkasan sesuai prosedur yang berlaku, hasilnya capaian kinerja sasaran ini mengalami peningkatan dari tahun 2017 menjadi 95 % artinya dari seluruh upaya pelanggaran terhadap perda/perkada sebanyak 95 % mampu ditegakkan sesuai ketentuan yang berlaku.

Untuk mewujudkan sasaran ini didukung dengan beberapa program antara lain: program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan, program penguatan ideologi dan pengembangan wasbang, program pemeliharaan tibumtranmas dan pencegahan tindak kriminal serta program peningkatan disiplin aparatur. Anggaran yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran ini sebesar Rp. 7.459.417.500,-





Upaya yang telah dilakukan untuk pencapaian sasaran ini melalui: penegakan perda dan perkara seperti Penandatanganan Pernyataan, Pelaksanaa Tindak Pidana Ringan, dan Pembongkaran

### **Sasaran 13 Meningkatkan Pengarustamaan Gender**

Tingkat keberhasilan pembangunan yang sudah mengakomodasi persoalan gender dapat diukur, salah satu adalah dengan Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDP). IPG adalah ukuran pembangunan manusia yang merupakan komposit dari 4 indikator yang lebih menekankan pada status gender, khususnya dalam mengukur kemampuan dasar. Diharapkan dari angka IPG ini, mampu memberikan sebagian penjelasan mengenai program-program pembangunan yang mengakomodasi kesetaraan dan keadilan gender. Pada dasarnya IPG dihitung dari variabel yang sama dengan penghitungan IPM. Perbedaannya dalam penghitungan IPG, rata-rata pencapaian usia harapan hidup, tingkat pendidikan dan pendapatan disesuaikan dengan mengakomodasi perbedaan pencapaian antara perempuan dan laki-laki. Dalam konteks pembangunan manusia, IPG dapat digunakan untuk menjelaskan kemajuan pembangunan yang berbasis gender. Semakin tinggi IPG suatu wilayah atau negara, semakin rendah kesenjangan pembangunan antara perempuan dan laki-laki.

Sasaran ini merupakan sasaran baru dengan indikator indeks pembangunan gender atau IPG bertujuan untuk mengukur peranan wanita dalam mendapatkan akses di bidang pendidikan, kesehatan dan kesempatan berusaha. Tahun 2017, IPG kabupaten badung ditargetkan 75.61 sedangkan capaian kinerjanya 75,88, sedangkan Tahun 2018 IPG

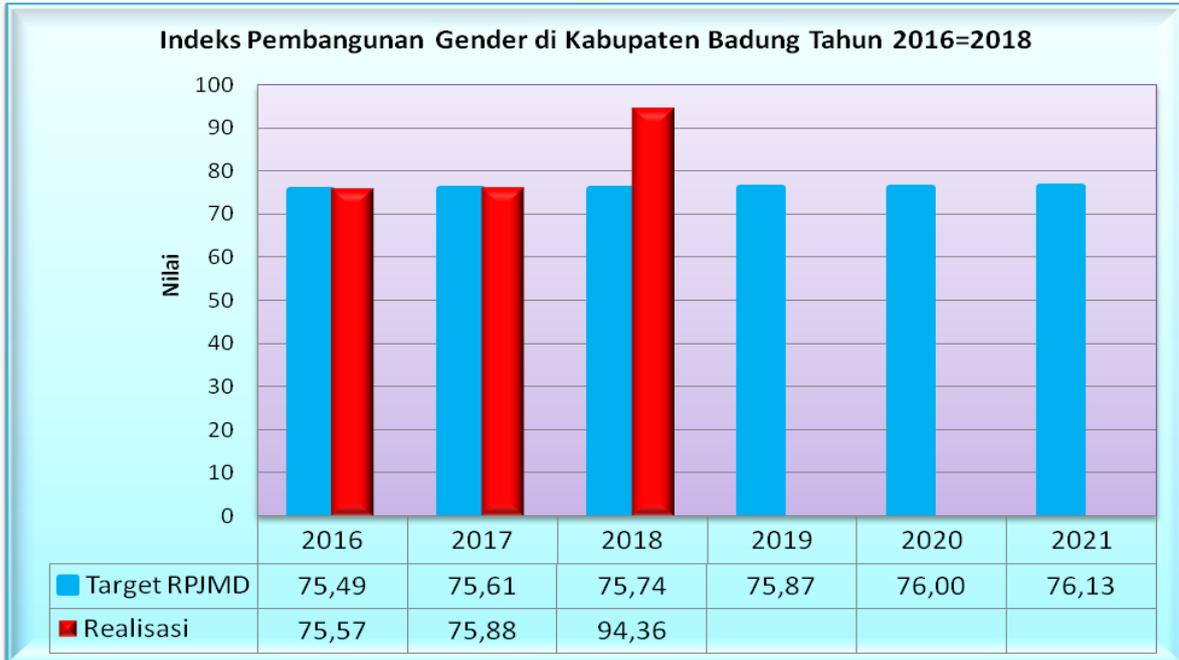




ditargetkan 75,74 namun berdasarkan hasil penelitian / survey yang dilaksanakan Badan Litbang bekerjasama dengan Universitas Udayana, diperoleh hasil IPG Kabupaten Badung tahun 2018 berada pada kisaran 94,36 jauh diatas target yang ditetapkan. Ini berarti di Kabupaten Badung hampir tidak ada ketimpangan yang cukup berarti dalam pembangunan jika dilihat dari perspektif gender. perkembangan IPG di Kabupaten Badung seperti berikut:

Grafik 3.16

Indeks Pembangunan Gender di Kabupaten Badung Tahun 2016-2018



Berdasarkan tabel diatas IPG Kabupaten Badung tahun 2015 dan 2016 terus mengalami peningkatan. Tahun 2015 IPG 75,7 sedangkan tahun 2016 75,57 sesuai hasil survey, masih terdapat kesenjangan gender di Kabupaten Badung karena angka IPG lebih kecil dibandingkan dengan dengan angka IPM dimana IPG Kabupaten Badung Tahun 2016 adalah 75,57 sedangkan IPM Tahun 2016 adalah 79,80. Bila dibandingkan IPG tahun 2018 sebesar 94,36 dengan IPM tahun 2017, maka kesenjangan tersebut sudah dapat diatasi.

Untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan semakin mendapat perhatian yang besar melalui Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender, Program Peningkatan Peran serta dan Kesetaraan Gender dan Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan. Anggaran yang dialokasikan untuk mencapai sasaran ini sebesar Rp. 2.414.983.020,-

Upaya – upaya untuk meningkatkan indeks pembangunan gender (IPG) antara lain meningkatkan program pendidikan vokasional (keterampilan) khususnya pada perempuan usia kerja, karena pada tahun 2017 pencari kerja perempuan yang tidak sekolah atau belum sekolah sebanyak 3,068 orang atau sebesar 1,43 persen (kondisi ini lebih tinggi





dibandingkan laki-laki). meningkatkan kampanye program Generasi Berencana (GENRE) pada kelompok remaja di Kabupaten Badung



*KEPALA DP2KBP3A Badung Putu Rianingsih (kiri) menerima penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) 2018 dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Yohana Yembise di Istana Wakil Presiden*

## **Sasaran 14 Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup**

### **Indeks Kualitas Lingkungan Hidup**

Indeks Kualitas lingkungan hidup merupakan data dan informasi mengenai kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Badung terkait dengan Tiga indikator yaitu kualitas udara, air dan tutupan hutan. IKLH disusun berdasarkan basis data hasil pengamatan yang dilakukan setiap tahun dengan menggunakan parameter yang telah ditetapkan. IKLH menjadi hal yang sangat penting diketahui mengingat saat ini tantangan yang dihadapi para pihak dalam pelaksanaan pembangunan semakin berat dan kompleks.

IKLH berfungsi untuk memberikan informasi kepada para pengambil keputusan Kabupaten Badung tentang kondisi lingkungan, sebagai bahan untuk evaluasi terhadap kebijakan pembangunan berkelanjutan dan bentuk pertanggungjawaban tentang pencapaian target program-program Pemerintah Kabupaten Badung di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Perhitungan IKLH meliputi Indeks Kualitas





Air (IKA) dengan bobot 30%, Indeks Kualitas Udara (IKU) dengan bobot 30% dan Indeks Tutupan Lahan (ITL) dengan bobot sebesar 40%. Klasifikasi IKLH adalah sebagai berikut:

- 1) Unggul : >90
- 2) Sangat baik : 82 - 90
- 3) Baik : 74 - 82
- 4) Cukup : 66 - 74
- 5) Kurang : 58 - 66
- 6) Sangat Kurang : 50 – 58
- 7) Waspada : <50

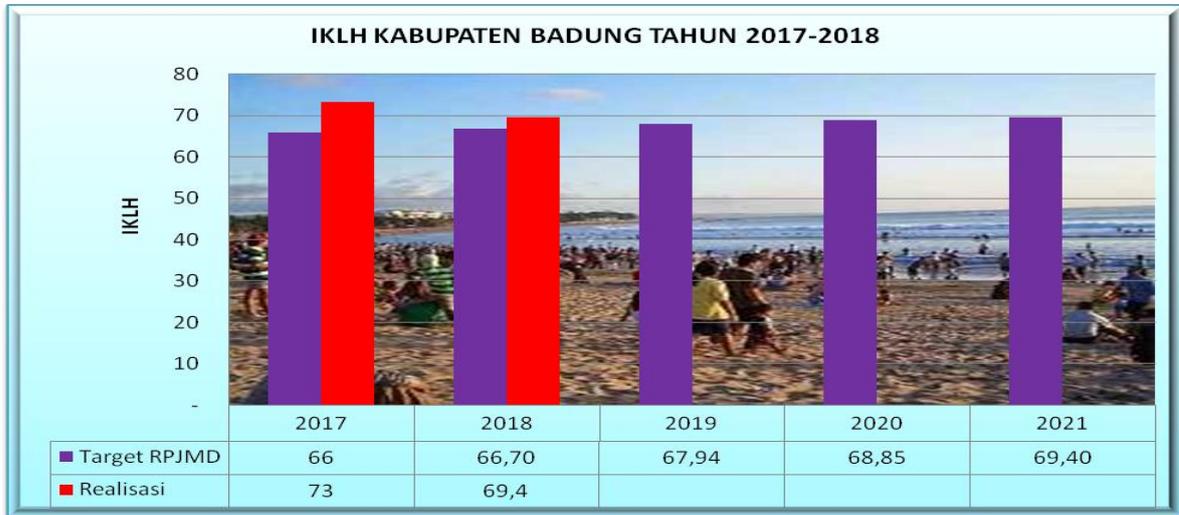
Untuk pengukuran indeks pencemaran air dilakukan pengambilan sampel air sungai di 10 lokasi sungai, meliputi sungai/tukad mati, Ayung, Umaalas, Bangiang, Danggang, Penet, Yeh Poh, Dam Lukluk, Ukian, dan Pangi. Setiap lokasi diambil 3 sampel (hulu, tengah dan hilir) dan dilakukan 2 kali pada musim penghujan dan kamarau. Jumlah seluruh sampel sebanyak 60 sampel. Parameter yang dianalisis seperti: TSS, DO, COD, BOD, Pospat, *Fecal coliform* dan *total coliform*. Untuk pengukuran indeks pencemaran udara dilakukan di 12 (dua belas) lokasi yaitu setiap kecamatan diambil 2 lokasi sebanyak 2 kali setahun dengan metode passive sampler. Indikator yang diukur NO<sub>2</sub> dan SO<sub>2</sub>. Sedangkan untuk indikator indeks tutupan hutan dengan mempergunakan data sekunder dari profil pengelolaan tutupan vegetasi, Kabupaten Badung tahun 2017.

Hasil capaian indikator IKLH yang terdiri dari IPU, IPA dan ITH tahun 2018 sebesar 69,18 atau melampaui target yang ditetapkan sehingga capaian kinerjanya 103,72%. Sesuai target RPJMD Semesta Berencana tahun 2016-2021, IKLH Kabupaten Badung tahun 2018 ditetapkan 66,70. Sedangkan target IKLH Kabupaten Badung tahun 2021 diharapkan mencapai 69,40. Nilai IKLH sebesar 69,18 termasuk klasifikasi cukup yang masing-masing disumbangkan oleh indikator IPU sebesar 29,75, IPA 14,78 dan ITH 24,65. Indikator yang mempengaruhi peningkatan IKLH adalah kualitas air (IPA), parameter biologi yaitu *fecal koliform* dan *total koliform* merupakan parameter yang paling berperan besar dan sangat sensitive terhadap penyebab penurunan kualitas air sungai.

Sebagai perbandingan, IKLH Kabupaten Buleleng tahun 2018 sebesar 60,00, lebih rendah 9,18 dibanding Kabupaten Badung, sedangkan IKLH Provinsi Bali adalah 61,18 dan IKLH Nasional 68,50. Dengan demikian, IKLH Kabupaten Badung tahun 2018 bila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2017 mengalami penurunan hal ini disebabkan dari Tiga indikator diatas, nilai indikator IPU mengalami sedikit penurunan namun secara umum IKLH Badung berada diatas IKLH Nasional.



Grafik 3.17  
IKLH Kabupaten Badung Tahun 2017-2018



Grafik 3.18  
Perbandingan Hasil IKLH Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2018



Penyusunan indeks kualitas lingkungan hidup bagi Kabupaten Badung, terkait erat dengan kebutuhan prioritas pembangunan berkelanjutan yang tertuang dalam salah satu dari 6 (enam) prinsip dasar pembangunan Kabupaten Badung salah satunya yaitu *pro environment* dan selaras dengan sasaran RPJMN, target sasaran IKLH tahun 2019 berkisar : 66,5-68,5. Indeks kualitas Lingkungan Hidup diharapkan dapat menjaga kualitas air sungai di Kabupaten Badung.

Berbagai program yang dilakukan untuk mendukung pencapaian sasaran meningkatnya kualitas lingkungan hidup antara lain : Program Pengendalian Pencemaran





dan Perusakan Lingkungan Hidup, Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan, Program Peningkatan dan Akses Informasi SDA dan Lingkungan Hidup, Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan SDA, Program Pembinaan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau ( RTH ). Alokasi anggaran untuk pencapaian sasaran ini sebesar Rp. 82.658.356.631.

Upaya-upaya untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup di Kabupaten badung meliputi: Upaya untuk meningkatkan indeks kualitas air dengan cara menurunkan beban pencemaran melalui pengetatan baku mutu air limbah, pengolahan air limbah domestik dan Usaha Kecil dan Menengah, restorasi (kualitas air) sungai, pengelolaan limbah plastik (GOTIK), serta pemantauan dan pengawasan sumber-sumber pencemar. Upaya untuk meningkatkan indeks kualitas udara melalui intervensi peraturan (memperketat baku mutu emisi serta pembatasan beban emisi), penanaman pohon perindang untuk penyerapan gas karbondioksida yang berasal dari kendaraan melalui program *green transportation*. Sedangkan upaya untuk meningkatkan indeks tutupan hutan dan lahan melalui pemantauan perubahan tutupan lahan, pemeliharaan tutupan hutan melalui berbagai program/kegiatan, dan penanaman pohon.

### Indeks Pertanaman (IP)



Areal Persawahan Di Tanah Wuk, Desa Sangeh

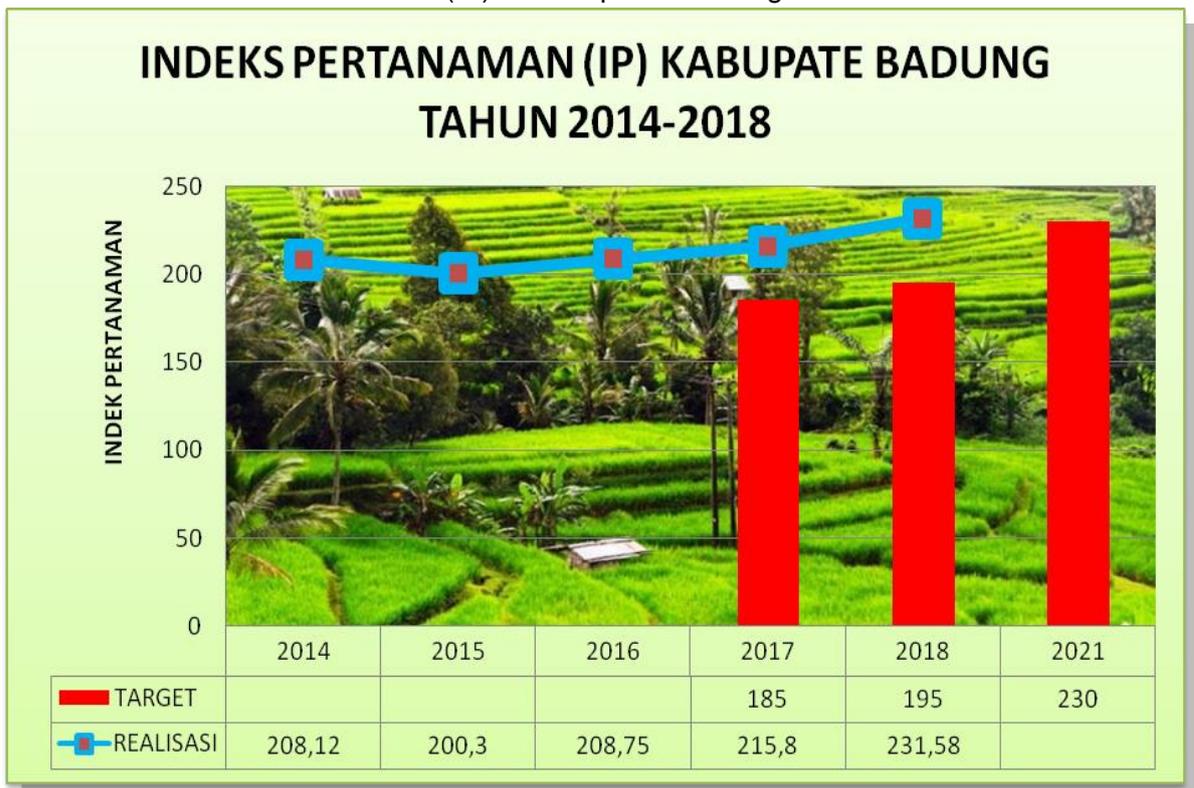
Dalam rangka untuk meningkatkan ketahanan pangan serta mempertahankan kualitas lingkungan hidup melalui penghijauan lahan maka dalam RPJMD Semesta Berencana 2016-2021 ditetapkan indikator baru yaitu Indeks Pertanaman. Indeks Pertanaman (IP) menunjukkan kerapatan pertanaman pada sebidang lahan. IP ini menunjukkan berapa kali melakukan penanaman padi, palawija dan hortikultura dalam setahunnya. IP tahun 2017 ditargetkan sebesar 185 dengan realisasi 215,80 sedangkan tahun 2018, Indeks Pertanaman di targetkan 195 dengan realisasi 231,58 atau capaian kinerjanya 118,76





persen. Bila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2017 sebesar 215,80, capaian kinerja tahun 2018 mengalami peningkatan menjadi 231,58 (7,31%). Kondisi ini disebabkan karena adanya UPSUS PAJALE, BABE program khusus dari pemerintah pusat yang mendorong peningkatan penanaman padi, jagung, kedele, bawang dan cabe. Disamping itu, disebabkan karena adanya pendampingan yang semakin intensif dari PPL dan lebih terorganisirnya bantuan subsidi kepada petani serta adanya jaminan asuransi dari pusat dan pemerintah Kabupaten Badung. Hal ini berarti di Kabupaten Badung terjadi peningkatan IP dibandingkan tahun 2017 sebesar 215,80. Semakin tinggi IP semakin sering areal sawah ditanami sehingga pertanaman pada sebidang lahan semakin banyak proses fotosintesa yang terjadi dan menghasilkan Oksigen (O<sub>2</sub>) untuk lingkungan hidup yang sehat. Faktor-faktor yang mempengaruhi IP adalah: Irigasi, Alsintan, Teknologi, Hama dan Penyakit, Benih dan Tenaga Kerja. Untuk mendukung indeks Pertanaman dilaksanakan melalui penerapan pola tanam yang optimal.

Grafik 3.19  
Indeks Pertanaman (IP) di Kabupaten Badung Tahun 2014-2018



Seiring dengan keterbatasan lahan pertanian, pemanfaatan lahan melalui indeks pertanaman diharapkan mampu menjaga ketahanan pangan dan pelestarian lingkungan. Sehingga untuk mendukung tercapainya indikator indeks pertanaman maka dilaksanakan program peningkatan produksi pertanian dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 5.043.824.750





## Sasaran 15 Meningkatnya kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana

Kapasitas daerah adalah kemampuan daerah dan masyarakat untuk melakukan tindakan pengurangan ancaman dan potensi kerugian akibat bencana secara terstruktur, terencana dan terpadu. Tujuannya peningkatan kapasitas adalah untuk menurunkan indeks resiko bencana. Sedangkan manfaatnya adalah memberikan arah kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah sehingga dapat meningkatkan ketahanan daerah serta menjaga hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan. Tingkat kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana, merujuk pada peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 03 Tahun 2012 tentang Panduan Penilaian Kapasitas Daerah Dalam Penanggulangan Bencana yaitu dengan dukungan komitmen serta kebijakan yang menyeluruh dalam pengurangan resiko bencana di suatu daerah telah memperoleh capaian – capaian yang berhasil, namun diakui ada masih keterbatasan dalam komitmen, sumber daya finansial ataupun kapasitas operasional dalam pelaksanaan upaya pengurangan risiko bencana di daerah tersebut.



Pada tahun 2013 Pemerintah telah memetakan indeks risiko bencana pada 136 kabupaten/kota dengan hasil 120 daerah masuk katagori resiko tinggi dan 16 daerah dengan katagori resiko sedang. Data tersebut termuat dalam Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) dimana Kabupaten Badung termasuk kategori resiko tinggi dengan Indeks risiko 179,2. Berkat komitmen dan kerja keras seluruh komponen masyarakat, tahun 2016 dan 2017, indeks risiko bencana Kabupaten Badung mengalami penurunan menjadi 163,7 ( 8,65 % ).

Upaya pengurangan risiko bencana di Kabupaten Badung telah terkoordinasi dengan terbentuknya BPBD Kabupaten Badung Tahun 2011. Bencana yang telah terjadi





dalam kurun waktu 2011 – 2018 yang terdata di BPBD Badung telah dilaksanakan penanganan secara terkoordinasi dengan dukungan pendanaan yang cukup memadai. Ada tiga pilar pelaksana penanggulangan bencana yaitu Pemerintah, masyarakat dan dunia usaha. Ketiga pilar ini harus memiliki komitmen yang besar dalam upaya pengurangan risiko bencana. Dunia Usaha saat ini juga sudah cukup besar komitmennya namun tetap perlu ditingkatkan melalui koordinasi sehingga mencapai hasil sesuai harapan.

Ketersediaan sarana dan prasarana untuk operasional penanggulangan bencana yang telah ada sampai saat ini cukup memadai sehingga penanganan dampak bencana yang terjadi di Kabupaten Badung telah dapat terlaksana dengan baik, Namun mengingat adanya kecenderungan semakin meningkatnya jumlah bencana, maka tetap dibutuhkan sarana – sarana pendukung operasional yang baru dan makin canggih.

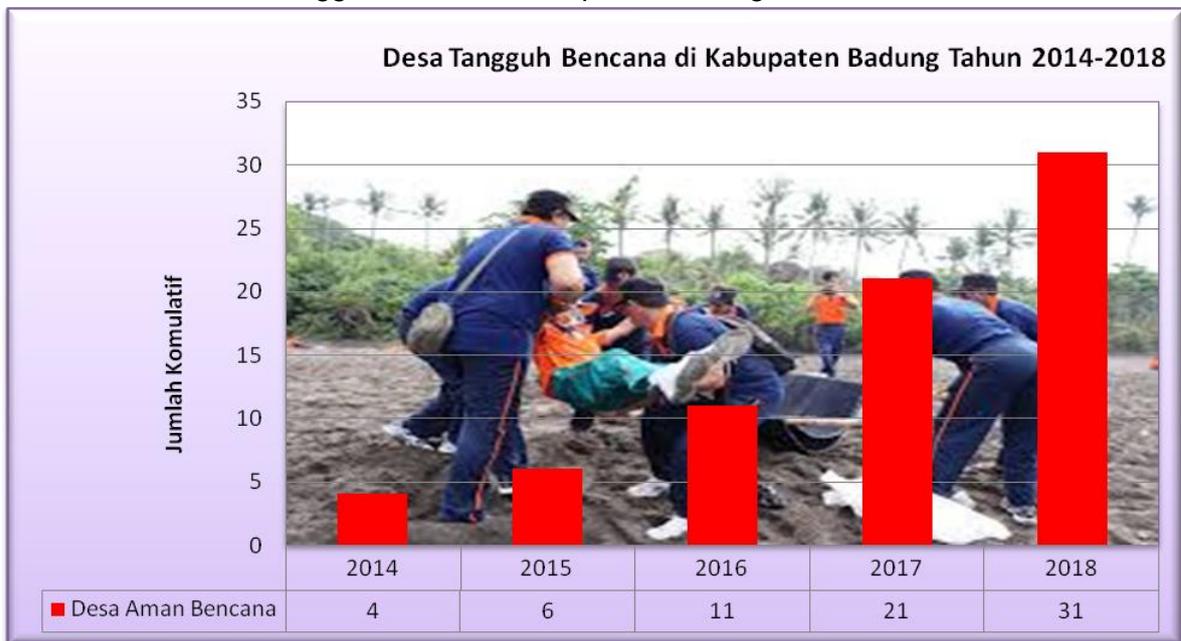
Kabupaten Badung pada tahun 2018 menargetkan kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana pada level 4 yang diukur berdasarkan 7 Prioritas yang telah ditetapkan. Berdasarkan penjelasan, fakta dan data tersedia, maka capaian kinerja indikator ini telah mencapai target yaitu telah memenuhi semua persyaratan untuk berada pada level 4 berarti capaian kinerjanya sebesar 100%. Tahun 2018, telah dilakukan penilaian mandiri terhadap indeks resiko bencana yang mengacu pada 7 indikator dengan menggunakan instrument indeks Ketahanan Daerah (IKD). Dari hasil penilaian IKD menunjukkan telah terjadi penurunan indeks resiko bencana sebagai akibat dari peningkatan kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana. Nilai 111 menunjukkan tingkat resiko bencana Kabupaten Badung berada pada kategori sedang. Capaian penurunan indeks resiko bencana ini lebih tinggi dari target nasional yaitu 30% pada tahun 2019. Dengan capaian tersebut maka tingkat kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana Kabupaten Badung adalah berada pada level IV sesuai dengan target yang ditetapkan. Klasifikasi **Level 4** berarti dengan dukungan komitmen serta kebijakan yang menyeluruh dalam pengurangan risiko bencana disuatu daerah telah memperoleh capaian-capaian yang berhasil, namun diakui ada masih keterbatasan dalam komitmen, sumberdaya finansial ataupun kapasitas operasional dalam pelaksanaan upaya pengurangan risiko bencana di daerah tersebut. Pada akhir periode RPJMD semesata berencana tahun 2016-2021, harapan capaian penurunan indeks resiko bencana menjadi 100 (penurunan 40%) dengan tingkat kapasitas level V.

Untuk mewujudkan capaian kinerja sasaran ini, diupayakan melalui berbagai program antara lain : Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Program Penanganan Darurat Bencana, Program Pemulihan Pasca Bencana, program perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial, serta program peningkatan kesiapsiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran. Pagu anggaran yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran ini sebesar Rp. 41.859.201.820,-

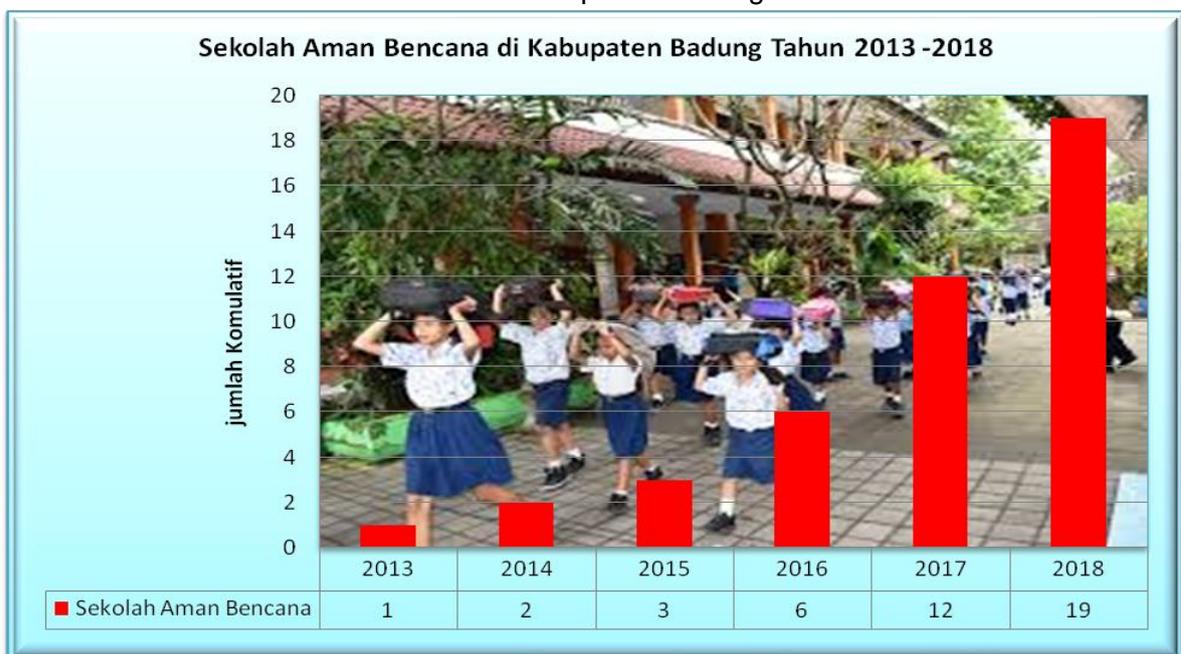
Beberapa kegiatan yang dilaksanakan dalam upaya meningkatnya kesiapsiagaan dalam pengurangan resiko bencana antara lain menyiapkan desa/kelurahan tangguh bencana dan sekolah aman bencana. Di Kabupaten Badung telah memiliki 31 desa/kelurahan tangguh bencana dari 60 desa/kelurahan yang ada, atau capaian 50%. Sedangkan untuk sekolah aman bencana sudah ada sebanyak 19 sekolah. Perkembangan desa tangguh bencana dan sekolah aman bencana seperti berikut:



Grafik 3.20  
Desa Tangguh Bencana Kabupaten Badung Tahun 2014-2018



Grafik 3. 21  
Sekolah Aman Bencana Kabupaten Badung Tahun 2013-2018



### Sasaran 16 Meningkatnya Daya Saing Tenaga Kerja

Pengangguran merupakan salah satu masalah utama yang dihadapi oleh setiap pemerintah daerah bahkan negara sekalipun. Berbicara masalah pengangguran, tidak hanya bicara tentang masalah sosial tetapi juga berkaitan dengan permasalahan ekonomi,





karena pengangguran selain menyebabkan masalah social juga berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan data dari BPS Kabupaten Badung untuk Tingkat Pengangguran Terbuka tahun 2017 adalah 0,48% sedangkan targetnya adalah 0,335% , terjadi kenaikan tingkat pengangguran terbuka sebesar 0,145% sehingga capaian kinerja 69,79%, Hal ini kemungkinan disebabkan karena terjadi bencana alam Erupsi Gunung Agung menyebabkan menurunnya atau melambatnya pertumbuhan ekonomi di berbagai sektor akibat ditutupnya Bandara Ngurah Rai terhadap sehingga jumlah wisatawan berkunjung mengalami penurunan drastis , *accupancy* hotel menurun, karyawan ada yang dirumahkan dan gajinya dibayar 50%. Hal ini berimbas terhadap karyawan/*delay worker* secara otomatis mereka tidak punya pekerjaan.

Sedangkan tahun 2018, Tingkat Pengangguran Terbuka ditargetkan sebesar 0,330% (0,33%) menurun dibandingkan target tahun 2017 (0,335 %). Berdasarkan data BPS, tingkat pengangguran terbuka tahun 2018 adalah sebesar 0,44 % atau 0,11 % diatas target yang ditetapkan, sehingga capaian kinerja tahun 2018 tidak tercapai sesuai target yang ditetapkan, hal ini kemungkinan disebabkan oleh masih lesunya roda perekonomian akibat dari erupsi Gunung Agung dan menurunnya tingkat kunjungan wisatawan China ke Bali. Namun jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2017 sebesar 0,48 % , tingkat pengangguran terbuka 2018 turun sebesar 0,04%.



Sebagai perbandingan, berdasarkan hasil pendataan jumlah pengangguran tahun 2017 bekerjasama dengan Universitas Warmadewa, tingkat pengangguran terbuka adalah 0,32% sedangkan Target pada tahun 2017 adalah 0,35%. Berdasarkan hasil pendataan secara mikro ini dengan *by name by adrees*, Jumlah pengangguran adalah 1.123 orang apabila dibandingkan dengan data jumlah penduduk Kabupaten Badung semester I Tahun 2017 adalah 486.646 orang, dengan asumsi 75% dari jumlah penduduk ini adalah angkatan kerja berjumlah 351.260 orang maka tingkat pengangguran terbuka adalah  $1123 : 351.246 \times 100 \% = 0,32\%$ , sedangkan BPS menggunakan metode pendataan / penghitungan secara makro. Upaya yang dilakukan untuk menekan tingkat pengangguran adalah melalui berbagai program antara lain: Program Peningkatan Kualitas dan

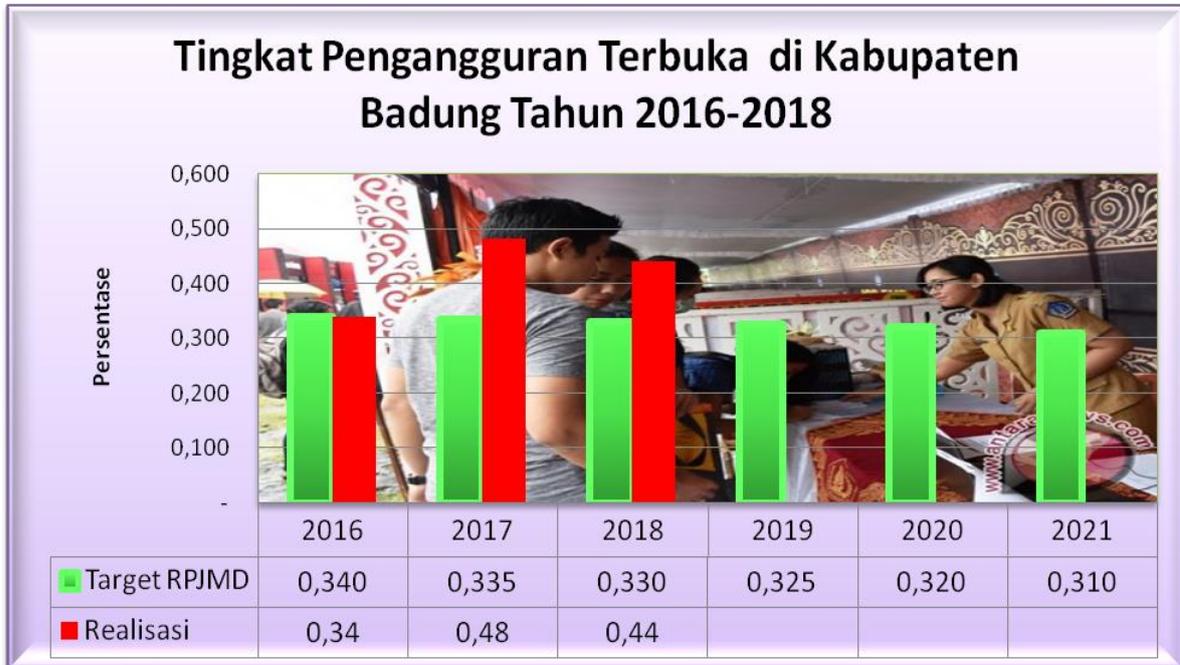




Produktivitas Tenaga Kerja, Program Peningkatan Kesempatan Kerja, Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan. Alokasi anggaran untuk pencapaian sasaran ini sebesar Rp. 8.202.959.100,-

Grafik 3.22

Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Badung Tahun 2016-2018



Sumber : BPS Kabupaten Badung

Tabel 3.3

Tingkat Pengangguran terbuka di Indonesia Tahun 2018

No	Nama Provinsi & Kabupaten/Kota	TPT ( % )
1	Nasional	5,13%
2	Provinsi Bali	1,37%
3	Provinsi Jawa Barat	8,16%
4	Provinsi Jawa Timur	3,99%
5	Provinsi Sulawesi Selatan	5,39%
6	Provinsi DKI Jaya	5,34%
7	Provinsi NTB	3,38%
<b>8</b>	<b>Kabupaten Badung</b>	<b>0,44%</b>
9	DIY	3,06%
10	Kota Mataram	3,52%
11	Kota Surabaya	6,84%
12	Kota Denpasar	2,63%
13	Kabupaten Gianyar	1,02%

Sumber : BPS dimasing - masing Provinsi & Kabupaten/Kota





*Pelatihan Tenun di Desa Sibang Kaja Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung selama 2 Bulan (8 Agustus 2018 sampai 5 Nopember 2018)*

### Sasaran 17 Meningkatnya Infrastruktur Wilayah Yang Berkualitas



Infrastruktur wilayah yang mantap dan berkualitas diharapkan dapat menjamin kelancaran distribusi barang dan jasa, peningkatan kesejahteraan masyarakat serta daya saing daerah di tingkat nasional dan internasional. Sebagai daerah tujuan wisata yang sudah terkenal Kabupaten Badung dituntut mampu menyediakan infrastruktur wilayah yang berkualitas sehingga mampu bersaing dengan para kompetitor dari negara lain yang sama-sama

mengandalkan sektor kepariwisataan. Salah satu infrastruktur jalan dan trotoar di Kabupaten Badung diharapkan semakin meningkat kualitasnya.

Infrastruktur adalah fasilitas-fasilitas fisik yang dikembangkan dan dibutuhkan agen-agen publik untuk fungsi-fungsi pemerintahan dalam penyediaan air, tenaga listrik, pembuangan limbah, transportasi dan pelayanan lainnya untuk memfasilitasi tujuan-tujuan





sosial dan ekonomi. Infrastruktur yang dimaksud dalam laporan ini adalah dibatasi pada jalan dan jembatan.



Indikator infrastruktur kondisi mantap merupakan indikator penilaian terhadap kondisi jalan yang berkondisi baik. Target capaian Indikator infrastruktur kondisi mantap ditetapkan untuk tahun 2018 sebesar 98,00 %. Hasil capaian indikator infrastruktur kondisi mantap telah tercapai sepenuhnya (100%) atau dari 683,743 km Panjang Jalan di Kabupaten Badung, kondisi baiknya sepanjang 647,590 km (94,712 %) dan kondisi sedang sepanjang 36,153 km (5,29 %). Tidak tercapainya kinerja ini disebabkan karena adanya penambahan ruas jalan baru dan saluran irigasi yang rusak ringan dan rusak berat sepanjang 30,59 Km. Distribusi kondisi jalan di Kabupaten Badung berdasarkan kategorinya seperti berikut :

Tabel 3.4  
Distribusi Panjang Jalan dan Kondisi Jalan per Kecamatan  
di Kabupaten Badung Tahun 2018

No	Kecamatan	Panjang Jalan (mtr)	Kondisi				
			Baik	%	Sedang	%	Rusak
1	Kuta Utara	102.601	98.850	96,34	3.751	3,66	0
2	Kuta	66.891	66.292	99,10	599	0,90	0
3	Kuta Selatan	117.298	111.408	94,98	5.890	5,02	0
4	Mengwi	167.992	162.449	96,70	5.543	3,30	0
5	Abiansemal	131.408	122.238	93,02	9170	6,98	0
6	Petang	97.553	86.353	88,52	11.200	11,48	0
	Kabupaten	683.743	647.590	94,71	36.153	5,29	0





Capaian saluran kondisi baik dengan capaian kinerja sebesar 95,88%. Sedangkan panjang seluruh saluran irigasi sepanjang 742,88 Km dengan kondisi dominan baik sepanjang 712,27Km (95,88%). distribusi jenis saluran menurut kondisinya seperti pada tabel berikut:

Tabel 3.5  
Distribusi Panjang Saluran dan Kondisi Irigasi per Kecamatan di Kabupaten Badung Tahun 2018

No	Jenis Saluran Irigasi	panjang total (km)	Kondisi					
			Baik	%	Rusak Ringan	%	Rusak Berat	%
1	Saluran Primer	71,28	68,4	95,96	2,87	4,03	0	-
2	Saluran Sekunder	46,91	45,5	96,99	1,41	3,01	0	-
3	Saluran Tersier	622,16	595,84	95,77	6,53	1,05	19,78	3,18
4	Saluran Pembuang	2,53	2,53	100,00	0	-	0	-
	Total saluran	742,88	712,27	95,88	10,81	1,46	19,78	2,66

Hasil capaian kinerja tahun 2018 lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2017 sebesar 94,30% dan lebih baik bila dibandingkan dengan capaian Kabupaten Bandung, Jawa barat tahun 2018 dengan capaian 15%. Perbandingan dengan Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat seperti dalam tabel berikut:

Grafik 3.23  
Perbandingan Kondisi Kemantapan Jalan di Kabupaten Badung Tahun 2018



Jalan Lingkungan adalah jalan-jalan di wilayah permukiman penduduk di luar jalan Kabupaten yang merupakan usulan prioritas dari masyarakat dan telah melalui kajian teknis dan mekanisme penganggaran. Ruas-ruas jalan sebagian besar dengan lapis perkerasan dan pemasangan paving dengan lebar jalan bervariasi antara 2,00 – 3,00 M.

Kondisi awal Jalan Lingkungan yang telah ditangani dalam kondisi baik pada tahun 2016 sebesar 64,67% (1.651.886,92 m<sup>2</sup>) dari target akhir RPJMD Th 2021 sebesar





92,24% (2.356.037,87 m<sup>3</sup>). Hasil evaluasi pada tahun 2018 dengan target 81,08% (2,071,037.87 m<sup>3</sup>) terealisasi sebesar 81,28% (2,076,156.14 m<sup>3</sup>) sehingga capaian kinerja sebesar 100,25%. Bila dibandingkan capaian kinerja tahun 2017 terjadi peningkatan sebesar 3,84 % di tahun 2018.

Sampai akhir tahun 2018 pencapaian melebihi target karena seperti tahun sebelumnya, tetap adanya prioritas penuntasan penanganan jalan lingkungan kondisi kurang baik menuju fasilitas umum seperti pura, menuju lingkungan banjar/ desa di seluruh Kabupaten Badung sesuai hasil kajian teknis sampai Tahun 2018.

Drainase Lingkungan permukiman adalah saluran drainase di wilayah permukiman penduduk di luar drainase yang berada di jalan Kabupaten. Perkembangan pelaksanaan drainase lingkungan permukiman merupakan salah satu kelengkapan dasar fisik lingkungan yang memungkinkan lingkungan permukiman dapat berfungsi sebagaimana mestinya.

Kondisi awal drainase Lingkungan yang telah ditangani dalam kondisi baik pada tahun 2016 sebesar 58,21% (2,973,692.00 m<sup>3</sup>) dari target akhir RPJMD Th 2021 sebesar 59,62% (3,045,722.90 m<sup>3</sup>). Hasil evaluasi capaian sasaran pada tahun 2018 dengan target 58,74% (3,000,767.58 m<sup>3</sup>) terealisasi sebesar 58,75% (3,001,418.10 m<sup>3</sup>) sehingga capaian kinerja sebesar 100,02%. Sampai akhir tahun 2018 pencapaian melebihi target karena seperti tahun sebelumnya, tetap adanya prioritas peningkatan drainase lingkungan untuk menjamin tercapainya penataan prasarana, sarana, utilitas (PSU) lingkungan permukiman berfungsi baik. Bila dibandingkan capaian kinerja tahun 2017 terjadi peningkatan sebesar 0,25 % di tahun 2018.

Untuk pencapaian sasaran strategis meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas dengan indikator Infrastruktur dalam kondisi mantap, didukung beberapa program antara lain: program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa, program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan, program peningkatan pelayanan angkutan, program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, program pembangunan prasarana dan fasilitas dan program pengembangan perumahan dan permukiman. Anggaran yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran ini sebesar Rp. 362.277.228.755,-

Upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk pencapaian sasaran ini antara lain: peningkatan pemeliharaan jalan dan jembatan, pembangunan baru dan rehabilitasi saluran irigasi dan pembangunan dan rehabilitasi saluran drainase, peningkatan lingkungan Sehat Perumahan, penataan Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan prioritas daerah pariwisata.

## **Sasaran 18 Meningkatnya Produksi Pangan Nabati Dan Hewani**

### **Skor Pola Pangan Harapan**

Pola pangan harapan adalah susunan beragam pangan atau kelompok pangan yang didasarkan atas proporsi sumbangan energinya terhadap total energi yang mampu





mencakupi kebutuhan konsumsi pangan dan gizi penduduk baik dari jumlah, kualitas maupun keragamannya dan mempertimbangkan segi-segi sosial, ekonomi, budaya dan cita rasa. Pola Pangan Harapan digunakan sebagai basis perencanaan dan penilaian kecukupan gizi seimbang pada tingkat makro. Pola Pangan Harapan sebagai salah satu indikator output pembangunan pangan termasuk evaluasi penyediaan pangan, konsumsi pangan, dan diversifikasi pangan. Skor Pola Pangan Harapan diperoleh dengan cara mengalikan antara presentase Angka Kecukupan Energi (AKE) tingkat konsumsi dengan bobot setiap kelompok pangan yang sudah ditetapkan.



*Festival Budaya Pertanian 2018 yang ke 7 Kabupaten Badung, Bali, yang digelar di kawasan Jembatan Tukad Bangkung, Desa Pelaga , Kecamatan Petang, Badung, berhasil memecahkan rekor MURI*

Keragaman konsumsi pangan berdasarkan energi aktual dari Sembilan (9) kelompok pangan berdasarkan metode PPH dikelompokkan menjadi sangat kurang (<55), kurang (55-69), cukup (70-84), dan baik ( $\geq 85$ ) (Prasetyo *et al.* 2013).

Kontribusi energi terbesar berasal dari kelompok bahan makanan padi-padian sebesar 50% dan kontribusi terbesar kedua adalah energi dari kelompok bahan makanan Pangan Hewani sebesar 12%, serta kontribusi terkecil adalah bahan makanan buah dan biji berminyak sebesar 3%. Sedangkan skor tertinggi adalah dari kelompok sayur-sayuran sebesar 30, yang kedua kelompok bahan makanan padi-padian 25 dan berikutnya kelompok bahan makanan pangan hewani (termasuk ikan) sebesar 24.

Realisasi target Skor Pola Pangan Harapan (PPH) konsumsi pangan rata-rata rumah tangga penduduk Kabupaten Badung tahun 2017 adalah 94,50 dari target 93.50 masih lebih tinggi dari rata-rata Nasional sebesar 88 (*Laporan Kinerja Kementan, 2017*). Skor Pola Pangan Harapan tahun 2018 ditargetkan 94,00 dengan realisasi 95,94 capaian kinerjanya sebesar 102,06 %. Capaian tahun 2018 terjadi peningkatan 1 % bila dibandingkan tahun 2017. Hal ini menunjukkan bahwa penyediaan kalori untuk masyarakat





di Kabupaten Badung telah terpenuhi dan termasuk **kategori baik**. Kondisi ini juga menggambarkan bahwa ragam sumber kalori yang dikonsumsi masyarakat sudah beraneka ragam tidak hanya nasi, tetapi juga sumber kalori lain seperti umbi-umbian, pangan hewani, minyak dan lemak, buah biji berminyak, kacang-kacangan, gula, sayur dan buah.

Sumber pangan hewani yang berasal dari ikan menunjukkan jumlah produksi perikanan Dinas Perikanan Kabupaten Badung terus meningkat, dengan gambaran produksi pada Tahun 2018 sebanyak 9.515,42 Ton dan tahun 2017 sebanyak 7.271,22 ton.

Grafik 3.24  
Jumlah Produksi Perikanan di Kabupaten Badung Tahun 2016-2018



Peningkatan produksi perikanan ini oleh karena bantuan kepada masyarakat berupa pengadaan sarana dan prasarana perikanan tangkap dan perikanan budidaya, serta adanya pembinaan dan temu teknis yang diselenggarakan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Badung.

Sesuai Peraturan Bupati Badung nomor 13 Tahun 2015, melalui program yang disebut dengan *SIBETIS MULUS (DISTRIBUSI BENIH GRATIS MENUJU KELUARGA SEJAHTERA)* maka benih ikan diberikan secara gratis kepada kelompok masyarakat. Benih ikan tersebut telah dapat dimanfaatkan melalui SIBETIS MULUS yaitu kepada 48 kelompok masyarakat maupun pembudidaya ikan sebanyak 1.309.000 ekor benih yang terdiri dari ikan nila, karper dan lele.

Program yang menunjang pencapaian sasaran strategis meningkatnya produksi pangan nabati dan hewani antara lain: Peningkatan Kesejahteraan Petani, Peningkatan Ketahanan Pangan, Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi, Pemberdayaan Penyuluh





Pertanian, Pengembangan Budidaya Perikanan, Pengembangan Perikanan Tangkap, Pemberdayaan dan perlindungan nelayan dan pembudidaya ikan kecil, dsb dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 16.207.469.272,-

Beberapa faktor yang dapat mendukung pengembangan pertanian, peternakan dan perikanan di Kabupaten Badung adalah :

- adanya UPSUS PAJALE, BABE dari pusat yang mendorong peningkatan penanaman Padi, Jagung, Kedelai, Bawang dan Cabe.
- Lahan pengembangan budidaya yang luas di Kabupaten Badung
- Adanya balai benih ikan yang dikelola oleh Dinas Perikanan Kabupaten Badung

Sedangkan faktor yang bisa menghambat peningkatan produksi perikanan di Kabupaten Badung adalah :

- adanya perbaikan jaringan irigasi di 11 Subak Kecamatan Kuta Utara, Curah Hujan dan hari hujan turun dari tahun yang lalu (50%). Adanya alih fungsi sebesar 144 Ha. Terjadinya kekeringan di Subak Pacung Babakan dan Tungklub Dalem Kec. Mengwi karena perbaikan jaringan irigasi.
- Perubahan cuaca yang menyebabkan banyaknya kematian ikan budidaya dan susah nelayan untuk melaut.
- Tingkat penguasaan teknologi yang masih terbatas di kalangan pembudidaya ikan dan nelayan di Kabupaten Badung
- Banyaknya terjadi alih profesi dari pembudidaya, terutama budidaya rumput laut dan nelayan yang menjadi pelaku usaha pariwisata.
- Masih rendahnya kemampuan Balai Benih Ikan dalam memproduksi bibit ikan yang diperlukan kelompok pembudidaya.
- Ayam buras; Di daerah Kuta Selatan adanya alih fungsi lahan peternakan untuk akomodasi wisata, sedangkan di Daerah Mengwi dulu ada peternakan ayam buras tetapi sekarang sudah tidak beroperasi lagi.
- Itik; Adanya pemindahan sentra itik dari Mengwi ke Jembrana akibat semakin terbatasnya lokasi pemeliharaan dan pengembalaan itik.



Nelayan di Pantai Kedonganan



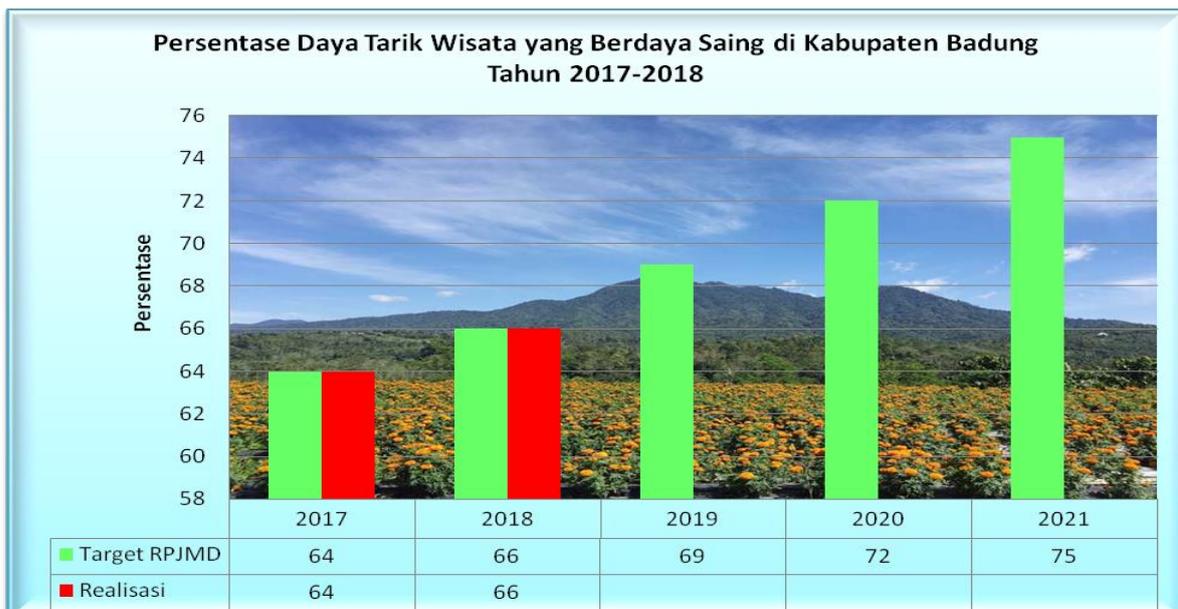


### Sasaran 19 Meningkatnya Daya Tarik Wisata yang Berdaya Saing

Untuk menjaga agar sektor pariwisata dapat terus menjadi primadona dan motor penggerak roda pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Badung serta dapat terus bersaing dengan destinasi wisata kelas dunia lainnya, maka pengembangan daya tarik wisata harus mendapatkan prioritas utama dalam pembangunan daerah. Oleh karena itu, sasaran meningkatnya daya tarik wisata yang berdaya saing dengan indikator prosentase daya tarik wisata yang berdaya saing merupakan bentuk komitmen menjaga keberlangsungan sektor kepariwisataan. Untuk dapat meningkatkan daya saing, setiap DTW harus memenuhi persyaratan standar sebagaimana diatur dalam peraturan gubernur Bali nomor 41 tahun 2010 tentang standarisasi Daya Tarik Wisata (DTW) antara lain memiliki manajemen pengelolaan, fasilitas toilet, P3K, loket penjualan tiket, petugas keamanan, petugas parkir, tempat sampah, media informasi dan memiliki usaha penunjang seperti art shop. Oleh karena itu, perlu dilakukan penataan agar memenuhi standar yang telah ditetapkan sehingga bisa kompetitif dengan DTW daerah lainnya.

Daya tarik wisata yang telah memenuhi standar tahun 2017 ditargetkan 64% terealisasi sebesar 64% (23 DTW) dari 39 DTW yang ada di Kabupaten Badung, sehingga capaian kinerja sebesar 100 %. Sedangkan tahun 2018 DTW yang memenuhi standar daya saing ditargetkan meningkat dari tahun lalu menjadi 66 %. Sesuai Peraturan Bupati Badung Nomor 4 tahun 2018, jumlah DTW sebanyak 39 tersebar di seluruh kecamatan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 24 DTW (66%) sudah dilakukan penataan untuk memenuhi standar daya saing. Dengan demikian, capaian kinerja sasaran ini tahun 2018 sesuai dengan target yang ditetapkan (100%).

Grafik 3.25  
Persentase Daya Tarik Wisata yang Berdaya Saing  
di Kabupaten Badung Tahun 2017-2018





Jenis obyek Wisata di Kabupaten Badung

Distribusi daya tarik wisata menurut kecamatan di Kabupaten Badung tahun 2018 menunjukkan kecamatan dengan daya tarik wisata yang sesuai standar yang tertinggi di Kecamatan Petang sebesar 80% dan terendah di Kecamatan Mengwi sebesar 40%, distribusi selengkapnya seperti berikut :

Tabel 3.6  
Daya Tarik Wisata (DTW) di Kabupaten Badung Tahun 2018

No	KECAMATAN	JUMLAH DTW	JUMLAH DTW	%
		YANG ADA	SESUAI STANDAR	
1	Kecamatan Petang	5	4	80,00
2	Kecamatan Abiansemal	3	2	66,67
3	Kecamatan Mengwi	5	2	40,00
4	Kecamatan Kuta Utara	3	2	66,67
5	Kecamatan Kuta	4	3	75,00
6	Kecamatan Kuta Selatan	16	11	68,75
	<b>KABUPATEN</b>	<b>36</b>	<b>24</b>	<b>66,67</b>

Hasil capaian ini pada tahun 2018 dibandingkan dengan tahun 2017 target 64% ( 23 DTW ) dengan realisasi 64% (23 DTW) dengan capaian kinerja 100%, terjadi peningkatan sebanyak 1 DTW yang memenuhi standar pada tahun 2018.





Daya tarik wisata Kabupaten Badung yang terstandar lebih banyak bila dibandingkan dengan Kota Denpasar memiliki 42 DTW dan semuanya masih dalam proses penataan (sumber: Dispar Kota Denpasar) sedangkan dengan Kabupaten Tabanan memiliki 25 DTW, 6 DTW sudah berkembang 19 DTW belum berkembang (Sumber: Dispar Kabupaten Tabanan)

Dibandingkan dengan Provinsi Jawa Timur Khususnya Kabupaten Banyuwangi yang sedang gencar mengembangkan pariwisata memiliki 60 DTW, dan masih dalam proses penataan. Sedangkan Apabila dibandingkan dengan kota lainnya di Indonesia Kabupaten Badung menduduki peringkat ke 2 setelah Sukabumi dalam aspek potensi (jumlah) wisata alam dan wisata buatan. (sumber: *Litbang Kompas yang mengacu pada konsep Travel and Tourism Competitive Index*).

Dengan adanya daya tarik wisata yang memenuhi standar dapat meningkatkan daya tarik wisata yang berdaya saing, sehingga Kabupaten Badung tetap menjadi daerah tujuan wisata utama di Provinsi Bali dengan didukung oleh program pemasaran pariwisata dengan kegiatan promosi pariwisata baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

Program pendukung persentase daya tarik wisata yang memenuhi standar adalah program pengembangan destinasi pariwisata dengan 17 kegiatan, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 9.902.071.330.

Faktor yang menjadi penghambat dalam pencapaian indikator persentase daya tarik wisata yang berdaya saing diantaranya adanya rasionalisasi anggaran sehingga adanya beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan dan adanya bencana alam (erupsi gunung agung).

Strategi dalam upaya untuk meningkatkan capaian indikator ini meliputi: pengalokasian anggaran untuk perbaikan daya tarik wisata, pengembangan destinasi wisata, pengembangan pemasaran pariwisata dan pengembangan pengelolaan produk-produk wisata.

## **Sasaran 20 Meningkatnya Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB**

Sektor pariwisata telah terbukti mampu menjadi lokomotif pembangunan di Kabupaten Badung serta memberikan kontribusi yang besar bagi pendapatan asli daerah (PAD) dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kontribusi sektor pariwisata terhadap





PDRB terutama didukung bidang usaha penyediaan akomodasi dan makan minum, transportasi dan pergudangan terus menunjukkan perkembangan yang positif.



Bidang usaha Hotel dan Restoran memberikan sumbangan besar bagi PDRB Kabupaten Badung

Tahun 2017 kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Kabupaten Badung ditargetkan 28.17%, dengan realisasi 28,88%. Distribusi PDRB tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Grafik 3.26  
Distribusi PDRB Kabupaten Badung Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2015-2017



Sumber: Statistik Kabupaten Badung, 2015-2017

Sektor pariwisata setiap tahun memberikan kontribusi terbesar terhadap PDRB Kabupaten Badung dibandingkan dengan sektor lainnya di Kabupaten Badung, dimana

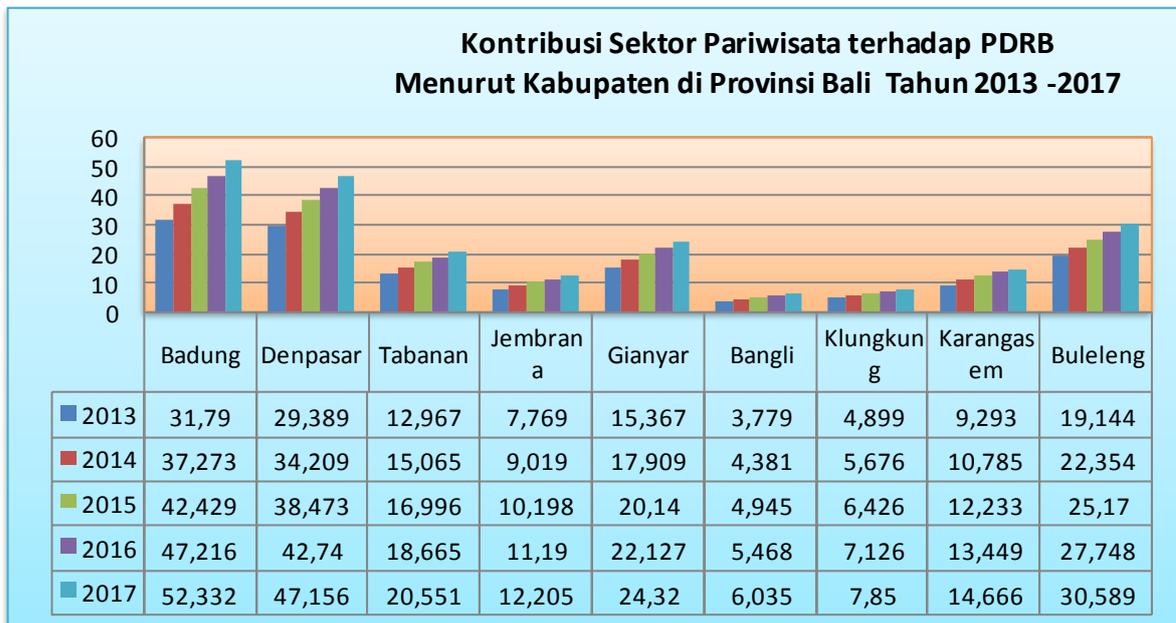




pada tahun 2016 sektor pariwisata memberikan kontribusi terbesar yaitu 28,16% dibandingkan dengan sektor lainnya.

Pada tahun 2018 kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB di prediksi mengalami peningkatan hal ini disebabkan meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan dan diselenggarakannya berbagai acara MICE berskala nasional dan internasional di kawasan Nusa Dua. Apabila dibandingkan dengan Kabupaten lainnya di Bali maka kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Grafik 3.27  
Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB Menurut Kabupaten di Provinsi Bali Tahun 2013-2017



Sumber : Badan Statistik Provinsi Bali, 2013-2017

Dari tabel di atas dapat dilihat kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB seluruh Kabupaten di Bali, sektor pariwisata di Kabupaten Badung memberikan kontribusi terbesar terhadap PDRB Kabupaten Badung yaitu sebesar 52,332% dibandingkan dengan 8 (delapan) Kabupaten /Kota yang ada di Bali

Program yang mendukung sasaran strategis meningkatnya kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB antara lain: program pengembangan dan pengelolaan produk wisata dengan kegiatan pelatihan dan pengawasan usaha industri pariwisata, monitoring dan evaluasi pungutan retribusi obyek wisata, pembinaan bidang daya tarik wisata, percepatan sertifikasi usaha dan penyusunan data base industri pariwisata

### 3.3. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah didasari atas komitmen anggaran yang disediakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Badung. Oleh





karena itu kebijakan pengelolaan keuangan daerah dalam konteks memantapkan otonomi daerah desentralisasi fiskal yang menganut prinsip “ *Money Follows Program*” yaitu pengelolaan keuangan daerah disesuaikan dengan alokasi dan fungsinya dengan dukungan pendanaan melalui penyerahan sumber-sumber pendapatan daerah khususnya pendapatan asli daerah dana lokasi dana dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah daerah lainnya.

Pendapatan daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah Daerah (PAD), Dana Perimbangan serta Lain-lain pendapatan daerah yang sah. Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Badung tahun 2018 terealisasi sebesar Rp. 5.419.991.741.209,68 dari target yang ditetapkan sebesar Rp.7.569.868.372.669,63 (71,60%). Tidak tercapainya pendapatan asli daerah tersebut disebabkan karena beberapa faktor antara lain:

1. Adanya beberapa target yang tidak terpenuhi dari Pemerintah Pusat misalnya seperti :
  - Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
  - Dana Alokasi Umum dan
  - Dana Alokasi Khusus
2. Adanya Target dari Pemerintah Provinsi yang belum terpenuhi seperti dana bagi hasil pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya

Anggaran pembangunan (Belanja Daerah) di Kabupaten Badung sebesar Rp. 8.155.281.067.642,0 dengan realisasi sebesar Rp. 5.795.814.588.000,48 (71,07%) terdiri dari realisasi belanja tidak langsung sebesar 75,44% dan belanja langsung sebesar 66,26%. Adapun realisasi belanja daerah seperti tabel berikut :

Tabel 3.7  
Realisasi belanja daerah di Kabupaten Badung Tahun 2018

No	JENIS BELANJA	ANGGARAN	REALISASI	%
	<b>Anggaran Belanja</b>	8.155.281.067.642,0	5.795.814.588.000,48	71,07
<b>I</b>	Belanja Tidak Langsung	4.274.272.528.422,53	3.224.363.103.572,97	75,44
<b>II</b>	Belanja Langsung	3.881.008.539.219,57	2.571.628.319.846,51	66,26
	a. Belanja Pegawai	120.232.784.433	107.521.240.115	89,43
	b. Belanja Barang & Jasa	2.111.668.858.048,69	1.558.445.371.607,43	73,80
	c. Belanja Modal	1.649.106.896.737	905.661.708.124,09	54,23

Alokasi anggaran tahun 2018 untuk pencapaian sasaran strategis sebesar Rp.1.315.742.365.110,22,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.926.513.408.404,11





sehingga prosentase penyerapan sebesar 70,42%. Sasaran strategis didukung program sebanyak 113 dan kegiatan sebanyak 773. Alokasi dan realisasi anggaran dari masing-masing program kegiatan untuk pencapaian sasaran strategis seperti berikut:

Tabel 3.8  
Sasaran Strategis, Program, Kegiatan, Pagu dan Realisasi Anggaran  
Kabupaten Badung Tahun 2018

NO	Sasaran Strategis	Jumlah Program	Jumlah Kegiatan	Pagu Anggaran	Reallisasi	%
1	2	4	5	6	7	8
1.	Meningkatnya toleransi hidup beragama	3	5	1.777.672.100	1.562.594.200	87,90
2.	Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	4	58	203.578.208.416	180.440.654.400	88,63
3.	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	1	1	429.828.400	368.367.500	85,70
4.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	1	4	74.174.300	74.174.300	100
5.	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah	3	3	561.614.200	388.786.500	69,23
6.	Terwujudnya Pemerintahan bersih dan bebas KKN	3	25	2.402.555.400	1.762.966.200	73,38
7.	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	21	154	481.206.263.805	424.711.597.811	88,26
8.	Meningkatnya tingkat kebahagiaan masyarakat	1	1	535.013.000	534.971.000	99,99





NO	Sasaran Strategis	Jumlah Program	Jumlah Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi	%
9.	Menurunnya angka kemiskinan	9	12	2.739.525.880	1.947.170.450	71,08
10.	Meningkatnya kontribusi sektor UMKM terhadap PDRB	2	14	2.913.780.300	2.640.544.942	90,62
11.	Meningkatnya pencegahan pelanggaran Perda dan Perkada	4	11	756.458.000	673.821.800	89,08
12.	Meningkatnya penegakan Perda dan Perkada	3	9	7.459.417.500	7.164.184.900	96,04
13.	Meningkatnya pengarasutamaan gender	6	21	2.414.983.020	2.267.958.846	93,91
14.	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	8	76	87.702.181.381	70.364.295.420	80,23
15.	Meningkatnya kapasitas dalam penanggulangan bencana	5	42	41.859.201.820	26.142.131.664	62,45
16.	Meningkatnya daya saing tenaga kerja	2	10	8.202.959.100	7.643.238.900	93,17 6606
17.	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	19	222	362.277.228.755	152.647.223.367	42,14





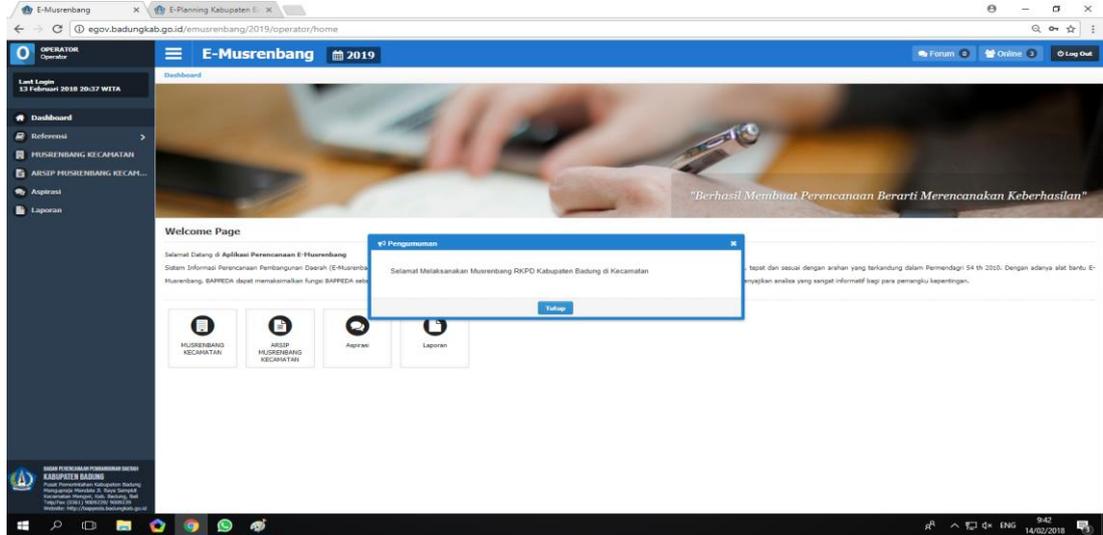
NO	Sasaran Strategis	Jumlah Program	Jumlah Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi	%
18.	Meningkatnya produksi pangan harapan	14	66	16.207.469.272	13.041.599.871	80,47
19.	Meningkatnya daya Tarik wisata yang berdaya saing	3	37	91.977.690.562	31.474.730.558	34,22
20.	Meningkatnya kontribusi sector pariwisata terhadap PDRB	1	2	666.139.900	662.395.775	99,44
	<b>Total</b>	<b>113</b>	<b>773</b>	<b>1.315.742.365.110</b>	<b>926.513.408.404</b>	<b>70,42</b>





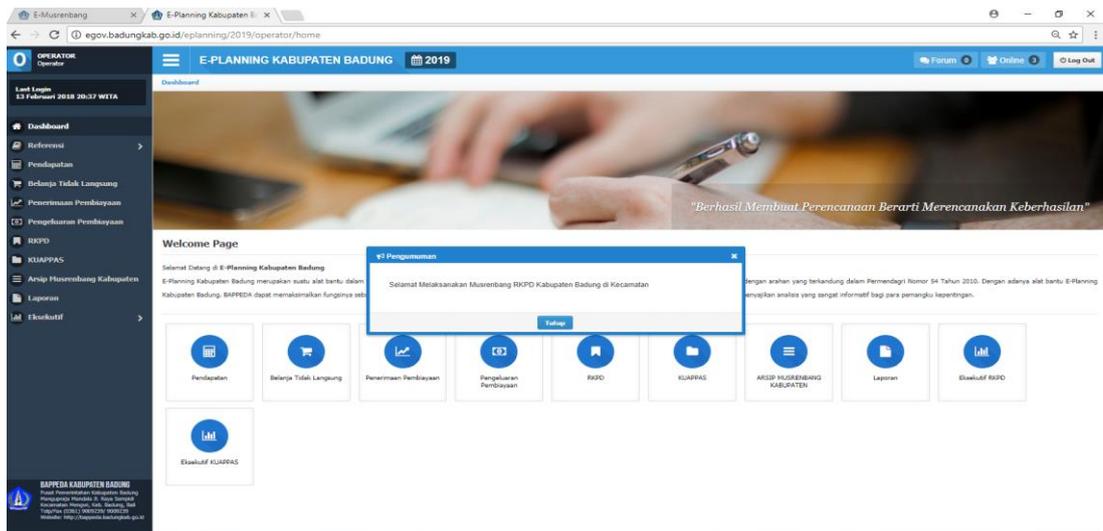
### 3.4 INOVASI DAERAH

#### 1. E-Musrenbang



E-Musrenbang adalah sebuah aplikasi berbasis web yang digunakan dalam pengolahan data-data usulan yang diajukan oleh desa/kelurahan pada saat acara musrenbang kecamatan. Dengan aplikasi ini, membantu memudahkan dalam menyerap kebutuhan masyarakat serta menghindari munculnya proyek siluman.

#### 2. E-Planning

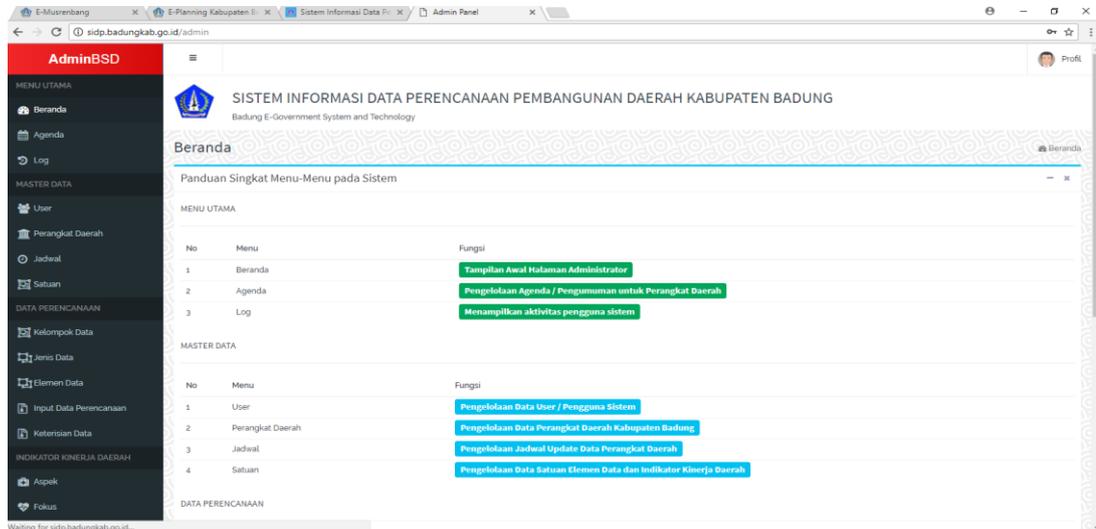


E-Planning adalah sebuah aplikasi berbasis web yang digunakan untuk pengolahan data-data yang berasal dari e-musrenbang untuk kemudian direkap kembali menjadi bentuk RKPD. Dengan e-planning membantu mengarahkan program/kegiatan agar selaras dengan sasaran strategis RPJMD.



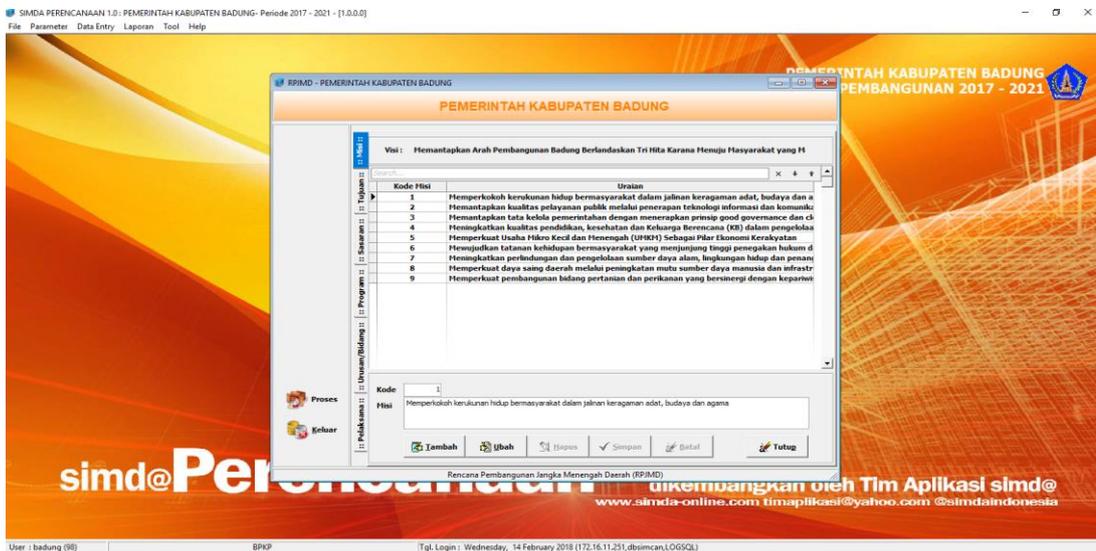


### 3. Sistem Informasi Data Perencanaan (SIDP)



Sistem Informasi Data Perencanaan (SIDP) merupakan sebuah aplikasi berbasis web yang berbentuk statistik yang digunakan untuk membackup keperluan data-data yang dibutuhkan untuk menunjang kinerja perencanaan, sehingga membantu dalam pengambilan keputusan.

### 4. Simda Perencanaan

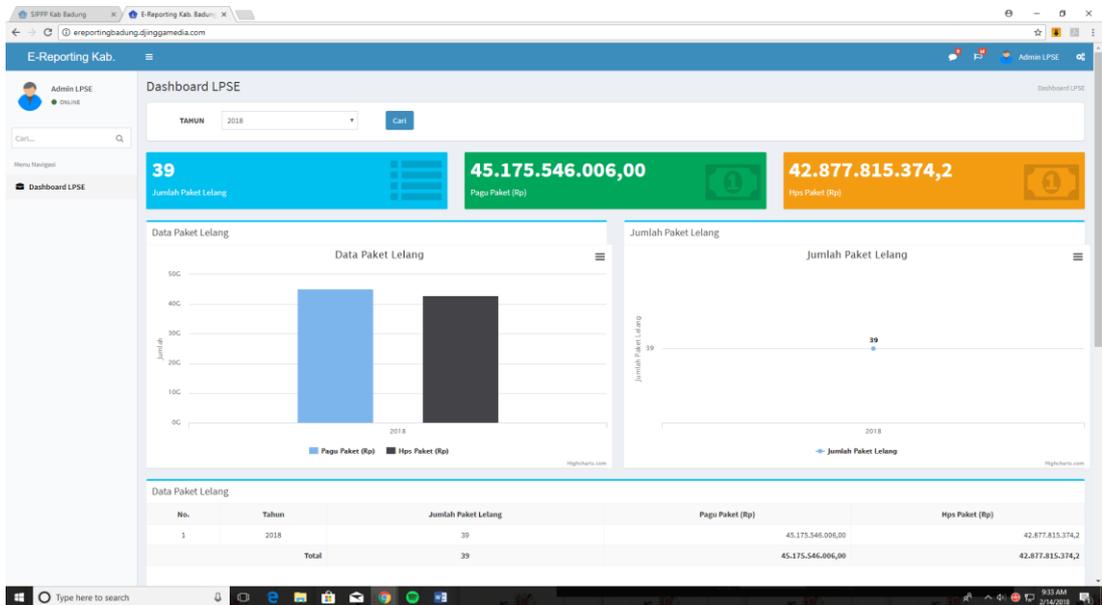


Simda Perencanaan merupakan sebuah sistem berbasis desktop yang digunakan dalam penyusunan dokumen RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) dan juga RENSTRA (Rencana Strategis) Perangkat Daerah. Sistem ini berfungsi untuk mempermudah penyelarasan Antara RPJM, RENSTRA dan RENJA Perangkat Daerah sehingga tidak jauh melenceng dari perencanaan yang sudah disusun.



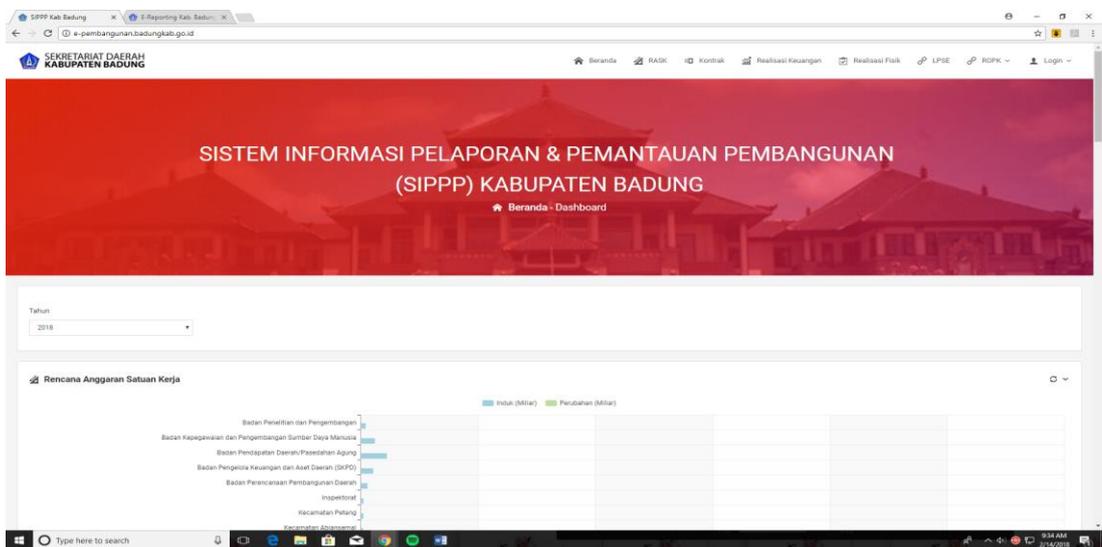


## 5. e-Reporting



e-Reporting bertujuan memonitoring pelaksanaan pengadaan barang dan jasa secara elektronik yang melalui LPSE. E-reporting menyajikan ringkasan paket pengadaan tiap tahun yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Badung.

## 6. e- MONEV/ SIPPP

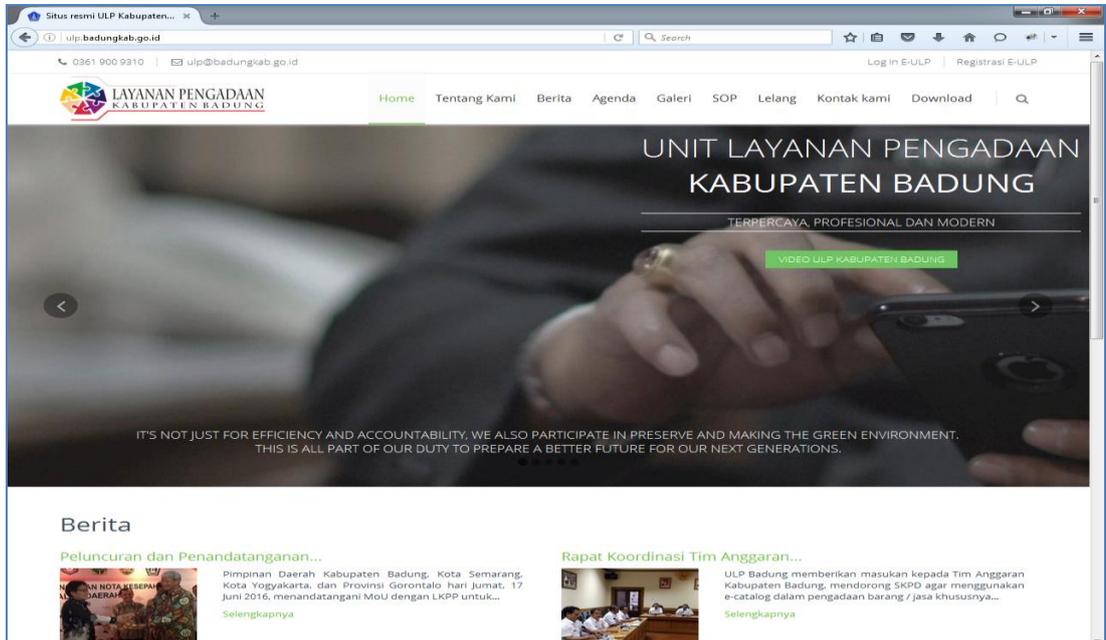


Sistem Informasi Pelaporan dan Pemantauan Pembangunan bertujuan sebagai wadah pelaporan dan pemantauan kegiatan pembangunan di Kabupaten Badung yang disajikan melalui laporan realiasi keuangan, realisasi fisik, serta proses pengadaan barang dan jasa. Sistem ini sudah terintegrasi dengan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) dan telah berbasis web.



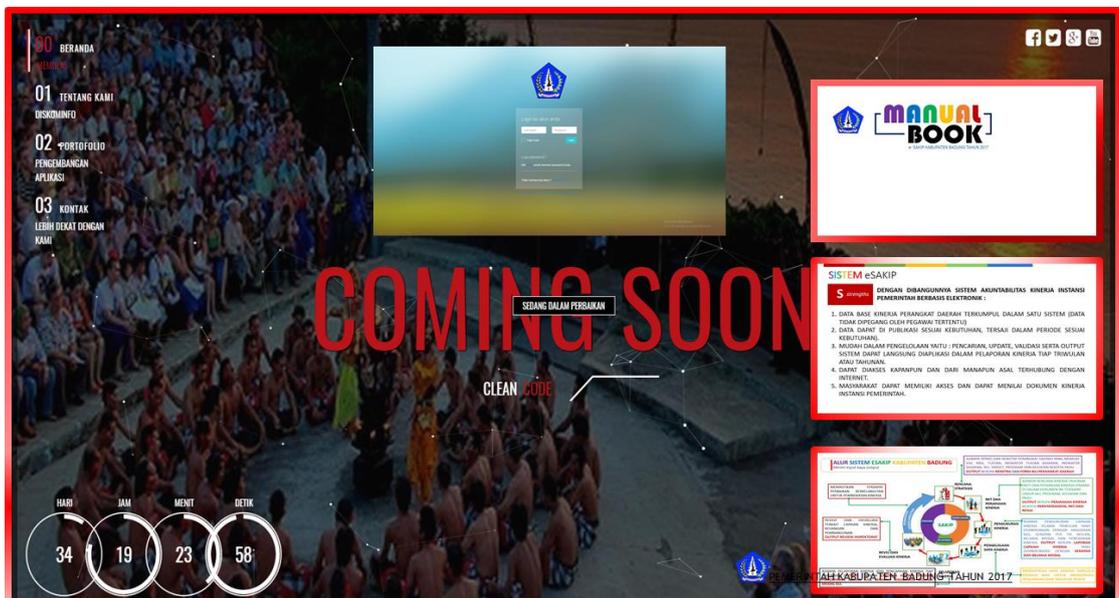


## 7. Unit Layanan Pengadaan (ULP)



Unit Layanan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah dibentuk untuk menjamin agar pelaksanaan pengadaan barang/jasa dilaksanakan secara profesional, adil, transparan dan akuntabel serta efektif dan efisien.

## 8. E-SAKIP



E-SAKIP merupakan aplikasi pelaporan kinerja yang berbasis Web yang membantu pimpinan melakukan monitoring dan mengendalikan capaian kinerja secara cepat serta melaporkan capaian kinerja secara online.





9. Web Badan Pendapatan Daerah Kabupaten badung yang langsung terkoneksi dengan aplikasi - aplikasi untuk mengelola pendapatan Daerah Kabupaten Badung seperti (SIMPAD, SISMIO, BPHTB, SMART MAP)



**10. MANGUPURA AWARDS**

Mangupura Awards merupakan pemberian penghargaan kepada perangkat daerah yang dinilai memiliki tata kelola pemerintahan dan kinerja yang baik serta masyarakat yang dinilai memiliki prestasi dan mampu mengharumkan nama daerah





### 3.5 PRESTASI/ PENGHARGAAN

NO	PENGHARGAAN	KEGIATAN	TANGGAL	KETERANGAN
1	<b>ROLE MODEL PELAYANAN PUBLIK TERBAIK KATEGORI A (SANGAT BAIK)</b>	PENYELENGGARAAN EVALUASI PELAYANAN PUBLIK TAHUN 2017	24 JANUARI 2018	Penghargaan Oleh Kementerian PAN dan RB
2	<b>AGEN PERUBAHAN DALAM UPAYA REFORMASI PENGADAAN MENUJU ULP PERMANEN, MANDIRI DAN PROFESIONAL</b>	PROGRAM MODERNISASI PENGADAAN	2 JANUARI 2018	Penghargaan Oleh LKPP dan MCA-I
3	<b>IN RECOGNITION FOR THEIR COMMITMENT, PARTICIPATION AND CONTRIBUTION IN THE PROCUREMENT SKILL TRAINING PROGRAM AT BPSDMD PROVINCE OF NUSA TENGGARA BARAT TRAINING CENTER</b>	PROGRAM MODERNISASI PENGADAAN	2 JANUARI 2018	Penghargaan Oleh LKPP dan MCA-I
4	<b>PENGHARGAAN PEMBANGUNAN DAERAH TERBAIK II</b>	DALAM PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 TINGKAT KABUPATEN SE-PROVINSI BALI	28 MARET 2018	Penghargaan Oleh Gubernur Bali
5	<b>BAKTI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH</b>	PEMBERIAN PENGHARGAAN ATAU JASA BAKTI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH TAHUN 2018	9 JULI 2018	Penghargaan Oleh Kementerian Koperasi dan Usaha kecil dan Menengah Republik Indonesia





NO	PENGHARGAAN	KEGIATAN	TANGGAL	KETERANGAN
6	<b>GERAKAN MENUJU 100 SMART CITY</b>	GERAKAN MENUJU 100 SMART CITY	24 MEI 2017	Penghargaan Oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi RI
7	<b>PEMKAB BADUNG RAIH WTP</b>	KEBERHASILAN KABUPATEN BADUNG MENYUSUN DAN MENYAJIKAN LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2016	15 MEI 2017	Penghargaan Oleh Menteri Keuangan RI
8	<b>JUARA I KTI TINGKAT NASIONAL</b>	LOMBA KTI TINGKAT NASIONAL	30 MEI 2017	Penghargaan Oleh KEMENBUDPAR RI
9	<b>Penghargaan Nasional Atas Pembentukan Mal Pelayanan Publik</b>		26 Oktober 2018	
10	<b>PENGHARGAAN AKIP</b>	SAKIP Kabupaten Badung	6 Februari 2019	Kementerian PAN dan RB RI

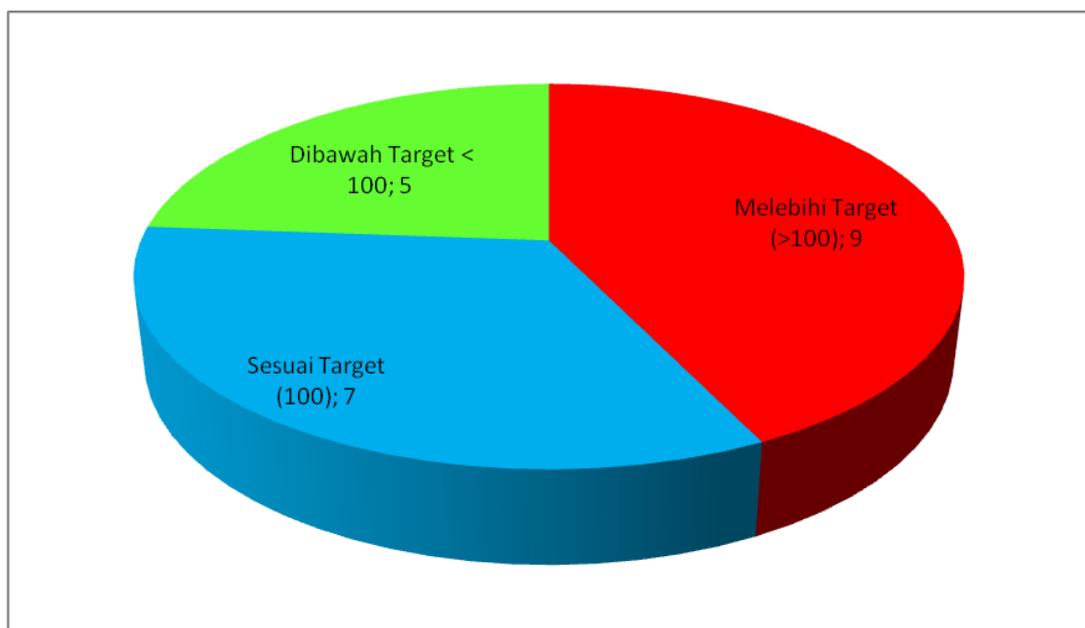




# BAB IV PENUTUP

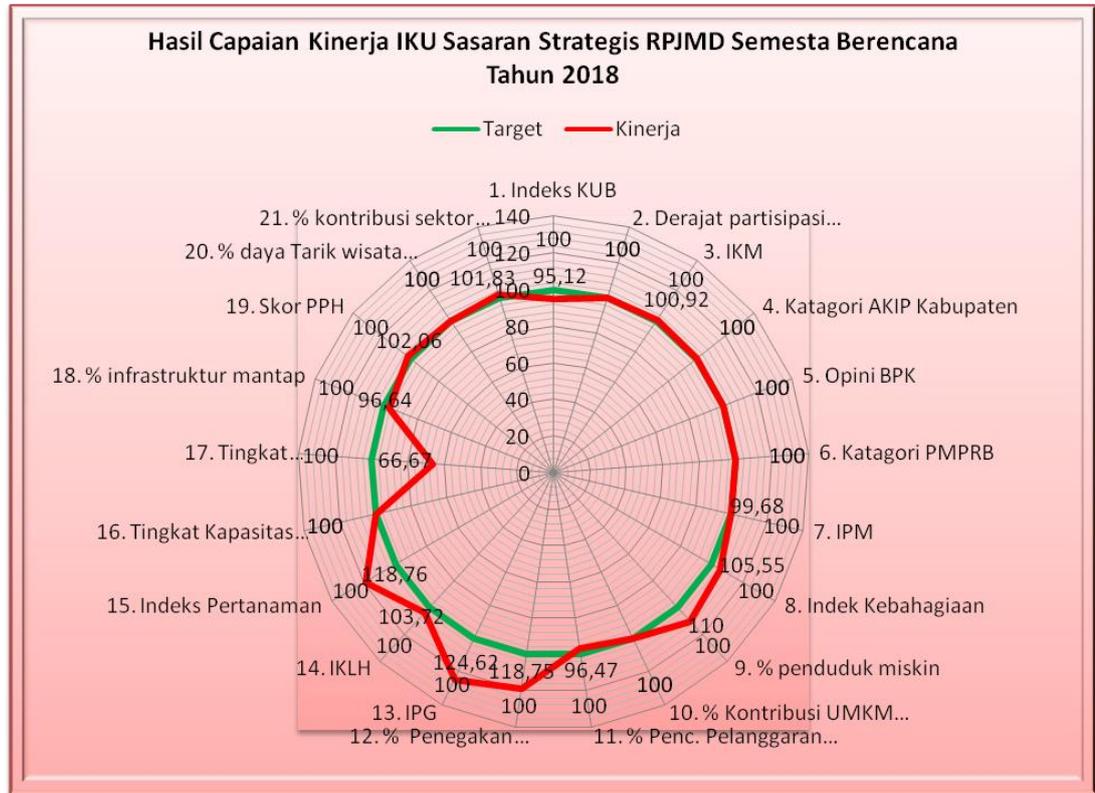
## 4.1. KESIMPULAN

1. Komitmen Pemerintah Kabupaten Badung dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan melalui penerapan sistem akuntabilitas kinerja akan terus ditingkatkan.
2. Laporan kinerja instansi Pemerintah (LkjIP) Tahun 2018 merupakan gambaran kinerja Pemerintah Kabupaten Badung terhadap capaian kinerja sasaran strategis sesuai RPJMD Semesta Berencana beserta keberhasilan dan kegagalan.
3. Secara keseluruhan dari 20 (dua puluh) sasaran strategis dengan 21 (dua puluh satu) indikator kinerja utama (IKU) telah mencapai kinerja rata-rata sebesar 101,94%.
4. Hasil pengukuran terhadap terhadap indikator kinerja utama diperoleh hasil seperti berikut :
  - a. Melebihi target (>100%) sebanyak 9 indikator kinerja utama (42,86%)
  - b. Sesuai target (100%) sebanyak 7 indikator kinerja utama (33,33%)
  - c. dibawah target (<100%) sebanyak 5 indikator kinerja utama (23,81%)





5. Hasil pengukuran indikator kinerja utama (IKU) secara keseluruhan 21 indikator, lebih dominan mencapai target yaitu sebanyak 16 indikator (76.19%) dan 5 indikator yang belum mencapai target (< 100%) sebesar 23,81%.



6. Berdasarkan kategori capaian indikator kinerja utama maka dapat disimpulkan bahwa dari 21 IKU, terdapat 20 (dua puluh) indikator termasuk kategori sangat baik dan 1 (satu) indikator dengan kategori cukup.
7. Alokasi anggaran untuk pencapaian sasaran strategis sebesar Rp.1.315.742.365.110,22,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.926.513.408.404,11,- dengan prosentase penyerapan sebesar 70,42%

#### 4.2. UPAYA PERBAIKAN KINERJA

1. Upaya perbaikan untuk pencapaian sasaran strategis meningkatnya toleransi hidup beragama dengan peningkatan kegiatan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), rehabilitasi tempat ibadah, kerjasama pemuda antar umat beragama serta pembinaan dan sosialisasi wawasan kebangsaan.
2. Peningkatan capaian sasaran strategis meningkatnya kualitas sumber daya





manusia melalui peningkatan akses pelayanan pendidikan dan kesehatan, peningkatan pendidikan non formal serta peningkatan daya beli masyarakat dengan peningkatan kesempatan kerja, pengolahan hasil pertanian, pendidikan dan keterampilan tenaga kerja sert peningkatan daya tarik wisata atau desa wisata.

3. Upaya perbaikan terhadap Indikator tingkat pengangguran terbuka dengan capaian terendah termasuk kategori cukup, hal ini disebabkan oleh karena Meningkatnya penduduk pendatang, bertambahnya angkatan kerja baru, jenis pekerjaan yang tersedia tidak sesuai dengan bakat dan minat calon tenaga kerja. Untuk mengatasi permasalahan tersebut maka upaya-upaya yang akan ditempuh melalui: penciptaan tenaga kerja mandiri, pelatihan peningkatan kesempatan kerja, penyelenggaraan informasi pasar kerja serta peningkatan kualitas lembaga pelatihan kerja.
4. Upaya yang akan dilaksanakan untuk pencapaian sasaran infrastruktur wilayah yang berkualitas melalui peningkatan pemeliharaan jalan dan jembatan, pembangunan baru, rehabilitasi saluran irigasi dan saluran drainase, peningkatan lingkungan Sehat Perumahan, penataan Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan prioritas daerah daya tarik wisata pariwisata.
5. Untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi anggaran maka upaya penyelarasan program/kegiatan yang memberikan kontribusi terhadap pencapaian kinerja sasaran strategis perlu terus ditingkatkan untuk mewujudkan pemerintahan yang berorientasi pada hasil, efektif, efisien dan akuntabel.

**Bupati Badung,**

**I NYOMAN GIRI PRASTA**





